Potret & Dinamika
KOMUNIKASI
Masyarakat Lokal
Dalam Perspektif Jawa Timur

Surokim, Nur'annafi Farni Syam Maella, Yudiana Indriastuti
Muhammad Fadeli, Abdullah, Fahruddin, Bani Eka Dartiningsih
Syamsul Arifin, Tatag Handaka, Rendy Pahrun Wadipalapa
Harliantara, Teguh Hidayatul Rachmad



POTRET & DINAMIKA KOMUNIKASI MASYARAKAT LOKAL DALAM PERSPEKTIF JAWA TIMUR

Pengantar:
Prof. Rachmad Kriyantono, Ph.D.

Penulis :
Surokim, Nur'annafi Farni Syam Maella
Yudiana Indriastuti, Muhammad Fadeli
Abdullah, Fahruddin
Bani Eka Dartiningsih, Syamsul Arifin
Tatag Handaka, Rendy Pahrun Wadipalapa
Harliantara, Teguh Hidayatul Rachmad

KBM INDONESIA
www.penerbitbukumuran.com
Dilarang keras memfotokopi atau mencetak naskah hasil layout ini tanpa izin dari Penerbit

KBM INDONESIA

www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

PENERBIT KBM INDONESIA

adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air Indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku.

POTRET & DINAMIKA KOMUNIKASI MASYARAKAT LOKAL DALAM PERSPEKTIF JAWA TIMUR

Copyright @ 2025 By Surokim dkk

All right reserved

Penulis

Surokim, Nur'annafi Farni Syam Maella
Yudiana Indriastuti, Muhammad Fadeli
Abdullah, Fahruddin
Bani Eka Dartiningsih, Syamsul Arifin
Tatag Handaka, Rendy Pahrun Wadipalapa
Harliantara, Teguh Hidayatul Rachmad

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

Husnud Diniyah

Editor

Surokim, Nur'annafi Farni Syam Maella

Background isi buku di ambil dari https://www. freepik. com/

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit KBM Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

https://penerbitkbm. com

www. penerbitbukumurah. com

Email

naskah@penerbitkbm. com

Distributor

https://penerbitkbm. com/toko-buku/

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

@penerbit. kbmindonesia

@penerbitbukujogja

ISBN: 978-634-278-034-3

Cetakan ke-1, Januari 2026

15,5 x 23 cm, vi + 204 halaman

KBM INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras menyalin atau menyebarkan naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham
dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

KBM INDONESIA
Dilarang keras, mencetak naskah

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

i. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100. 000. 000 (seratus juta rupiah).
ii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500. 000. 000,00 (lima ratus juta rupiah).
iii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1. 000. 000. 000,00 (satu miliar rupiah).
iv. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4. 000. 000. 000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Berilmu dan mengetahui atas segala limpahan berkah ilmu pengetahuan sehingga kami, para dosen dan peneliti yang tergabung dalam Aspikom Wilayah Jawa Timur dapat menyelesaikan buku ini. Buku Potret dan Dinamika Komunikasi Masyarakat lokal Perspektif Jawa Timur,. Percikan pemikiran ini adalah bagian dari ikhtiar untuk membumikan Kearifan Lokal Jawa Timur dalam kajian Komunikasi sekaligus sebagai bagian dari upaya untuk meng-Indonesia-kan ilmu Komunikasi.

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Buku ini merupakan ikhtiar para akademisi komunikasi Jawa Timur sebagai bentuk kegelisahan akademisi atas perkembangan ilmu pengetahuan mutakhir dalam bidang ilmu komunikasi yang semakin didominasi oleh ilmu pengetahuan berperspektif Barat. Di sisi lain, di belahan kawasan Asia Timur justru telah mampu berkembang, bergeliat dan mendesakkan perspektif lokal mereka sebagai pembanding dan juga pelengkap atas perspektif Barat. Ada upaya serius untuk mendudukkan hasil eksplorasi pengetahuan lokal ke dalam diskursus ilmu pengetahuan. Hasilnya, riset dan perkembangan ilmu pengetahuan di Asia Timur bisa berkembang lebih pesat dan mampu meningkatkan harkat dan kepercayaan diri mereka sebagai sebagai sumber pengetahuan dunia.

Tentu saja melawan hegemoni itu tidak mudah dan gampang. Ilmu pengetahuan Barat yang mapan telah didukung infrastruktur yang

memadai dan juga diseminasi publikasi yang masif sehingga membuat ketergantungan yang luar biasa, khususnya masyarakat di belahan negara berkembang. Dalam posisi seperti itu, terus meratapi nasib tanpa mencoba berusaha justru akan membuat kita semakin tenggelam. Maka dari itu, pilihan yang bijak adalah menyalakan nyali dan tekad untuk bangkit mengejar ketertinggalan dengan mulai bergerak.

Ikhtiar itu kami wujudkan dalam bentuk buku berseri sebagai bentuk melakukan penyadaran publik. Pada seri ini, kami mencoba untuk mengenalkan konsep-konsep *local genuine* yang kami ambil dari kajian di masyarakat Jawa Timur. Kendati masih seperti bunga rampai yang ditulis secara terpisah-pisah oleh para dosen komunikasi, tetapi jika dibaca tuntas akan terlihat keutuhan ide yang menggambarkan akan kekayaan eksplorasi konsep lokal dalam masyarakat Jawa Timur. Tentu saja kami berharap langkah awal ini akan dapat menjadi pemacu pada penerbitan seri berikutnya dan mendapat tanggapan riuh dari publik, khususnya akademisi dan masyarakat komunikasi di Indonesia. Kami ingin bersama-sama menjadi bagian dari golongan para pencerah pembangun tradisi baru keilmuan komunikasi berbasis kearifan keunggulan lokal, guna menumbuhkan harapan akan kemandirian dalam membangun pengetahuan.

KDM INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Mempromosikan konsep lokal dalam khazanah pengetahuan saat ini tentu bukan pekerjaan yang mudah. Banyak hal berkelindan baik secara sosial politik, budaya maupun kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dibutuhkan tekad dan kerjasama semua pihak khususnya para akademisi mulai dari tingkat lokal untuk terintegrasi dan berkesinambungan mempromosikan kajian-kajian dan juga dalam distribusi publikasi ilmiah yang bisa dibaca oleh banyak kalangan sehingga bisa mendesakkan konsep itu dalam diskursus mondial. Diharapkan dengan upaya terpadu, maka akan diperoleh banggunan yang lebih lengkap dan

komprehensif perspektif lokal dalam pengembangan ilmu pengetahuan khas Jawa Timur, Indonesia dan juga Asia.

Buku ini juga kami maksudkan sebagai penanda di titik nol kilometer dimana kami mau berangkat mengawal dan berkiprah untuk membumikan kajian ilmu komunikasi di Jawa Timur. Laksana titik nol dalam alun alun kota, kami ingin berangkat dengan semangat baru guna mendorong eksplorasi yang lebih intens dan produktif guna membumikan kajian komunikasi khas Jawa Timur. Selain itu kami juga berharap dukungan publik sehingga kami tidak merasa sendirian dalam menggelorakan semangat ini. Semoga melalui penerbitan ini kami dapat membuka komunikasi yang lebih intens dengan para pembaca untuk bisa membangun peradaban pengetahuan baru yang bisa mengangkat harkat dan kemandirian kita dalam bidang pengetahuan.

Kita harus menumbuhkan semangat keyakinan diri dan memulai dari pemahaman dasar akan adanya keyakinan melalui cara kita sendiri. Bagaimana agar perspektif lokal bisa menjadi perspektif utama dan perspektif lain sebagai pelengkap, bukan sekadar alternatif. Tentu ada beragam prasyarat yang mesti harus dipenuhi, mulai dari hal yang teknis hingga substantif. Pekerjaan itu bukan pekerjaan mudah dan butuh upaya yang sunguh-sungguh serta konsistensi dan ketahanan yang tinggi secara berkesinambungan.

Kesadaran ini penting agar bisa mengubah *mindset* kita, tidak sekadar sebagai pengguna, tetapi juga menjadi kreator. Sudah saatnya kita memulai ikhtiar itu agar bisa turut mewarnai diskursus pengetahuan dan menentukan perkembangan ilmu pengetahuan dunia saat ini hingga ke masa depan. Kita harus memiliki keyakinan dan harapan tinggi bahwa kita adalah bangsa yang besar serta mampu menjadi subyek, tidak sekadar menjadi obyek dalam dinamika perkembangan ilmu pengetahuan.

Buku bagi kami adalah tempat persemaian idealisme ruang publik dan sarana membangun dialog komunikasi dengan masyarakat pembaca. Tekad kami sederhana, yakni ingin membumikan Jatim sebagai pusat peradaban unggul masyarakat madani di Indonesia melalui berbagai kegiatan dan aktivitas komunikasi publik *rahmatanlilalamin.* Tujuan kami sederhana, yaitu ingin Jatim dikenal sebagai salah satu pusat pertumbuhan ilmu pengetahuan sosial di Indonesia. Aspikom Jatim sekali lagi ingin berkontribusi dalam menjadikan Jatim sebagai kawasan pusat pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan di tengah berbagai tantangan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi informasi yang berlangsung cepat hari ini.

Jatim sebagaimana daerah lain di Indonesia sungguh menyimpan potensi yang besar. Masih banyak potensi yang belum dikembangkan dan dieksplorasi. Potensi itu membutuhkan sentuhan pendekatan yang berbeda, oleh karena itu pemahaman akan nilai nilai lokal khususnya kearifan masyarakatnya layak untuk menjadi titik pijak dalam pengembangan kajian kawasan ini ke depan.

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah

Kami yakin bahwa ikhtiar ini akan didukung berbagai pihak. Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dosen di Aspikom jatim yang berpartisipasi dan berkontribusi dalam penerbitan buku ini. Saya percaya semua ini masih awal dan masih sekadar percikan ide berserakan untuk menjadi pemantik dalam penerbitan publikasi buku selanjutnya. Tantangan untuk menerbitkan buku dalam satu bulan ini sungguh membahagiakan yang akhirnya bisa diwujudkan kendati dalam wujudnya yang masih sederhana. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang turut memberi sumbangsih yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.

Semoga tekad dan cita-cita ini mendapat dukungan banyak kalangan, khususnya bagi masyarakat yang dapat melihat era baru

ini, sehingga dapat memberikan dukungan dan partisipasi secara masif dan berkelanjutan. Tidak lupa kami juga ingin menggandeng semua rekan untuk sekuel selanjutnya dan bersama-sama menyusun langkah taktis demi cita-cita luhur dalam mengembangkan ilmu komunikasi khas Jatim. Akhir kata, dengan memohon ridho dan berkah Allah, Tuhan yang Mahakuasa, hari ini kami memulai langkah kami untuk turut serta menjadikan perspektif ilmu komunikasi lokal jatim sebagai perspektif utama dalam hegemoni pengetahuan masyarakat barat.

Salam ***#Membumikan Komunikasi Lokal jawa Timur***

Surabaya, Akhir Tahun 2025

Surokim As.
Editor

KBM INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

KBM
INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

PENGANTAR PAKAR MEMBUMIKAN KEARIFAN LOKAL PADA TEORI DAN PRAKTIK KOMUNIKASI

Prof Rachmat Kriyantono, Ph.D
Anggota Dewan Pakar ASPIKOM Jawa Timur
Email: rachmat_kr@ub.ac.id

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras mencetak naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Dalam beberapa tulisan (Kriyantono, 2017; Kriyantono & McKenna, 2017), saya menyebut bahwa perspektif lokal ke-Indonesia-an belum banyak membumi dalam kajian maupun praktik komunikasi di negara kita. Sejak berkembang di Indonesia pada 1950-an (Sendjaja, 1998), kajian komunikasi masih didominasi perspektif Barat, yakni Amerika Serikat dan Eropa. Hal ini dapat dimengerti karena cikal bakal kajian komunikasi di Indonesia mengalir dari Amerika dan Eropa (Kriyantono, 2017; Rogers, 1997; Rakhmat, 2001). Dengan demikian, perspektif yang muncul dan menjadi landasan filosofis pengembangan teori adalah perspektif Barat, artinya, fenomena komunikasi dikaji dengan menggunakan kacamata Barat, dan dianggap berlaku universal. Sifat universal ini menganggap bahwa teori-teori yang dihasilkan berlaku dalam berbagai konteks tanpa memandang perbedaan geografis, budaya, ideologi atau landasan filosofis dari berbagai unit sosial yang beragam.

Dunia Barat pun menjadi pusat episentrum kajian komunikasi yang berdampak pada penggunaan kacamata tunggal dalam memahami

komunikasi di Indonesia. Dominasi perspektif barat ini disebabkan beberapa faktor. *Pertama*, ketertinggalan pendidikan di Indonesia akibat praktik imperialisme. Imperialisme ini mempengaruhi pola pikir dan budaya yang tidak kondusif terhadap upaya pengembangan ilmu. Misalnya, kebebasan berpendapat yang sangat penting bagi kajian ilmiah dikekang selama ratusan tahun oleh imperialis; upaya pembodohan dan filosofis pemikiran lokal direduksi hanya sebagai mitos-mitos yang kehilangan nuansa keilmiahannya, seperti pemikiran Joyoboyo dan Ronggowarsito direduksi sebagai ramalan. Ramalan mengesankan sebagai pemikiran yang kebetulan atau sekadar mitos. *Kedua*, sistem politik kekuasaan otoriter yang juga membelenggu kebebasan akademik sampai era orde baru. Demi tujuan pelanggengan kekuasaan, penguasa membatasi pemikiran-pemikiran yang dianggap mengganggu stabilitas negara (baca: stabilitas kekuasaan); *Ketiga*, budaya akademik yang belum bangkit untuk berkembang, seperti belum banyaknya publikasi ilmiah, baik nasional maupun internasional; *Keempat*, penguasaan teknologi komunikasi dan bahasa Inggris oleh negara barat sebagai alat vital diseminasi kajian keilmuan. Ilmu Komunikasi berkembang di negara barat, kemudian karena mereka juga menguasai teknologi maka lebih memudahkan penyebarannya ke negara lain; Kelima, banyaknya sarjana Indonesia yang melanjutkan studi ke negara barat, seperti Australia, Amerika, Inggris atau Jerman sehingga membuat penggunaan perspektif negara barat semakin besar. Sebenarnya kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Penelitian Dissanayake (1988), misalnya, menemukan bahwa buku-buku komunikasi berperspektif Amerika yang digunakan sebagai referensi di Asia Selatan mencapai 78% dan 71% digunakan di ASEAN. Di Indonesia, menurut saya, meskipun sudah banyak buku yang ditulis sarjana komunikasi Indonesia, perspektif yang digunakan masih didominasi Barat; Keenam, orientasi pasar lebih condong perspektif Barat dan kurangnya kreativitas mengelola pesan yang berbasis

kearifan lokal terkait budaya populer. Misalnya, produk budaya populer di televisi kita belum banyak tampilan kelokalan; *Ketujuh*, sistem birokrasi yang tidak berpihak, khususnya penyediaan infrastruktur sistem. Misalnya, lebih mudah dan murah mengedit/dubbing iklan visual dari luar negeri daripada memproduksi di dalam negeri; Kedelapan, perasaan bangga produk lokal yang masih belum mewabah. Hal-hal berbau impor dari Barat dianggap lebih modern. Ditambah lagi perang budaya dan ideologi makin memarjinalkan kelokalan karena kuatnya terpaan budaya dan ideologi Barat, si penguasa media massa. *Kedelapan*, para akademisi belum banyak menggunakan karya anak bangsa sebagai sumber sitasinya, meski tidak sedikit karya anak bangsa memiliki kualitas ilmiah yang baik.

Saya beranggapan aplikasi teori komunikasi dalam praktik professional komunikasi tidak secara otomatis berlaku universal, dengan alasan:

(i) Setiap ilmu, termasuk teori di dalamnya, memiliki objek formal yang merupakan telaah khas dari masing-masing ilmu itu. Telaah khas mempunyai makna:
   (a) membedakan bahasa dengan bidang ilmu lainnya;
   (b) kebenaran telaah tersebut sangat dipengaruhi norma-norma dan ukuran masyarakat itu. Dengan demikian setiap filsafat ilmu akan memperlihatkan filsafat masyarakat tempat ilmu tersebut mengabdi. Teori yang sama akan berbeda aplikasinya dalam sistem masyarakat yang berbeda. Jadi, pemikiran filsafati pada sebuah ilmu dapat berbeda – meskipun ilmunya sama, tergantung filsafat negara tempat ilmu itu berkembang. Contoh: Teori Pers, mengenal pers liberal di negara barat, komunis (Cina), maupun pers bebas bertanggung jawab (Indonesia) (Kriyantono, 2012e).

KBM INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Melayani jasa cetak naskah

(ii) Teori merupakan representasi fenomena tetapi tidak dapat menjelaskan fenomena secara lengkap. Teori menjelaskan konteks ideologi, budaya atau karakteristik masyarakat tertentu dan mengabaikan yang lainnya.

Karena itu, perlu pengembangan perspektif lokal Indonesia untuk kajian komunikasi yang secara khusus dapat: (i) membahas dengan komprehensif dan *insight*; (ii) Fenomena public relations yang terjadi dalam konteks Indonesia perlu dikaji dalam perspektif lokal yang disesuaikan dengan nilai-nilai budaya sekitar; (iii) fenomena public relations di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks kelokalannya, seperti budaya, sistem sosial, politik, ekonomi, dan falsafah masyarakatnya; (iv) Karakteristik lokal ini bukan hanya menarik perhatian ilmuwan Indonesia, tapi juga ilmuwan barat, antara lain Clifford Geertz atau Ben Andersson. Tetapi, kajian komunikasi dalam perspektif kelokalan kita, saya rasa masih belum banyak. Kurangnya kajian dalam konteks Indonesia menyulitkan ilmuwan Barat mendapatkan literatur kajian dalam perspektif Indonesia (Hobart, 2006); (v) beberapa masalah muncul akibat tercerabutnya nilai-nilai lokal dalam kajian dan praktik komunikasi.

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Dari tulisan Radmila (2011) dapat dideskripsikan bahwa kearifan lokal (*local-wisdom* atau *local genius*) merupakan pemikiran-pemikiran atau ide-ide setempat (lokal) yang mengandung nilai-nilai bijaksana, kearifan, kebaikan, yang terinternalisasi secara turun-temurun (mentradisi). Nilai-nilai tersebut dipercaya mengandung kebenaran sehingga diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal ini yang biasa disebut nilai-nilai luhur (adiluhung) masyarakat yang berfungsi sebagai landasan filsafat perilaku yang baik menuju harmonisasi. Istilah kearifan lokal disebut *local genius,* karena berarti "kemampuan kebudayaan setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan" (Rosidi, 2011, h. 29).

Kearifan lokal ini tergali dari kesadaran komunal secara turun-temurun dalam proses interaksi yang kemudian terakumulasi dan terkristalisasi dalam berbagai ajaran moral (etika).

Meskipun masyarakat Asia memiliki ragam budaya termasuk kearifan lokalnya, secara umum mereka memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat Barat. Karenanya ada perbedaan pendekatan dalam mengkaji fenomena komunikasi. Perbedaan cara pandang terhadap komunikasi antara Barat dan Timur, menurut Johan Galtung (dikutip di Gunaratne, 2009) dan Lawrence Kincaid (dikutip di Littlejohn & Foss, 1999), mencakup pemahaman tentang diri (*self*), sifat khas (*nature*), ruang & waktu (space & time), pengetahuan, dan relasi personal. Perspektif Barat lebih menekankan pada individualisme, yaitu orang dipertimbangkan aktif dalam pencapaian tujuan-tujuan pribadi (elemen self); Menekankan pada upaya mengontrol lingkungan atau situasi alam (nature); Memberi perhatian pada pengukuran bagian-bagian dan tidak mengintegrasikannya ke dalam sebuah proses yang disatukan (space) Ada kepastian waktu atau batasan waktu jelas (bounded time); Bersifat atomisme/bagian yang terpisah-pisah dari kecil membentuk yang besar dan deduktif, dan didominasi oleh bahasa (pengetahuan); dan Hubungan atau relasi muncul diantara dua atau lebih individu (relasi personal). Perspektif Timur lebih menekankan pada tanggung jawab berbalasan antara individu dan masyarakat serta memandang hasil komunikasi sebagai sesuatu yang tidak direncanakan dan merupakan konsekuensi alami dari suatu peristiwa; Menekankan pada harmonisasi dengan lingkungan/situasi; Dunia dianggap sebagai sebuah unit tunggal, yang saling terkoneksi dan saling tergantung sebagai keseluruhan serta cenderung memfokuskan pada keseluruhan dan kesatuan; Waktu bersifat tidak terbatas (infinite time); Lambang-lambang verbal, khususnya ujaran, tidak cukup mendapat perhatian dan dipandang secara skeptis; dan Hubungan bersifat lebih rumit,

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

karena melibatkan posisi sosial tentang peran, status dan kekuasaan.

Tercerabutnya nilai lokal dalam kajian dan praktik komunikasi

Komunikasi tidak terjadi dalam ruang hampa, tapi, komunikasi mengonstruksi dan dikonstruksi oleh budaya. Jadi, kajian dan praktik komunikasi tentu tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya kita. Edward T. Hall (Gudykunst & Mody, 2002; Mulyana, 2001; Rogers, 1997) menyebut "*culture is communication, communication is culture*". Komunikasi, menurut Carey (2009), tidak dapat dipisahkan dengan aspek komunitas yang memiliki latar belakang khasnya masing-masing yang mewarnai proses komunikasi yang terjadi. Dissayanake (2003) menyebut budaya tanpa komunikasi tidak dapat bernapas, dan Fiske (2002) menyatakan bahwa komunikasi adalah inti berkembangnya budaya, tanpa komunikasi, budaya akan mati. Budaya, latar belakang personal, dan karakter sosio demografis inilah yang disebut Wood (2009) sebagai komunikasi bersifat sistemik. Di bagian ini, saya menyampaikan sebagian saja permasalahan yang muncul akibat kajian dan praktik komunikasi kita belum membumi dengan karakter kelokalan kita.

Pertama, dalam konsep *public information* maupun jurnalistik, terdapat prinsip *tell the truth*. Prinsip ini memang bersifat universal, yaitu prinsip moralitas untuk bersikap benar. Tetapi, aplikasi *tell the truth* ini akan berbeda antara konteks budaya Barat dan kita. Teori-teori versi Amerika atau Eropa, mengadopsi pemikiran Edward T. Hall (Gudykunst & Mody, 2002; Mulyana, 2001; Rogers, 1997), lebih bersifat budaya konteks rendah (*low context culture*) sehingga makna *tell the truth* akan berbeda dengan masyarakat Indonesia yang berbudaya konteks tinggi (*high context culture*). Budaya

konteks tinggi menghasilkan komunikasi konteks tinggi, seperti bermakna implisit, tidak terus terang, tidak langsung, banyak simbol nonverbal, dan multi interpretasi. Budaya konteks rendah membuat komunikasi bersifat konteks rendah, seperti lebih banyak pesan verbal, makna eksplisit, langsung, terus terang atau "*blak-blakan*". Jika seseorang berbudaya barat berkata "ya", berarti memang ya atau setuju. Masyarakat Jawa yang berbudaya konteks tinggi cenderung tidak seterbuka budaya barat dalam menyampaikan maksud hatinya. Misalnya, orang Jawa ditawari minum saat bertamu, mengatakan "*sampun, matur nuwun*", artinya sudah (minum), terima kasih, bisa diartikan "dia sebenarnya mau tapi malu disangka tidak sopan".

Kedua, dalam komunikasi politik, beberapa kali kita menemukan proses pengambilan keputusan dilakukan dengan cara voting (ada istilah *one man-one vote*). Kita sering temui, misalnya, dalam sidang DPR. Bahkan voting sering mewarnai sidang MPR dan Munas (Musyawarah nasional) atau Mubes (Musyawarah besar). Padahal huruf "M" berarti musyawarah. Jika dalam perspektif Barat dikenal teori dialogic public relations (Kent & Taylor, 2002), di perspektif lokal proses pengambilan keputusan pun dengan cara dialog, yaitu "*musyawarah mufakat*". Cara pengambilan keputusan ini terkadang memerlukan kesediaan berbagai pihak untuk mengorbankan kepentingannya demi kepentingan yang lebih besar. Ini yang disebut kearifan Jawa: "*wani ngalah, luhur wekasane"* (terkadang mengalah itu lebih baik, untuk kepentingan bersama). Organisasi pun mesti siap menghadapi resiko terburuk apapun jika akar permasalahan bisa terurai dengan baik. Masyarakat Makassar mengatakan "*teppettu maoompennge, teppolo massellomoe*" (Tak akan putus yang kendur, tak akan patah yang lentur). Artinya, berlaku bijaksanalah, dengan toleransi dan tenggang rasa, saat menghadapi permasalahan agar resolusi tercapai tanpa kekerasan atau kesewenangan.

KPM INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Negosiasi musyawarah mufakat adalah ciri khas leluhur kita. Buktinya adalah penggunaan kata "rembug" dalam kosakata Jawa berikut: "*yen ana rembug dirembug, nanging olehe ngrembug kanthi ati sing sareh*", yaitu menyelesaikan permasalahan melalui *rembugan*/musyawarah dengan kepala dingin, hati yang tenang, dan pikiran yang jernih; Budaya Minang mengajarkan "*elok dipakai jo mufakat, buruak dibuang jo rundiangan"* (yang baik dicapai dengan mufakat, yang buruk dibawa berunding) dan "*duduak surang basampik-sampik, duduak basamo balapang-lapang"* (duduk sendiri bersempit-sempit, duduk bersama berlapang-lapang). Prinsip komunikasi kearifan lokal ini juga ada saat pilpres di papua, yaitu sistem noken atau ikat.

Ketiga, dalam komunikasi kepemimpinan dan keorganisasian, nilai-nilai lokal mengajarkan kedekatan personal antara pimpinan dan bawahan yang dirajut oleh komunikasi dua arah timbal balik. Semangatnya adalah "manunggaling kawulo gusti", yaitu kebersamaan antara pimpinan dan bawahan yang berdasarkan ketergantungan satu dengan yang lain. Karena itu, komunikasi "*blusukan*", yaitu berkomunikasi *face to face* dengan mendatangi secara langsung publiknya. Ada kedekatan personal –tidak ada jarak fisik- sehingga bisa mendekatkan jarak psikologi, ada komunikasi "*sambung roso*" (sambung rasa, dari hati ke hati) yang menimbulkan ikatan emosi (empati) yang kuat.

KBM INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Dalam perspektif Barat, dikenal konsep *managing by walking around* (sama dengan komunikasi blusukan) dan walking in the shoes of the public (manunggaling kawulo gusti). Ada kesamaan antara konsep barat dan lokal ini, yaitu berfungsi sebagai sarana "getok tular" informasi secara langsung agar isu tidak meluas. Tetapi nilai lokal kita lebih mendahulukan aspek emosional untuk membangun hubungan. Komunikasi sambung rasa ini dapat dimaknai bahwa organisasi "*nguwongke*", yaitu menempatkan karyawan bukan dalam konteks hubungan kerja rasional yang berdasarkan untung-

rugi, tetapi, menempatkan karyawan sebagai mitra yang tidak terpisahkan dalam operasional organisasi. Budaya Jawa mengajarkan "*curiga manjing warangka, warangka manjing curiga*", pemimpin perlu memahami aspirasi bawahan, mengenal dengan baik kondisi bawahan, dan mau menyantuni mereka dengan baik.

Keempat, kandungan kelokalan dalam program-program televisi yang masih sedikit. Menuntut keberanian untuk promosi nilai-nilai lokal dibarengi kemampuan kreatif yang tinggi dapat menstimulasi penyebaran nilai lokal dengan lebih baik. Perlu "campur tangan" yang lebih aktif dari pemerintah, tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.

Kelima, praktik komunikasi politik kita yang masih jauh dari kesantunan timur. Selain budaya musyawarah mulai kendur, juga terdapat saling menyerang dengan komunikasi politik sarkasme, kampanye hitam, character assasination, dan penghinaan.

Tentunya, masih banyak lagi realitas yang dapat ditelusuri. Nah sekarang bagaimana tugas akademisi di kampus (Dosen dan Mahasiswa) terkait topik deskripsi di atas? Ada beberapa hal yang mesti dilakukan. Dalam proses pembelajaran, Dosen dan Mahasiswa jangan hanya mengintroduksi teori-teori dan konsep-konsep Barat dalam membahas fenomena, tetapi, juga mengintroduksi kearifan lokal. Proses ini dapat bersifat sinergi, dapat juga bersifat komparatif. Dosen juga mesti menanamkan kearifan lokal pada mahasiswa dalam perilaku sehari-hari di kampus. Diharapkan ada *role-model* bagi mahasiswa. Memperbanyak riset kajian komunikasi dalam perspektif lokal. Misalnya, di kajian public relations dikenal Teori Excellence yang memberikan standar efektivitas praktik public relations. Melalui riset, dapat diketahui apakah standar tersebut juga berlaku di Indonesia atau apakah terdapat standar yang bersifat lokalistik dan hanya terjadi dalam konteks praktik komunikasi di Indonesia.

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak haskan
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Memperbanyak publikasi artikel tentang kajian lokal pada komunikasi. Semakin lebih baik jika dimuat di publikasi internasional.

Buku ini juga menjadi pemupus kerinduan kita terhadap upaya memahami perilaku komunikasi dalam konteks sosial budaya anak bangsa sendiri. Buku ini mampu memperteguh kebanggaan kita sebagai salah satu bangsa yang besar di Asia. Indonesia, negara yang menjadi zamrud budaya dan bagian dari peradaban, memegang peran penting dalam pengembangan ilmu komunikasi. Apalagi jika kita melihat fakta sejarah. Asia menjadi salah satu pusat peradaban dunia dengan kemegahan imperium dan kespektakuler karya budayanya, dan tentu saja, komunikasi berperan sebagai perekat berbagai struktur di dalamnya. Tidak mungkin muncul peradaban, tanpa kemampuan komunikasi yang tersistem dengan baik (Dissayanake, 2003). Asia menjadi penyumbang perkembangan komunikasi melalui agama, seperti kitab-kitab suci dan teks-teks suci, yang menciptakan peradaban di era Konfusianisme, Hindu, Budha, Yudaisme, Taoisme, Christianity, dan Islam, yang menurut Simonson, Peck, Craig, dan Jackson (2013) dapat disebut "*proto-communication history*" (sejarah komunikasi yang pertama).

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah,
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Kehadiran buku ini, sangat berguna sebagai upaya introduksi adopsi kearifan lokal pada kajian komunikasi di Indonesia. Tulisan-tulisan di buku ini dapat memangkas keberjarakan yang selama ini terjadi antara perspektif Barat dan kelokalan kita. Berbagai tulisan di buku ini meniscayakan lentik jemari kelokalan kita dalam bertegur dengan perspektif Barat yang masih dominan dalam kajian komunikasi, sehingga menjadi tetirah yang sejenak memberi jeda untuk kita dari keriuhan kajian-kajian Barat dalam bidang komunikasi.

Referensi

Carey, J.W. (2009). *Communication as culture: Essay on media and society*. Revised edtion. New York: Routledge.

Dissayanake, W. (2003). Asian approaches to human communication: Restrospect and prospect, *Intercultural Communication Studies*, XII-4.

Fiske, J. (2002). *Introduction to communication studies*. New York: Routledge-Taylor & Francis e-Library.

Gudykunst, W.B., & Mody, B.B. (2002). *Introduction of intercultural communication*. Di Handbook of international & intercultural communication. Gudykunst, W.B., & Mody, B.B. (Ed.). California: Sage Publications.

Gunaratne, S.A. (2009). Asian communication theory. In *Encyclopedia communication theory*. Littlejohn, S.W., & Foss K.A. (Eds.). London: Sage

Hobart, M. (2006). Introduction. *Asian Journal of Communication, 16*(4).

Kriyantono, R. (2017). *Teori public relations perspektif barat dan lokal: Aplikasi penelitian dan praktik*. Jakarta: Prenada.

Kriyantono, R., & McKenna, B. (2017). Developing a Culturally-Relevant Public Relations Theory for Indonesia. *Malaysian Journal of Communication, 33*(1),1-16.

Littejohn, S. W., & Foss, K. A. (2009). *Teori Komunikasi: Theories of human communication*. Jakarta: Salemba Humanika.

Mulyana, D. (2010). *Pengantar ilmu komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Radmilla, S. (2011). *Kearifan lokal: Benteng kerukunan*. Jakarta: Gading Inti Prima.

Rosidi, A. (2011). *Kearifan lokal dalam perspektif budaya Sunda*. Bandung: Kiblat.

Rogers, E.M. (1997). *A history of communication study: A biographical approach*. New York: The Free Press.

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Simonson, P., Peck, J., Craig. R.T., Jackson Jr., P.J. (2013). The history of communication history. Dalam Simonson P., Peck, J., Craig, R.T., Jackson Jr. (Eds.). *The handbook of communication history*. New York: Routledge.

Wood, J. T. (2009). *Communication in our daily lives*. Boston: Wadsworth.

KBM INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

PENGANTAR PAKAR MEMBUMIKAN KEARIFAN LOKAL PADA TEORI DAN PRAKTIK KOMUNIKASI ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **xix**

Meng-Indonesia-Kan Ilmu Komunikasi Perspektif Jawa Timur **1**
Surokim

Identitas dan Keberanian Perempuan Surabaya di Ruang Politik **13**
Nur'annafi Farni Syam Maella

Kompetensi Komunikasi Politik Politisi Perempuan Jawa Timur **19**
Yudiana

Konstruksi Penyiaran Islami Dalam Liberalisasi Industri Media TV Lokal : Tantangan dan Peluang Mengembangkan Program TV-9 Jawa Timur **35**
Surokim

Dilema dan Titik Balik Media Luar Ruang pada Aras Lokal: Kasus Surabaya **61**
Rendy Pahrun Wadipalapa

KBM INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Siap bantu kalian, mencetak naskah

Komunikasi Digital dan Transformasi Sosial: Peluang dan Tantangan untuk Masyarakat Jawa Timur 87
Harliantara

Adaptasi Sistem Komunikasi Kesehatan (Studi Kasus di Gresik, Lamongan, dan Bojonegoro)..... 99
Tatag Handaka

Kebudayaan Lokal Reog Ponorogo (Studi Kasus Warok) 119
Abdullah dan Ahmad Fahrudin

Kontestasi Etnis Tionghoa Dalam Budaya Madura Yang Islami 133
Teguh Hidayatul Rachmad

Merawat Kearifan Lokal Madura Ditengah Tantangan Komunikasi Kekinian 155
Syamsul Arifin

Mitos Dan Tantangan Dalam Perkembangan Kontrasepsi KB Vasektomi di Madura 171
Bani Eka Dartiningsih

Transformasi Pelestarian Kesenian Bantengan di Era Digital Pendekatan Komunikasi Partisipatif dan Literasi Digital 181
Muhammad Fadeli

Epilog, Perspeketif Lokal Menjadi Yang Utama, Bukan Sekadar Pelengkap..... 195
Surokim As

DATA SINGKAT PARA PENULIS 203

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras memperbanyak atau menjual hasil layout ini tanpa seijin Penerbit



Meng-Indonesia-Kan Ilmu Komunikasi Perspektif Jawa Timur

Surokim

INDONESIA
Dilarang keras mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Ide dan tekad untuk membumikan ilmu komunikasi dengan meretas perspektif lokal khas Indonesia sudah digagas sejak 2000. Selama ini, perspektif ilmu pengetahuan itu didominasi oleh Barat (Eropa dan Amerika) karena keunggulan berbagai hal, mulai dari kemapanan sistem pendidikan, SDM, prasarana, literasi, referensi hingga publikasi. Dominasi itu akhirnya membawa implikasi kepada terciptanya hegemoni perspektif Barat atas

perspektif yang lain dan menjadikan perspektif di luar Barat seperti perspektif Timur sebagai sesuatu yang tidak ilmiah dan tidak valid, hanya sekadar menjadi pelengkap. Akibatnya, perspektif Barat hampir selalu menjadi rujukan dalam menyusun kerangka, landasan teori hingga perspektif dalam menjawab dan menyelesaikan apapun masalah yang timbul dalam konteks ilmu pengetahuan, tak terkecuali dalam kegiatan riset ilmiah. Masyarakat ilmiah seperti di Indonesia akhirnya menjadikan perspektif Barat yang notabenenya adalah produk di luar dirinya (berasal dari masyarakat lain) sebagai perspektif utama untuk menjawab dan menyelesaikan masalahnya serta menjadikan perspektif miliknya sekadar sebagai pelengkap.

Disinilah sebenarnya letak kesadaran dan kritik substantif itu bermula, minimal dalam rangka menggugat dan menyadarkan diri sendiri. Bagaimana bisa terjadi, diri kita sendiri lebih senang menggunakan perspektif orang lain sebagai perspektif utama dan menjadikan perspektif milik sendiri sebagai perspektif alternatif. Hal ini tentu menjadi tanda tanya besar. Memang menjadikan pengalaman dan perspektif orang lain sebagai *best practice* tentu bukan merupakan kesalahan dan juga bisa dipahami dalam konteks masyarakat terbuka yang bisa terhubung secara global. Namun, menjadikan pengalaman dirinya sebagai pelengkap dan sekadar menjadi pendamping perspektif alternatif maka justru disitu pangkal tolaknya. Jadi, secara substantif yang hendak kita gugat dan kita sadarkan adalah persoalan keyakinan dasar dalam berpengetahuan. Saatnya kini dan menjadi tugas kita pertama adalah meluruskan kembali keyakinan kita akan khittah pengembangan pengetahuan dengan membalikkan keyakinan dan *mindset* kita, yakni menjadikan perspektif kita sebagai yang utama dan yang lain sebagai pelengkap.

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Namun, upaya dan ikhtiar menjadikan perspektif lokal sebagai perspektif utama tentu bukan persoalan mudah seperti

membalikkan tangan. Banyak hal yang mesti didudukkan kembali dengan jernih serta dengan posisi yang tenang dan tidak emosional. Apalagi, ini juga bukan sekadar persoalan *ansich* pengetahuan, tetapi juga berkelindan dengan persoalan ekonomi, politik dan sosial budaya sedari awal. Ilmu pengetahuan sebagaimana dicatat dalam sejarah selalu tidak bisa dilepaskan dari relasi kuasa, dan dalam beberapa konteks ia kerap menjadi salah satu instrumen kekuasaan dengan menjadikannya sebagai bagian dari hegemoni dan penundukan.

Dorongan akan diakuinya perspektif lokal dalam masyarakat akademis Indonesia juga bukan persoalan mudah, mengingat ilmu pengetahuan juga dibangun dalam masa yang tidak pendek. Tentu bukan persoalan mudah menjadikan perspektif lokal sebagai perspektif utama dalam mendominasi hegemoni dan massif seperti itu. Namun, jika tidak segera disadari maka inferioritas kompleks lama-lama akan menjangkiti dunia pengetahuan Indonesia. Dengan demikian, mendesakkan perspektif lokal sebagai sebuah alternatif juga memperlihatkan akan eksistensi diri sebagai bangsa mandiri, sekaligus kita bisa menunjukkan bahwa perspektif itu bukan acuan utama dan sekadar menjadi pelengkap, tetapi sebagai pijakan kemandirian bangsa dan juga eksistensi bangsa atas perkembangan ilmu pengetahuan. Ia bisa menjadi elemen berdirinya sebuah negara dan eksistensi pendidikan serta pengetahuan itu sendiri.

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah hasil layout ini tanpa seijin penerbit

Jika melihat pengalaman berbagai negara di belahan Asia seperti Cina, Jepang, dan Korea, maka menjadikan perspektif lokal sebagai pijakan utama itu bukanlah utopia, tetapi sungguh riil dan masuk akal untuk menjadi bekal bangsa mandiri. Mereka bangsa Asia yang memiliki kemampuan dan berdiri teguh atas potensi dirinya dan menjadikan perspektif luar hanya sebagai pelengkap. Demikian juga Jepang yang memiliki etos dan nilai yang dikombinasikan dengan perspektif Barat menjadikan konsep khas

dan penguat atas praktik praktik ilmu pengetahuan. Namun, dari semua itu yang paling terlihat adalah semangat menuju kemandirian dan keyakinan diri sebagai sebuah bangsa untuk mengarahkan pengetahuan yang dimiliki sebagai alat untuk berdikari. Pada saat ini, beberapa negara itu sudah mendapat pengakuan dan perkembangan mutakhir hingga masyarakat barat pun mengakui akan hal itu sehingga terjadi elaborasi, komplementasi, dan kerjasama dalam kesetaraan dan bukan hegemoni.

Logika itu sebenarnya sederhana dan bisa dimulai dari pemahaman dasar akan keyakinan melalui cara kita sendiri. Bagaimana agar perspektif lokal bisa menjadi perspektif utama dan perspektif lain sebagai pelengkap alternatif. Tentu ada beragam prasyarat yang mesti harus dipenuhi mulai dari hal yang teknis hingga substantif. Pekerjaan itu bukan pekerjaan mudah dan butuh upaya yang sunguh-sungguh serta konsistensi dan ketahanan yang tinggi secara berkesinambungan.

Kesadaran ini penting agar bisa mengubah *mindset* kita tidak sekadar sebagai pengguna, tetapi juga menjadi kreator. Sudah saatnya kita memulai ikhtiar itu agar bisa turut mewarnai diskursus pengetahuan dan menentukan perkembangan ilmu pengetahuan dunia saat ini hingga ke masa depan. Kita harus memiliki keyakinan dan harapan tinggi bahwa kita adalah bangsa yang besar serta mampu menjadi subyek, tidak sekadar menjadi obyek dalam dinamika perkembangan ilmu pengetahuan..

Kita seharusnya berkepentingan terhadap upaya ini agar langkah menjadikan muatan lokal sebagai perspektif utama bisa dimulai, pelan tapi pasti kita bisa melakukan kritik dan tantangan baru atas konsep komunikasi yang eurosentris atau Amerika-sentris. Jika kita mau jujur, mereka (masyarakat barat) juga membangun dunia pengetahuan yang pertama adalah berbasis kepada keyakinan dan

kemandirian. Baru kemudian mereka melakukan penaklukan ke masyarakat dan memaksakan perspektif mereka di daerah jajahan. Jadi sedari awal mereka sudah memiliki jiwa superior atas distribusi pengetahuan. Hal itu yang kemudian menjadikan identitas mereka semakin kuat dan lama lama menjadi kuasa hegemoni.

Hegemoni Amerika dan Eropa tentu tidak bisa dilawan hanya dengan mengumpat dan berteriak, tetapi dengan serius melakukan berbagai upaya terpadu seraya menyiapkan berbagai perangkat baik *hardware* maupun *software* guna mengejar ketertinggalan atas perkembangan ilmu pengetahuan Barat yang pesat. Jika kesadaran itu telah kita miliki maka upaya untuk untuk menemukan identitas ke-Indonesia-an dalam perspektif komunikasi segera kita upayakan tindaklanjuti. Jika menilik potensi geopolitik dan juga SDM Indonesia maka mengarahkan Indonesia sebagai salah satu sentral dalam pengembangan ilmu komunikasi di Asia khususnya di Asia Tenggara bukanlah sekadar utopia dan mengada-ada. Kita sejatinya memiliki bekal sejarah yang kuat serta SDM yang tidak kalah hebat dengan masyarakat Eropa dan Amerika.

www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah

Jika menilik kejayaan kita di masa lampau yang telah digoreskan dalam sejarah kerajaan besar di Nusantara seperti Singasari dan Majapahit yang bisa menguasai Asia Selatan maka sepatutnya kita harus introspeksi lebih dalam lagi. Kita semua semestinya harus menyadari bahwa kita memang bangsa yang besar dan memiliki pijakan yang kuat untuk menjadi bangsa superpower, termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan. Harapan lebih jauh tentu di kemudian hari kita dapat menciptakan masyarakat komunikasi Indonesia yang memiliki identitas berbasis lokalitas yang kuat di tengah berbagai gempuran dinamika global. Kita juga dapat menjadikan komunikasi sebagai solusi dan dan simbol eksistensi identitas kita di tengah pergumulan ilmu pengetahuan internasional.

Wacana pribumisasi (*indigenisasi)* ilmu komunikasi jika dicermati sesungguhnya belum telat dan ketinggalan. Bangunan kesadaran ini merupakan salah satu respons ahli komunikasi lokal agar ilmu komunikasi memperhatikan kondisi sosial dan kultural lokal sebagai konteks yang mesti dan harus diperhatikan dalam mengembangkan kajian ilmu komunikasi. Kondisi ketergantungan terhadap studi-studi barat tentu akan semakin menjauhkan ikhtiar kita dalam adaptasi ilmu untuk menjawab problematika masyarakat. Adaptasi melalui pengalaman di tingkat lokal justru akan semakin mengayakan perspektif dan menjadikan ilmu komunikasi semakin kaya dan beragam. Sekaligus yang penting adalah melakukan koreksi atas keberlakuan teori dan konsep barat yang selama ini kita jadikan rujukan utama.

Di level local kita memiliki banyak sekali sumber rujukan khas seperti islam dan kearifan lokal. Islam sebagai kekuatan tentu tidak bisa kita lupakan dalam pengembangan kajian komunikasi Indonesia yang mayoritas. Ia tidak bisa dipisahkan dari konteks masyarakat timur yang religius, *high context culture*, dan guyub gotong-royong dalam kelompok, grup, dan komunitas. Selain itu berbagai budaya, agama, keyakinan juga memberi nuansa khas dialektika pengetahuan di Indonesia. Dialektika beragam ilmu itu juga patut dijadikan titik pijak di dalam mengembangkan konsep lokal. Bagaimana ilmu komunikasi menjawab kebutuhan lokal dan bertransformasi yang memberi petunjuk kemana ilmu itu akan dikembangkan.

www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Cita cita luhur kita adalah mampu memiliki konsep khas tentang komunikasi yang sesuai dengan konteks Indonesia dan mengarahkan Indonesia sebagai sentral dalam pengembangan ilmu komunikasi di Asia khususnya di Asia Tenggara sehingga di kemudian harinya dapat menciptakan masyarakat komunikasi Indonesia yang memiliki identitas berbasis lokalitas di tengah dinamika global dan menjadikan komunikasi sebagai solusi.

Pribumisasi *(indigenisasi*) ilmu komunikasi merujuk pada logika berpikir Kleden (1987) dalam Alois A Nugroho (2001) pada dasarnya adalah menyesuaikan asumsi dasar teori ilmu komunikasi dengan sistem nilai lokal atau nasional serta merekonstruksikan isi teori tersebut atas dasar sistem kognitif lokal atau nasional. Ada upaya adaptasi dan kontekstualisasi di dalam proses ini. Proses adaptasi itu adalah upaya sistematis dan terpadu menyinkronkan berbagai konsep dan juga mengkombinasikan dengan kenyataan di tingkat lokal sehingga benar benar khas sesuai kebutuhan dan kondisi riil dimana ilmu itu tengah dikembangkan.

Dengan upaya ini ilmu pengetahuan juga akan dekat dengan masyarakat dimana ilmu pengetahuan itu dikembangkan. Selain itu, ilmu pengetahuan akan menjadi solusi praktis atas berbagai problematika yang timbul di tingkat lokal sehingga keberadaanya menjadi penting dan diakui oleh masyarakat setempat. Kedekatan dan kesesuaian ini juga menjadikan proses adaptasi dan elaborasi ilmu pengetahuan, khususnya yang berasal dari luar dapat dilakukan dengan pertimbangan kontekstual yang mapan dan cermat.

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah

Harus diakui dan juga disadari jika selama ini universalitas pengetahuan selalu mengandung kelemahan mengingat tidak semua konteks masyarakat itu sama persis, baik dalam budaya maupun lingkungan sosial yang lain. Bahkan kini teori-teori yang berasal dari masyarakat barat yang mengklaim diri sebagai universal pun mulai dikoreksi dan memasukkan unsur lokal dimana ilmu itu akan diterapkan. Kearifan dan muatan lokal mulai dipertimbangkan dan diadopsi dan selanjutnya dielaborasikan dan digabung menjadi konsep baru yang lebih aplikabel dan adaptif sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Jadi ada penghormatan atas sistem nilai lokal dan sistem kognitif lokal yang telah lama berlaku dan telah lama dikembangkan masyarakat setempat. Justru

kombinasi ini akan semakin menghasilkan kemampuan daya adaptasi yang tinggi akan teori dan konsep itu sendiri.

Selama ini secara umum, kajian komunikasi masyarakat barat hamper selalu menekankan pada aspek individualistik, sementara masyarakat timur berbasis kelompok, paguyuban, dan kebersamaan. Dalam masyarakat timur menurut Nugroho (2001) konsep komunikasi efektif tidak sekadar deliver pesan, tetapi juga soal kebersamaan yang selama ini tidak diperhatikan pada masyarakat barat. Nugroho (2001) menambahkan bahwa sesuatu "tidak komunikatif" karena tidak membaur dalam kehangatan kebersamaan, tidak menjaga harmoni. Komunikasi bagi khalayak ini bukanlah masalah akurasi informasi yang ditransmisikan, melainkan masalah keterbagian dalam kebersamaan, masalah ketepatan dalam melaksanakan ritus kolektivisme itu. (Alois Nugroho, 2001). Dengan demikian ukuran efektivitas komunikasi adalah kebersamaan dan kehangatan, bukan pertama-tama interpretasi yang benar di pihak penerima, bukan pertama-tama umpan balik yang diharapkan. Ada hal yang berbeda antara masyarakat barat dan Indonesia, khususnya jawa.

KBM INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah

Dalam masyarakat Jawa, sebagai contoh tidak mengenal berterus terang, tetapi lebih banyak diam dan menyimpan perasaannya atas sesuatu jadi tidak reaktif. Bahkan semakin tinggi kedudukan seseorang, maka hal yang tak terang seperti komunikasi nonverbal pasemon sudah menjadi bahasa tersendiri melebihi makna dari kata kata. Bahkan ada kecenderungan bahasa yang tak terkatakan seperti bahasa non verbal semakin memiliki kedudukan tinggi dalam praktik komunikasi tradisional Jawa.

Dalam aplikasinya pada tataran penyelia, komunikasi masih menggunakan kata-kata, tetapi tidak langsung pada masalah, melainkan berputar-putar. Sementara pada tataran menengah, sudah tak diperlukan kata-kata, melainkan gerak-gerik mulut yang

tak bersuara namun bermakna. Adapun pada tataran tinggi komunikasi menjadi semakin halus dan mengambil rupa *sasmita*, isyarat, utamanya melalui perubahan raut muka, gerak-gerik mata, hidung, lidah, telinga, bibir, tarikan napas, tanpa banyak mengeluarkan suara. Maka sesungguhnya tantangan bagi ilmu komunikasi Indonesia bukanlah pada kemampuan menganalisis apa yang dipancarkan, melainkan kemampuan menganalisis hal-hal yang tidak dipancarkan.

Mengingat besarnya konsep yang bisa digali dalam masyarakat Indonesia itu, maka tidaklah mengherankan jika hasil penelitian nanti akan menunjukkan variasi dari daerah ke daerah, dari suku ke suku, dari segmen masyarakat yang satu ke segmen masyarakat yang lain. Termasuk kajian teman teman Aspikom Jatim yang terekam dalam buku kali ini. Nilai nilai seperti gotong royong, silih asih, asah, asuh, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, welas asih, rahayu sagung dumadi adalah sebagian nilai yang lahir dari dinamika lokal masyarakat Indonesia. Semangat guyub gotong royong sebagai masyarakat paguyuban membuat masyarakat senantiasa hidup dalam tenggang rasa yang tinggi dengan sesama serta menekankan proses kebersamaan. Konteks itu yang agak berbeda dengan masyarakat Barat yang individualistik dan lebih mementingkan hasil.

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Sejumlah pakar komunikasi juga mulai mencari paradigma yang serasi dengan dengan keadaan yang ada di masyarakat yang mengeksplorasi lebih dalam variabel manusia, sosio politik, budaya, pandangan dan keyakinan nilai sosial budaya, baik eksplisit maupun implisit yang selama ini hanya menjadi variabel penyela dalam tradisi riset barat (Hamidjoyo, 2000:4). Perilaku manusia dan perubahan sosial yang menjadi fokus dan inti dari kajian komunikasi senantiasa dinamis, dengan demikian nilai budaya menjadi penting untuk diperhatikan

Di level makro, sistem pendidikan yang mengacu kepada pasar juga tidak sedikit perannya dalam menggerus potensi lokal. Politik pendidikan juga tidak bisa dilepaskan dari liberalisasi pasar yang membawa dampak kepada peningkatan kebutuhan tenaga praktis. Pendidikan akhirnya hanya mengikuti pola barat dan memenuhi kebutuhan pasar atau respon kritis terhadap sistem pasar. Konglomerasi, ekspansi ekonomi dan globalisasi ekonomi ini jelas memperlemah identitas nasional kita. Hal ini sejalan dengan tren global dalam arus neoliberalisme. Bagaimanapun semua tidak bisa dilepaskan dari kepentingan industri dan pendidikan komunikasi sulit untuk objektif berdiri diatas kepentingan publik yang objektif.

Pengetahuan dengan demikian sebenarnya adalah proses yang tiada endingnya *(never ending process)*, ia bertumbuh mengikuti dinamika sosial, politik, dan budaya serta pengaruh baik didalam maupun diluar. Ia akan terus berubah dan proses konstruksi sosial yang dihasilkan melalui interaksi kuasa antara berbagai kepentingan. Sesungguhnya pada muara akhir, bentuk atau lanskap pendidikan yang menjadi basis perkembangan ilmu pengetahuan akan mencerminkan siapa yang sedang berkuasa dan siapa yang paling kuat mempengaruhi. Guna memperkuat identitas ke-Indonesia-an, maka ke depan pendidikan komunikasi harus bisa menjadikan civitas academica menjadi kritis dan mengabdi kepada masyarakat dan kebaikan bersama serta tidak sekadar memenuhi kebutuhan industri media dan menjadi anak baik dari kapitalisme.

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Jika melihat dari berbagai tulisan yang disajikan para pemerhati dan akademisi ilmu komunikasi Jawa Timur ini maka kita bisa mendapatkan banyak perspektif yang menunjukkan kekayaan akan perspektif lokal Jawa Timur. Sudah saatnya jika ditindaklanjuti dengan upaya yang sungguh-sungguh dalam menyusun aksi lanjutan. Sebagai agenda bersama mari kita bergandengan tangan untuk memperteguh tekad kita membumikan ilmu komunikasi

dengan berbasis budaya lokal dengan beberapa agenda strategis sebagai berikut : 1) membangun diskursus alternatif diluar ilmu komunikasi mainstream barat 2) menyuguhkan potret lokal kearifan timur 3) berdasar pengalaman menurut sudut pandang sendiri 4) Ilmu komunikasi sebagai penggerak perubahan sosial 5) sebagai produsen bukan konsumen 6) mengurangi kuasa negara dan pemodal, dan 7) memperbanyak kajian kontekstual keindonesiaan. Semoga kita bisa istiqomah membangun peradaban baru dalam kajian komunikasi ke Indonesia an melalui eksplorasi di Jawa Timur, seberapapun itu bentuk sumbangsihnya. Mari kita mulai dari sekarang.

Referensi

Alois A. Nugroho (2011), *Indigenisasi Ilmu Komunikasi di Indonesia Menjadi Ilmu Komunikasi Indonesia*, Makalah dalam Konferensi Nasional Ilmu Komunikasi yang bertajuk "Membumikan Ilmu Komunikasi Indonesia" yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Komunikasi Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia di Depok, 9 November 2011

Hamijoyo, Santoso S (2000), *Landasan Ilmiah Komunikasi: Sebuah Pengantar*, Jurnal Mediator, Vol 1 No. 1 Tahun 2000

KBM INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

KBM INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit



Identitas dan Keberanian Perempuan Surabaya di Ruang Politik

Nur'annafi Farni Syam Maella

INDONESIA
Dilarang menyebarluaskan naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Pendahuluan

Kota Surabaya merupakan simpul penting kebudayaan Jawa Timur yang berwatak egaliter, terbuka, dan plural. Sebagai kota pelabuhan dan perdagangan sejak masa kolonial, Surabaya dihuni oleh beragam etnis Jawa, Madura, Tionghoa, Arab, dan pendatang dari berbagai daerah Nusantara yang membentuk mosaik sosial dinamis (Setiawan, 2018). Dalam

konteks komunikasi, keragaman ini melahirkan budaya tutur yang khas: blak-blakan, tegas, dan langsung, namun tetap menjunjung etika sosial. Gaya komunikasi seperti ini menjadikan masyarakat Surabaya relatif egaliter; tidak ada jarak sosial yang kaku antara pejabat dan warga. Spontanitas dan keterbukaan justru dianggap sebagai bentuk kejujuran (Susilo, 2020). Karakter egaliter inilah yang turut membentuk gaya komunikasi politik para legislator perempuan Surabaya, sebagaimana tergambar dalam penelitian *"Karakteristik Identitas Legislator Perempuan Kota Surabaya."* Penelitian tersebut menunjukkan bahwa identitas politik perempuan tidak tunggal, melainkan hasil dialektika antara nilai budaya lokal, struktur sosial, dan sistem politik formal yang cenderung maskulin. Dalam ruang seperti ini, para politisi perempuan Surabaya mempraktikkan gaya komunikasi yang beragam namun berpijak pada akar budaya Jawa Timur.

Komunikasi Lokal Jawa Timur: Nilai dan Karakter

Komunikasi masyarakat Jawa Timur, khususnya Surabaya, berbeda dengan gaya komunikasi masyarakat Jawa Tengah atau Yogyakarta yang lebih halus dan berlapis. Di Surabaya, komunikasi cenderung langsung, terbuka, dan egaliter(Haryanto, 2019). Tidak ada kecanggungan untuk berdebat, mengkritik, atau menyampaikan gagasan di ruang publik. Ungkapan "*arek Suroboyo gak iso didelek*" (orang Surabaya tidak bisa dipaksa diam) menjadi simbol keberanian berbicara dan menolak ketidakadilan. Nilai-nilai seperti *wani ngomong* (berani bicara), *terang* (jujur dan jelas), serta *guyub* (solidaritas) merupakan fondasi komunikasi lokal yang kuat (Wulandari, 2021). Dalam politik, karakter ini menjelma menjadi strategi komunikasi yang efektif. Perempuan Surabaya tidak hanya berbicara sebagai representasi partai, tetapi juga sebagai individu yang berani, percaya diri, dan berkomitmen pada aspirasi konstituennya. Budaya egaliter membuat posisi perempuan dalam

KBM INDONESIA www.penerbitbukumurah.com Dilarang keras memfotocopy naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

komunikasi politik tidak lagi subordinat, tetapi sejajar dengan laki-laki.

Tipologi Identitas dan Komunikasi Politik Perempuan Surabaya

Penelitian mengenai komunikasi politik legislator perempuan DPRD Surabaya mengidentifikasi lima tipologi politisi perempuan: **klasik, tradisional, modern, postmodern, dan neo-modern.** Setiap tipologi menunjukkan bentuk adaptasi terhadap ruang politik dan nilai lokal yang berbeda, mencerminkan keberagaman strategi komunikasi yang digunakan oleh perempuan dalam menghadapi sistem politik yang masih maskulin (Astuti, 2022).

1. Politisi Klasik

Menonjolkan citra elegan dan kehati-hatian dalam berbicara. Dengan menjaga tutur kata dan simbol sosial, tipe ini menegaskan nilai *ajining diri saka lathi* (harga diri seseorang terletak pada ucapannya). Mereka menghadirkan komunikasi yang halus namun lugas, khas perempuan Surabaya yang menggabungkan keanggunan dan ketegasan.

www.penerbitbukumurah.com
Dilarang Keras, mencetak naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

2. Politisi Tradisional

Berakar kuat pada spiritualitas dan nilai budaya Jawa. Mereka mengaitkan keputusan politik dengan doa, restu tokoh, dan refleksi moral. Komunikasi dilakukan dengan tenang dan penuh pertimbangan, mencerminkan kearifan lokal yang mengedepankan keseimbangan batin.

3. Politisi Modern

Tipe ini menonjolkan profesionalitas dan loyalitas terhadap partai. Mereka menggunakan komunikasi rasional, diplomatis, dan berorientasi hasil. Dalam konteks Surabaya, tipe modern

menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap sistem birokrasi tanpa kehilangan sentuhan kesantunan lokal.

4. Politisi Postmodern

Mewakili generasi yang aktif berinteraksi melalui media sosial dan forum publik. Komunikasi mereka bersifat partisipatif, responsif, dan berbasis data. Gaya ini menggambarkan bagaimana nilai *guyub* dan *terbuka* direproduksi dalam ruang digital politik lokal (Rahmawati, 2020).

5. Politisi Neo-Modern

Inilah representasi paling kuat dari *arek Suroboyo* sejati: berani, tegas, dan percaya diri. Mereka tidak segan melakukan interupsi dalam sidang, mengkritik keputusan partai, atau membela kepentingan publik. Komunikasi politisi neo-modern bersifat konstruktif, dialogis, dan menegaskan prinsip kesetaraan gender (Rokhmansyah, 2019).

Egalitarianisme dan Keberanian Komunikasi Politik

www.penerbitkbm.com
Dilarang keras mencetak naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Keberanian perempuan Surabaya di ruang politik adalah wujud konkret dari budaya egaliter yang telah lama hidup dalam masyarakatnya. Nilai keberanian (*wani*) tidak hanya bermakna fisik, tetapi juga moral: berani berkata benar dan menentang ketidakadilan. Dalam konteks ini, perempuan politisi mempraktikkan komunikasi yang setara, baik di dalam forum legislatif maupun di tengah masyarakat.

Budaya egaliter juga mendorong munculnya bentuk komunikasi politik yang partisipatif. Legislator perempuan tidak menempatkan diri sebagai tokoh hierarkis, tetapi sebagai bagian dari komunitas yang sama. Pertemuan warga, dialog terbuka, serta aktivitas sosial menjadi sarana membangun komunikasi dua arah antara rakyat dan wakilnya. Ini adalah bentuk komunikasi politik yang

"membumi," karena berangkat dari realitas sosial masyarakat lokal (Nasrullah, 2021).

Membumikan Komunikasi Lokal dalam Demokrasi

"Membumikan komunikasi lokal" berarti menjadikan nilai-nilai budaya sebagai dasar dalam berpolitik dan berkomunikasi publik. Dalam konteks Jawa Timur, hal ini mencakup keberanian (*wani*), kejujuran (*terang*), solidaritas (*guyub*), dan kesetaraan (*rek*). Ketika nilai-nilai ini diinternalisasi oleh aktor politik, maka demokrasi lokal tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif. Politisi perempuan Surabaya telah membuktikan bahwa komunikasi lokal dapat bersinergi dengan modernitas. Keberanian berbicara, kemampuan mendengar aspirasi rakyat, dan keterbukaan terhadap kritik adalah bentuk konkret dari komunikasi demokratis. Dengan memadukan kearifan lokal dan kemampuan digital, mereka menjadi model baru bagi komunikasi politik berbasis budaya (Sulistyo & Fauzi, 2022).

KSM INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Penutup

Komunikasi lokal Jawa Timur khususnya gaya egaliter Surabaya merupakan cerminan budaya yang menegaskan identitas kolektif masyarakatnya: berani, terbuka, dan jujur. Melalui gaya komunikasi yang khas ini, perempuan Surabaya telah memaknai ulang peran mereka dalam politik, dari sekadar representasi menjadi agen perubahan sosial.

Keberanian untuk berbicara, sikap setara dalam berdialog, dan kemampuan menjaga integritas komunikasi menjadi ciri utama politisi perempuan Surabaya. Mereka tidak hanya menyesuaikan diri dengan sistem politik, tetapi juga menanamkan nilai-nilai lokal sebagai dasar etika dan strategi komunikasi. Dengan demikian,

komunikasi lokal bukan sekadar tradisi, melainkan fondasi demokrasi yang membumi dan manusiawi.

Referensi

Astuti, R. (2022). *Identitas dan Strategi Komunikasi Politik Legislator Perempuan di Jawa Timur*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.

Haryanto, T. (2019). *Budaya Komunikasi Arek Surabaya: Kajian Sosio-Pragmatik*. Jurnal Komunikasi Nusantara, 1(2), 101–115.

Nasrullah, R. (2021). *Komunikasi Politik Digital di Indonesia: Relasi, Representasi, dan Partisipasi Publik*. Jakarta: Prenada Media Group.

Rahmawati, N. (2020). *Perempuan dan Ruang Digital Politik Lokal: Studi Kasus DPRD Surabaya*. Jurnal Perempuan & Politik, 5(1), 55–72.

Rachmansyah, A. (2019). *Gender dan Kekuasaan: Analisis Perempuan dalam Politik Lokal Jawa Timur*. Malang: UB Press.

Setiawan, I. (2018). *Egalitarianisme dan Pluralisme dalam Budaya Arek Surabaya*. Jurnal Antropologi Indonesia, 39(3), 211–226.

Sulistyo, B., & Fauzi, M. (2022). *Demokrasi Lokal dan Komunikasi Partisipatif di Jawa Timur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Susilo, D. (2020). *Gaya Komunikasi Masyarakat Surabaya: Antara Keberanian dan Keterbukaan*. Jurnal Komunikasi Indonesia, 9(1), 33–48.

Wulandari, R. (2021). *Nilai-Nilai Lokal dalam Praktik Komunikasi Politik Jawa Timur*. Surabaya: Balai Bahasa Press.

KBM INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak ulang
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit



Kompetensi Komunikasi Politik Politisi Perempuan Jawa Timur

Yudiana

INDONESIA
Dilarang keras menggandakan, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Ide dan tekad untuk membumikan ilmu komunikasi dengan meretas perspektif lokal khas Indonesia sudah digagas sejak 200. Kompetensi komunikasi pada dasarnya merupakan kemampuan seseorang yang meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap dalam melakukan sesuatu kegiatan atau pekerjaan tertentu sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan. Kaye menjelaskan bahwa individu dikatakan kompeten jika dia mampu

memahami diri sendiri dengan baik dan mengembangkan kendali diri, mampu mengkonstruksi, mengatur dan menjelaskan makna melalui interaksinya dengan orang lain. Selain itu dia juga mampu menampilkan kemampuan untuk mengubah sistem sosial secara keseluruhan. Dengan demikian kompetensi menjadi titik tolak pemahaman sejauh mana keterampilan komunikasi yang mereka pandang menentukan keberhasilan yang juga menurut ukuran mereka sendiri. Ukuran keberhasilan bagi politisi perempuan yang juga pada kasus ini memiliki jabatan sebagai kepala/wakil kepala daerah adalah ketika mereka berhasil berkomunikasi dengan konstituen dan warganya dengan baik. Selain itu juga para politisi perempuan memiliki percaya diri untuk berbicara baik di depan konstituen atau warganya, di lingkungan partai politik pengusungnya maupun di kalangan partai politik yang lain (di luar partai politik pengusungnya).

Politisi perempuan dikatakan berhasil jika dengan percaya diri membuka akses sebesar-besarnya terhadap saluran-saluran komunikasi politik yang ada termasuk media massa. Berupa sering tampil di media massa, melalui berbagai kreativitas kegiatan, aktif mengeluarkan opini dan analisis serta kritikannya terhadap berbagai persoalan yang ada, lewat media massa, baik media cetak,radio dan televisi. Ataupun sering menjadi pembicara atau narasumber, penceramah dan lain sebagainya. Ditegaskan oleh Surokim Kalau politisi perempuan ingin mendapat tempat maka konsolidasi kelas menengah itu salah satu jalannya perempuan harus didorong untuk berani mengambil peran kelas menengah progresif seperti menjadi aktivis LSM, wartawan, pengusaha sehingga akses itu terbuka dan diperhitungkan.bisa dilihat berapa perempuan yang bisa mandiri secara ekonomi yang memegang karier potensial sebagai kontrol atas elit. Berapa banyak perempuan tertarik menjadi aktivis LSM, wartawan, pegiat publik, dst yang memungkinkan perempuan menjadi jujukan media atau nara

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

sumber media sebagai kontrol atas dominasi laki dan elit. Jika pun ada jumlahnya minim sehingga peran itu tidak menjadi signifikan. Selanjutnya berdasarkan konsep kompetensi di atas maka politisi perempuan dikatakan berhasil jika memiliki wawasan yang baik yang mampu menciptakan, menjaga, dan meningkatkan eksistensinya dalam membangun akses politik.

Dimensi-Dimensi Kompetensi Komunikasi Politik

Berdasarkan data penelitian yang telah diuraikan di atas maka peneliti mendapatkan beberapa dimensi dalam kompetensi komunikasi politik. Berikut peneliti akan menguraikan dimensi kompetensi komunikasi politik yaitu:

1. Kepercayaan Diri

Sebagai perempuan tentu tidak mudah memasuki dunia politik yang pada dasarnya diciptakan oleh laki-laki.Diperlukan kepercayaan diri pada perempuan ketika memutuskan untuk memasuki dunia politik dan menjadi seorang politisi. Pada penelitian ini telah didapatkan bahwa ketika politisi perempuan memiliki kepercayaan diri yang tinggi maka mudah bagi politisi perempuan menghadapi persoalan-persoalan yang dikaitkan dengan politik. Apalagi sebagai pemimpin daerah yang merupakan jabatan politik maka sebagian besar persoalan yang dihadapi adalah persoalan politik.Terbukti politisi perempuan yang memiliki kepercayaan diri yang baik mampu berperan secara maksimal sebagai kepala daerah.Hal ini terlihat pada walikota Surabaya dan wakil Bupati Jombang serta Wakil Bupati Ponorogo.Sebaliknya politisi perempuan yang kurang memiliki kepercayaan diri maka dapat dikatakan politisi perempuan tersebut memiliki kompetensi komunikasi politik yang rendah.Meskipun para politisi perempuan tersebut sebagai pemimpin yang seharusnya menjadi modal bagi para politisi untuk memudahkan

www.penerbithukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

mereka menunjukkan eksistensi sebagai politisi yang handal. Selain itu juga sebagai seorang perempuan yang terpilih menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah seharusnya menjadi modal guna menumbuhkan kepercayaan dirinya sebagai politisi yang siap memasuki panggung politik yang keras dan sarat dengan simbol-simbol patriarki.

Faktanya para politisi perempuan kurang percaya diri dalam berkomunikasi di panggung politik baik secara formal maupun non formal maka politisi perempuan memberikan banyak ruang bagi politisi laki-laki untuk tampil dan menunjukkan eksistensi dirinya. Di samping itu politisi perempuan tampak dengan sengaja melakukan pembiaran panggung politik tersebut dikuasai politisi laki-laki yaitu dengan tidak berusaha memberikan perhatian pada masalah-masalah yang memang selama ini menjadi domain politisi laki-laki.Sebagaimana yang sudah terjadi selama ini di mana permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi bisnis, pertahanan militer, hukum dan ketatanegaraan selalu menjadi domain politisi laki-laki. Kurangnya kompetensi komunikasi politisi perempuan bisa dilihat dari sisi ini, di mana politisi perempuan tidak pernah berusaha untuk memasuki permasalahan-permasalahan tersebut.

www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Fenomena tersebut sejalan dengan asumsi teori Interaksi simbolik yang menyatakan bahwa setiap individu akan mengerti berbagai hal dengan belajar dari pengalaman yang didapatnya. Bisa dipahami jika kemudian politisi perempuan ketika memasuki dunia politik yang merupakan dunia laki-laki kemudian memilih *concern* pada isu-isu atau permasalahan yang tidak jauh dari dunia perempuan, seperti pendidikan, kesehatan, keluarga, dan anak. Mengingat bidang-bidang tersebut sejalan dengan *frame of experience* sebagai seorang perempuan. Hal inilah yang menjadi dasar bagi perempuan untuk menunjukkan kualitasnya dan eksistensinya untuk bisa diterima di dunia politik.

2. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan dimensi yang kedua dari kompetensi komunikasi politik. Dalam penelitian ini telah dijelaskan bahwa politisi perempuan yang memiliki pengetahuan yang baik dalam arti memiliki bekal yang cukup tentang dunia politik maka akan memiliki kompetensi komunikasi politik yang baik. Pengetahuan tentang politik tersebut bisa didapatkan dari pengalaman para politisi perempuan ketika mulai masuk ke dalam dunia politik. Para informan yang telah "berkarir" di partai politik atau organisasi-organisasi kemasyarakatan yang menjadi afiliasi dari sebuah partai politik maka ketika menjadi politisi bahkan ketika menduduki jabatan sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang merupakan jabatan politik terlihat lebih mudah dalam melakukan komunikasi politik baik dengan konstituen maupun dengan masyarakatnya. Hal ini bisa dilihat pada wakil Bupati Jombang yang pada awalnya banyak berkecimpung di Fatayat NU. Selain itu juga wakil Bupati Ponorogo yang karir politiknya diawali dari Kosgoro kemudian masuk dan menjadi pengurus Partai Golkar Ponorogo. Demikian juga dengan Wakil Walikota Kediri yang merupakan aktivis Fatayat NU di kota Kediri. Pengalaman dalam berorganisasi itulah yang kemudian memberikan banyak pembelajaran politik bagi para politisi perempuan terutama ketika menerima jabatan politik sebagai wakil kepala daerah.

3. Adaptasi

Penelitian ini juga mendapatkan bahwa kemampuan para politisi perempuan dalam beradaptasi di dunia politik pada kenyataannya membawa para politisi perempuan memiliki kompetensi komunikasi politik yang baik.Pengertian adaptasi adalah cara individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dimana mereka tinggal. Adaptasi ini diperlukan oleh setiap individu dalam memasuki sebuah lingkungan baru, karena setiap lingkungan memiliki karakteristik sendiri. Salah satu bentuk adaptasi adalah

adaptasi tingkah laku.Adaptasi tingkah laku adalah cara individu beradaptasi dengan lingkungannya dalam bentuk tingkah laku. Adaptasi tingkah laku ini berhubungan dengan tindakan individu untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Selain itu juga adaptasi tingkah laku berhubungan dengan kebiasaan makhluk hidup untuk beradaptasi dan mempertahankan hidupnya di suatu lingkungan.

Bila dilihat bahwa dunia politik mayoritas dikuasai oleh kaum laki-laki maka diperlukan proses adaptasi yang baik bagi politisi perempuan untuk masuk ke dalam dunia politik. Oleh karena itu diperlukan proses adaptasi tingkah laku bagi perempuan yang terjun ke dalam dunia politik. Politisi perempuan dituntut untuk mampu berinteraksi dalam lingkungan politik guna mendapatkan pengakuan atau legitimasi politik baik dari para politisi laki-laki baik sebagai kolega politik maupun sebagai lawan politik serta terhadap para konstituennya. Hal inilah yang termasuk dalam adaptasi politik. Adaptasi politik yang dimaksud dalam konteks ini adalah ukuran-ukuran yang dipakai para aktor dalam merespons proses politik yang berlangsung. Gulbrandsen (2003) dan ilmuwan politik lainnya membagi adaptasi politik dalam dua kelompok: *adaptasi strategis* yang dibangun berdasarkan pendekatan neoliberal dan *adaptasi normatif* yang disokong oleh pendekatan konstruktivis dan kognitif. Adaptasi strategis berarti bahwa adaptasi para aktor terhadap proses politik yang berlangsung didasarkan pada perhitungan untung dan rugi. Setiap aktor akan memilih sikap politik tertentu jika dan sepanjang biaya marginal dari pilihan itu lebih rendah (atau minimal sama) dengan keuntungan marginalnya. Berkebalikan dengan itu, adaptasi normatif adalah sikap politik yang ditunjukkan oleh aktor karena dia memegang norma-norma tertentu tanpa mempedulikan keuntungan atau kerugian materi yang diakibatkan. Sikap ini dipengaruhi oleh pengalaman hidupnya atau karena ia belajar, menerima, dan

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras mencetak naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

menginternalisasi norma dan nilai yang dibawa pihak lain. Pada penelitian ini para politisi perempuan lebih cenderung melakukan adaptasi normative.Hal ini terlihat bagaimana para politisi perempuan mudah berinteraksi secara baik dengan para konstituen maupun masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing.Selain itu juga para politisi perempuan dapat diterima dan mendapatkan legitimasi politik secara baik dari partai pendukungnya.

Proses adaptasi yang dilakukan oleh para informan dalam penelitian ini lebih "mulus" prosesnya dikarenakan para informan memiliki "jabatan" politis. Mengingat dengan jabatan politik yang dimiliki para informan tersebut maka mereka memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengendalikan sistem politik yang ada di wilayah tersebut. Selain jabatan politik yang memudahkan para informan dalam beradaptasi faktor lain yang juga mendukung mudahnya para informan beradaptasi dalam dunia politik tersebut adalah faktor kesamaan karakter. Artinya bahwa para informan pada dasarnya adalah penduduk asli dari wilayah yang dipimpinnya sehingga mereka memiliki kesamaan karakter sosial budaya. Selain itu juga para politisi perempuan tersebut sudah sangat paham dan mengenal karakter masyarakat di mana karakter masyarakat dan karakter budaya akan mempengaruhi karakter sistem politik di sebuah daerah. Dengan demikian mudah bagi para politisi perempuan yang menjadi informan dalam penelitian ini untuk melakukan adaptasi terhadap sistem politik yang ada di masing-masing daerah tersebut. Keberhasilan proses adaptasi yang dilakukan oleh para politisi perempuan dalam penelitian ini memudahkan bagi politisi perempuan untuk melakukan komunikasi politik dengan masyarakat sekitar dan para konstituennya. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa kompetensi komunikasi politik merupakan kemampuan politisi dalam beradaptasi dalam setiap situasi politik yang dihadapinya serta kemampuan politisi untuk dapat menjalin

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

interaksi positif dengan para kolega politik guna mendapatkan pengakuan dan legitimasi politik.

4. Empati

Empati adalah melakukan sesuatu kepada orang lain dengan menggunakan cara berpikir dari orang lain tersebut, yang menurut orang lain itu menyenangkan dan yang menurut orang lain itu benar. Menurut Ubaidillah (2005) empati adalah kemampuan kita dalam menyelami perasaan orang lain tanpa harus tenggelam di dalamnya. Empati adalah kemampuan kita dalam merespon keinginan orang lain yang tak terucap. Melalui empati individu akan mampu mengembangkan yang mendalam mengenai sesuatu permasalahan. Memahami orang lain akan mendorong antar individu saling berbagi. Empati merupakan kunci dari pengembangan *leadership* dalam diri individu. Bila dalam konsep dimensi kompetensi komunikasi antar pribadi empati menjadi salah satu unsur di dalamnya maka dalam kompetensi komunikasi politik juga diperlukan empati untuk membangun kompetensi komunikasi politik yang positif. Pada penelitian ini telah dijabarkan bahwa semua politisi perempuan yang juga sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah pada kenyataannya mudah mengambil keputusan dan kebijakan karena adanya empati terhadap masyarakat yang ditemuinya. Perasaan empati tersebut membantu para politisi perempuan untuk dengan mudah membangun kedekatan dan interaksi dengan masyarakat yang ada di daerahnya.Beberapa permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan "*concern*" dari para politisi perempuan sebagai pemimpin dapat dengan mudah diselesaikan karena perasaan empati.Terlebih lagi fokus dari para politisi perempuan tidak jauh dari permasalahan-permasalahan kemiskinan, pendidikan, perempuan dan anak-anak yang pada dasarnya banyak mendorong timbulnya perasaan empati. Sebagaimana yang dilakukan bu Risma dan Bu Ida dalam "membebaskan" daerah prostitusi karena empatinya

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, memfotocopy naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

yang besar terhadap masa depan anak-anak yang tinggal di sekitar "daerah hitam" tersebut. Keberhasilan bu Risma dan bu Ida mengambil keputusan yang "berani" dan beresiko menjadi salah satu bukti bahwa politisi perempuan memiliki kompetensi komunikasi politik yang baik. Pada kenyataannya para politisi perempuan dalam penelitian ini telah menunjukkan kompetensi komunikasi politiknya dengan baik terhadap masyarakat di daerahnya dengan menggunakan empati.

5. Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan proses untuk mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu pemimpin juga mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara dukungan dan kerjasama dari orang–orang di luar kelompok atau organisasi (Veithzal Rivai, 2007: 3). Kepemimpinan dalam politik berkaitan dengan kekuasaan dan kewenangan.Kepemimpinan juga menjadi dimensi dari kompetensi komunikasi politik.Sebagai seorang pemimpin tentu memiliki kekuasaan dan kewenangan yang lebih banyak. Termasuk juga dalam politik. Artinya para politisi perempuan yang dalam penelitian ini memiliki jabatan politik yaitu sebagai Kepala Daerah atau sebagai Wakil Kepala Daerah maka ymb dipastika mereka memiliki kekuasan dan kewenangan lebih.

INDONESIA
www.penerbitbukamidran.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Oleh karena itu politisi perempuan memiliki kompetensi komunikasi politik yang baik. Fakta menunjukkan bahwa suara dari para informan dalam penelitian lebih mudah didengar dan diterima oleh masyarakat. Salah satu faktornya adalah karena jabatan (politik) yang diemban nya. Dengan demikian politisi perempuan tidak merasa sulit atau mendapatkan kendala yang

besar ketika memasuki dunia politik yang keras dan penuh dengan simbol patriarki. Artinya dengan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya maka sangat membantu politisi perempuan untuk mendapatkan pengakuan politik.

Simpulan dan Saran

1. Simpulan

a. Kompetensi komunikasi intrapersonal politisi perempuan dilihat dari dua aspek yaitu aspek kepercayaan diri dan aspek identitas diri. Artinya kemampuan politisi perempuan dalam meningkatkan kepercayaan diri dan mengelola identitas diri atau jati dirinya sebagai politisi perempuan akan meningkatkan kompetensi komunikasi intrapersonalnya. Pada akhirnya kompetensi intrapesona ini akan mendorong terbangunnya kompetensi komunikasi sebagai seorang politisi perempuan.

b. Kompetensi komunikasi interpersonal politisi perempuan dilihat dalam dua aspek yaitu aspek kognitif dan aspek adaptasi. Pada aspek kognitif di sini seorang politisi perempuan dituntut untuk memiliki pengetahuan dan wawasan tentang politik yang selama ini telah dikuasai oleh politisi laki-laki. Selain itu juga sebagai seorang politisi maka politisi perempuan juga harus memiliki pemahaman yang baik tentang konstituennya dan masyarakat umum. Aspek adaptasi dalam penelitian ini adalah kemampuan politisi perempuan untuk menyesuaikan diri ketika memasuki dunia politik yang sangat patriarki dan penuh dengan dominasi laki-laki. Dalam penelitian ini kompetensi komunikasi antarpribadi yang ada pada politisi perempuan terlihat lemah. Politisi perempuan sangat lemah dalam penguasaan pengetahuan tentang politik sehingga proses adaptasinya kurang baik.

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin penerbit

c. Penelitian mengungkapkan bahwa kompetensi komunikasi politisi perempuan tidak hanya dibangun oleh faktor sosiokultural tetapi juga dibangun oleh faktor pengalaman yang dimiliki oleh politisi perempuan.
d. Faktor kepemimpinan yang saat ini dimiliki oleh para politisi perempuan memberikan kontribusi dalam membangun kompetensi komunikasi politisi perempuan meskipun tidak besar. Kontribusi tersebut semakin nyata ketika politisi perempuan menjadi orang nomor satu di sebuah daerah.
e. Politisi perempuan cenderung mengabaikan media massa sebagai saluran untuk menunjukkan jati diri sebagai politisi perempuan yang handal. Politisi perempuan kurang maksimal dalam memanfaatkan media massa baik sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat atau konstituennya maupun sebagai sarana untuk membangun "image" diri sebagai seorang politisi perempuan yang handal.

2. Saran

Guna melengkapi hasil penelitian ini, perlu diajukan beberapa saran atau rekomendasi:

a. Menjadi seorang politisi bagi perempuan tidaklah mudah karena dunia politik sangat kental dengan simbol-simbol patriarki. Maka dominasi laki-laki dalam dunia politik tidak bisa dihindarkan. Oleh karena itu untuk menjadi seorang politisi yang baik maka perempuan harus banyak belajar dalam jangka waktu yang panjang. Menjadi politisi yang handal tidak bisa diraih dalam waktu yang singkat (instant) apalagi masuk menjadi politisi hanya untuk memenuhi kuota 30%.

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, menfotocetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

b. Untuk meningkatkan kemampuan komunikasi intrapersonal berupa self management seperti meningkatkan rasa kepercayaan diri sebagai seorang politisi maka politisi perempuan harus belajar untuk berani tampil di forum-forum diskusi termasuk juga tampil di media massa sebagai nara sumber.
c. Guna meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal maka politisi perempuan harus mau meningkatkan pengetahuan dan wawasannya tentang politik. Selain itu juga politisi perempuan harus mencoba untuk memasuki bidang-bidang yang selama ini telah menjadi perhatian politisi laki-laki seperti bidang ketahanan, ekonomi, kerjasama luar negeri dan sebagainya.
d. Politisi perempuan harus menyadari bahwa media massa selain sebagai saluran komunikasi juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana investasi politik. Sering tampil di media massa sebagai nara sumber berita-berita yang berkaitan dengan politik menjadi salah satu bentuk investasi bagi politisi perempuan untuk menjadi "popular" yang pada akhirnya mampu bersaing dengan politisi laki-laki.

INDONESIA
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Referensi

Acker, van Elizabeth. 2003. *Media Representations of Women Politicians in Australia and New Zealand: High Expectations, Hostility or Stardom*, Journal of Policy and Society. 2003. Vol. 22. Issue 1. p 116-136

Adib Muhammad, 2009, *Etika dan Filsafat Komunikasi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group

_____, 2010, *Filsafat Ilmu Ontologi, Epistemologi, Aksiologi dan Logika Ilmu Pengetahuan,*Yogyakarta, Pustaka,

Ardial,2010, *Komunikasi Politik*, Jakarta, Indeks

Ardianto Elvinaro,Bambang, 2007, *Filsafat Ilmu Komunikasi*, Bandung, Simbiosa Rekatama Media.

Arifin Anwar, 2003, *Ilmu komunikasi sebuah pengantar Ringkas*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

_____, 2006, *Pencitraan politik*, pustaka Indonesia, Jakarta

Arrianie Lely, 2010, *Komunikasi Politik Politisi dan Pencitraan di Panggung Politik*, Bandung, Widya Padjajaran

Bligh, C. Michelle, Cassad, J, betina., Schlehofer, M, Michele., Gaffney, m. Amber., *Competent Enough, But Would You Vote for Her? Gender Stereotypes and Media Influences on Perceptions of Women Politicians*, Journal of Applied Social psychology. 2012, 42, 3, pp. 560–597.

Bungin Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu sosial Lainnya*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Cangara Hafied. 2009. *Komunikasi Politik*. Jakarta, Rajawali Pers

Christine Daymon,Immy Halloway, 2008. *Metode-metode Riset Kualitatif dalam Public Relation dan Marketing Communications*, Bentang, Jakarta

Denzin, Norman K and Lincoln, Yvonna S. 2005, *The Sage Hadbook of Qualitative Research. Third Edition*. Thousand Oaks, London, New Delhi, Sage Publications.

Douglas Kellner, 2003, *Teori Sosial Radikal*, Yogyakarta, Syarikat Indonesia

Griffin, 2003, *A First Look at Communication Theory 5th edition*, New York, McGraw- Hill Companie

Hamidi, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian*, Malang, UMM Press

_____, 2010, *Metode Penelitian dan Teori Komunikasi*, Malang, UMM Press

Kaye Michael, 1994, Communication Management, Prentice Hall, Australia

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com

Kuswarno Engkus, 2009, *Fenomenologi metodologi penelitian Komunikasi,* Bandung, Widya Padjajaran

Lawrence Neuman, 2000, *Social research Methods Qualitative and Quantitative Approches Fourth Edition,* USA, Library of Congress Catalog.

Lincoln, Yvonna S and Egon G. Guba, 2000, *Paradigmatic Controversies, Contradiction and Emerging Confluences dalam Handbook of Qualitative Research*, second edition. Sage Publication

Lindlof, Thomas R & Taylor, Bryan C, 2002 *Qualitative Communication Research Methodes*, Second Edition, Sage Publication

Little John, 2002, *Theories of Human Communication*, Jakarta, seventh edition, Wadswort Publising Company, Belmont California.

Lukiati Komala, *Ilmu Komunikas Perspektif dan Konteks*, Bandung, Widya Padjajaran

Mulyana Deddy, 2004, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung, Remaja Rosdakarya

_____, 2004, *Komunikasi Politik Khalayak dan Efek*, Bandung, Remaja Rosdakarya

_____, 2005, Komunikasi efektif suatu pendekatan lintas budaya, Bandung, Remaja Rosdakarya

, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif,* Bandung, Remaja Rosdakarya

Moleong, Lexy J, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif,* Bandung, Remaja Rosdakarya

Morissan, 2009, *Teori Komunikasi*, Bogor, Ghalia Indonesia

Monte Palmer. 2001. *Comparative Politics, Political Economy,Political Culture, and Political Interdepence*. United States of America:F.E. Peacock Publisher, In.

McQuail Denis, 1992, *Mass Communication Theory*, Sage Publication

Nasution Zulkarnaen, 1990, Komunikasi Politik Suatu Pengantar, Jakarta: Yudhistira

INDONESIA
Dilarang keras, mencetak naskah hasil

Nimmo Dan, 2011, *Komunikasi Politik Komunikator Pesan dan Media*, Bandung, Remaja Rosdakarya

Poerwandari Kristi, 2001, *Pendekatan Kualitatif dalam Psikologi*, Jakarta, Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi UI

Ross, K. 2002. '*Women's Place in 'Male' Space: Gender and Effect in Parliamentary Contexts'*. *Parliamentary Affairs*, 55: 189-201

Saefullah Ujang, 2007, *Kapita Selekta Komunikasi Pendekatan Agama dan Budaya*, Bandung, Simbiosa Rekatama Media

Severin, tankard Jr, 2009, *Teori Komunikasi Sejarah, Metode dan Terapan di dalam Media Masa*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group

Stryker, Sheldon. 2000 *Self Identity and Social Movements*, Minneapolis, University of Minnesota Press

Yin, Robert K, 2009, *Studi Kasus Desain & Metode*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

KBM
INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit



Konstruksi Penyiaran Islami Dalam Liberalisasi Industri Media TV Lokal : Tantangan dan Peluang Mengembangkan Program TV-9 Jawa Timur

Surokim

Pada dasarnya lanskap media massa di Indonesia merupakan sebuah proses konstruksi sosial yang masih dalam proses pembentukan dan berlangsung terus menerus (Sendjaja, 2007). Proses pembentukan itu diwarnai kontestasi yang tajam antar aktor dan agen untuk mengukuhkan

relasi kuasanya masing masing dalam berebut ruang legitimasi. Proses itu bisa manifes atau laten dan terus berlangsung berkesinambungan hingga kini. Sendjaja (2007) mengemukakan ada tiga agen utama pasca reformasi yang saling *interplay* yakni masyarakat sipil, pasar, dan media yang akan terus bersaing satu sama lain dalam upaya menentukan definisi operasional yang sahih tentang realitas media yang dianggap paling sah agar dipatuhi semua pihak. Hasil kontestasi itu akan meneguhkan siapa sejatinya yang memiliki kuasa dan menentukan isi media.

Dalam sejarahnya kontestasi berlangsung tidak dalam ruang *sosial vacuum*, tetapi berada dalam ruang sosial dinamis yang memiliki karakteristik relasi kuasa yang khas dan dalam posisi tarik menarik yang sering tidak berimbang. Ruang media diperebutkan oleh berbagai kelompok yang memiliki surplus sumber daya ekonomi dan politik hingga bisa mendominasi dan menguasai kelompok lain. Masing masing kelompok berusaha untuk menempati posisi yang menguntungkan untuk memenangkan kontestasi tersebut dalam bentuk hegemoni. Kontestasi media akhirnya menjadi fenomena khas tidak saja karena faktor internal, tetapi juga eksternal dan tidak pernah terlepas dari tinjauan historis dan kontekstual dimana *interplay* itu berlangsung.

www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Pasca reformasi tahun 1998 dan berakhirnya rezim orde baru, media massa mengalami perubahan lanskap yang drastis. Media bergerak dari media propaganda pembangunan menjadi media industri dan politik. Media massa cetak berkembang dalam jumlah yang sangat signifikan hingga mencapai 300%. Di era itu Indonesia menurut Hidayat (2003) merujuk pada Turner dan Goodman (2000) dikenal sebagai negara paling demokratis *Indonesia has become one of the most open communities in as much as you can pretty well write what you want without fear of official sanction.*

Selain media cetak, perkembangan media massa elektronik khususnya tv nasional dan lokal di Indonesia pasca reformasi juga berubah signifikan yang ditandai dengan masuknya sejumlah pemain baru. Para pengusaha yang selama ini tidak memiliki akses karena kendala politik termasuk juga di dalamnya sejumlah aktivis yang dilarang bermedia pada masa orde baru mulai masuk turut meramaikan 'bisnis' media massa di tanah air. Sejumlah deregulasi bidang media yang dilonggarkan pada awal rezim Habibie turut mendorong munculnya media baru yang beroperasi di Indonesia. Jumlah media penyiaran berkembang pesat dan media elektronik nasional dan lokal bertambah pemain baru hingga pilihan media elektronik *free to air* menjadi semakin banyak.

Pelonggaran izin media itu berlangsung hingga medio 2008 hingga munculnya regulasi baru di bidang pers tahun 1999 dan penyiaran 2002. Tarik ulur kepentingan dalam regulasi media pada waktu itu karena pengaruh reformasi pada awalnya dimenangkan publik yang ditopang oleh kekuatan *civil society* sehingga regulasi media di level fundamental terlihat pada warga, propublik. Namun, apa mau dikata regulasi yang pro publik tersebut di level regulasi teknis tidak mampu diterjemahkan dengan baik oleh aparat negara sehingga semangat media pro publik tersebut di tingkat teknis menjadi pudar dan tak lagi terlihat. Hal ini bisa jadi karena negara dan pasar tidak melihat hal tersebut menguntungkan bagi kepentingan kedua belah pihak.

KSM INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Di era awal reformasi kekuatan sipil terlihat menguat dan kekuatan negara melemah. Regulasi teknis banyak yang belum disusun sejalan dengan regulasi fundamental hingga banyak regulasi teknis yang siap dilaksanakan karena belum selesai dibuat. Situasi tersebut membuat implementasi kebijakan media menjadi karut marut dan akhirnya banyak kalangan menafsirkan kebijakan level praktis sendiri sendiri, sesuai kehendak dan kepentingannya sendiri sendiri. Situasi ini membuat proses kebijakan teknis

terkendala dan media penyiaran hanya berjalan di tempat. Dalam kondisi tertentu situasi ini memang dilematis dan menjadi polemik di level teknis. Negara yang seharusnya segera membuat kebijakan teknis seolah melakukan pembiaran dan perkembangan media menjadi rumit dan serba tidak ada kepastian.

Saat kekuatan civil society mulai longgar pasca 2010 maka negara bersama pasar kembali melakukan konsolidasi dan melakukan kerjasama di level regulasi teknis untuk menjamin legitimasi dan kepentingan mereka. Akibatnya bisa ditebak, mekanisme pasar berjalan dalam persaingan di bidang bisnis media dan investor mulai memegang kendali dalam bisnis media. Sejatinya, situasi itu berlangsung dalam persaingan yang tidak fair dan masing masing pihak berkehendak sendiri menafsirkan regulasi dan mengambil langkah teknis sendiri sendiri. Payung hukum yang demokratis di level regulasi fundamental kerap kali tidak sesuai dengan level regulasi teknis. Bahkan kadang bertolak belakang. Kebijakan media menjadi kabur tergantung siapa yang bisa memanfaatkan situasi tersebut. Tak syak lagi, banyak media massa tutup karena kalah bersaing dan akhirnya pasrah diambil alih oleh investor media baik melalui proses akuisisi maupun merger bisnis, khususnya investor grup media dari Jakarta.

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Fenomena ini sungguh menarik diamati mengingat pasca reformasi, proses konsolidasi kelas menengah kritis Indonesia juga belum solid dan mapan. Kekuatan civil society kritis mulai banyak yang masuk dalam lingkaran rezim baru hingga kekuatan warga kritis tersebut kehilangan kekuatan untuk bisa mengontrol jalannya regulasi media secara kritis. Dalam situasi itu kita juga bisa menyimak mulai munculnya peran peran aktor profesional dalam serangkaian lobi untuk memengaruhi proses pembuatan kebijakan media. Tentu saja kontes dalam kuasa itu, mereka tidak hanya berjuang menghadapi negara, tetapi juga kekuatan masyarakat sipil yang juga menghendaki pembaharuan demokrasi media. Pada

intinya kekuatan kekuatan itu berusaha untuk mengurangi hambatan hambatan politik yang muncul dalam penetrasi media, khususnya dalam mendorong kebebasan pasar dalam pengelolaan media di Indonesia.

Meningkatnya jumlah pemain pasar dalam industri media diiringi harapan tinggi publik agar media penyiaran dapat memainkan peran yang fungsional bagi demokratisasi media yang bertumpu pada prinsip keberagaman isi dan kepemilikan. Namun usaha itu menghadapi tantangan dan problem yang tidak ringan. Tentu saja potret kontestasi media Indonesia tidak sesederhana itu. Mengamati konstruksi sosial penyiaran Indonesia tidak bisa dilepaskan dari aspek meso dan makro. Aspek meso dan makro yang patut diamati adalah liberalisasi ekonomi, liberalisasi politik, dan perkembangan teknologi komunikasi

Liberalisasi dan Fundamentalisme Pasar

Fundamentalisme pasar pada dasarnya identik dengan yang kita kenal sebagai neoliberalisme sebagaimana digambarkan Shiva (2002) dalam Hidayat (2013) sebagai :

INDONESIA
www.penerbitbukukita.com
Dilarang keras mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

"This (market) fundamentalism redefines life as commodity, society as economy, and the market as the means and end of the human enterprise. The market is being made the organizing principle for the provisioning of food, water, health, and other basic need, it is being made the organizing principle for governance, it is being made the measure of humanity..."

Fundamentalisme pasar meyakini bahwa semua adalah komoditas yang diatur oleh pasar. *Everything is for sale!*. Fundamentalisme pasar tambah Hidayat (2003) tidak mengakui apa yang disebut sebagai fundamental *rights of citizens* ataupun fundamental *duties of governments.* Yang ada adalah kewajiban bagi tiap manusia untuk

memenuhi kebutuhan mereka sendiri dengan mengembangkan entrepreneurship agar sesuai dengan kaidah kaidah pasar.

Sebagai sebuah ideologi fundamentalisme pasar meyakini bahwa semua interaksi manusia merupakan transaksi ekonomi dan semua hal adalah komoditas. Kebebasan dalam konsep fundamentalisme pasar lebih banyak diformulasikan sebagai kebebasan individu untuk melakukan akumulasi keuntungan dan juga kebebasan mobilitas bagi barang dan jasa serta modal. Jadi semua akan lebih baik kalau diserahkan kepada mekanisme pasar.

Media massa sebagai entitas bisnis dalam hal ini harus dilepaskan dari kontrol pemerintah dan warga, dan diserahkan kepada konsumen sebagai kekuatan inti pasar melalui mekanisme pasar. Hal hal yang menghambat mekanisme pasar harus disingkirkan dan dihilangkan. Akibatnya, sektor media yang masih dikelola dengan prinsip *public service* harus diarahkan kepada *profit making enterprise* yang bisa memberi pemasukan dana bagi negara atau *public service institution*.

www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah hasil layout ini tanpa seijin penerbit

Liberalisasi ini membawa pada situasi dimana rejim kapital nampak dominan dengan menggunakan logika dalam istilah Hidayat (2003) *never ending circuit of capital accumulation M-C-money-commodities-more money* dan membungkam media yang tidak bisa mematuhi kaidah kaidah pasar. Akibatnya media hanya akan bisa tumbuh dalam kelompok kelompok konglomerasi besar yang bisa mengambil keuntungan dengan melakukan merger dan akuisisi. Kelompok kelompok ini yang memiliki akses besar dan *economic scale* yang lebih besar dalam melakukan integrasi vertikal dan horizontal dalam pasar. (Hidayat, 2003)

Logika pasar ini pula yang akan menentukan isi media, dan akan memiliki dampak serius terhadap publik sebagaimana dipaparkan Hidayat (2013:7) yaitu ***Pertama***, tingkah laku penyiaran akan semakin ditentukan oleh *the logic of accumulation and exclusion*.

Logika kepentingan akumulasi modal akan menentukan siapa dan apa yang akan dikesampingkan media penyiaran. Artinya pasar akan mendikte isu isu apa yang layak tayang dalam media penyiaran. Mereka akan mendikte isu isu yang linear dengan kepentingan pasar dan akan mengesampingkan isu isu yang bertentangan dengan kepentingan ekspansi dan akumulasi modal. Isu isu publik akan ditayangkan jika fungsional dengan kepentingan itu, dan otomatis dikesampingkan jika bertentangan dengan prinsip tersebut.

Kedua, Biaya akses ke media menjadi mahal dan hanya akan terjangkau oleh kelompok yang memiliki surplus modal. Bagi kelompok yang tidak memiliki sumber daya berupa kekuatan politik dan dukungan ekonomi maka akan memperoleh akses yang kecil guna menyuarakan isu kepentingan mereka. Yang lebih berbahaya, bagi kelompok yang memiliki sumber daya akan mampu melakukan *perception engineering* atau *issues management*, dengan membeli jam tayang, melakukan rekayasa *public relations*, untuk kepentingan isu mereka.

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com

Ketiga, Kaidah dan logika mekanisme pasar akan mendepak keluar institusi institusi yang tidak mampu mematuhi rejim kapital dan kehendak industri pengiklan. Media alternatif tidak akan mendapat tempat sebagai wadah *public sphere* dan media akan jatuh pada kepentingan konsumen yang telah terstruktur ekspansi ekonomi. Hanya isu isu yang panas dan sensasional yang bisa masuk ke media. Media media yang memiliki harapan hidup adalah yang memuat isu isu seperti itu dan jika tidak ikut maka media akan memiliki harapan hidup yang rendah. Akhirnya terjadi homogenisasi isi media, media hanya menyajikan isi dari kepentingan pasar.

Keempat, Media akan berperan melanggengkan dan mereproduksi struktur sosial yang bercirikan ketimpangan antar kelas ekonomi.

Akan terlihat ketimpangan antar kelas dalam mengkonsumsi media. Kelas ekonomi menengah ke atas akan cenderung menjadi segmen *quality newspaper* dan *quality program* sedangkan untuk kelompok menengah bawah akan menjadi segmen *yellow newspaper* dan *yellow program* yang penuh dengan eksploitasi konflik, gosip, kekerasan, mistik, dan eksploitasi tubuh perempuan. Hal ini menurut Hidayat (2013) akan mencipta gab rasionalitas antarkelas antar warga negara dan tidak fungsional bagi perkembangan demokrasi yang membutuhkan kesetaraan informasi publik dalam tiap wacana publik.

Kelima, Ekspansi *market regulation* akan semakin menempatkan jurnalis pada posisi rentan dan sekadar menjadi alat produksi informasi dan hiburan. Artinya setiap pertimbangan efisiensi muncul, para jurnalis itu dengan gampang di putus hubungan kerja (PHK), dikurangi jumlah upah dan jaminan kesejahteraannya. Para jurnalis bisa terjebak menjadi *one dimensional man* dan tidak mampu menghayati diri mereka sebagai *craftsman* yang mampu menjadi pekerja seutuhnya yang mampu mengeksplorasi dan mengekspresikan kreativitas, idealisme, dan aspirasi demokrasi mereka. Bisa jadi dalam tahap tertentu posisi jurnalis akan berada dan dipaksa menjadi *freelance* yang memiliki posisi tawar yang rendah untuk menuntut perbaikan upah, kesejahteraan dan jaminan profesi guna menerapkan prinsip prinsip jurnalisme profesional.

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Liberalisasi pasar ini semakin meneguhkan kekuatan pemodal besar dalam bisnis media dan mendorong ke arah konsentrasi modal dan kepemilikan baik melalui proses commercialization, liberalization, dan internationalization.

Dalam mekanisme pasar itu juga meyakini bahwa tidak ada kewajiban negara, pun tidak ada hak dasar warga. Fundamentalisme pasar meyakini semua manusia adalah

entrepreneur, semua interaksi manusia adalah transaksi ekonomi dan semua hal adalah komoditas. Media dengan demikian harus diserahkan kepada mekanisme pasar. Langkah langkah ini berusaha untuk membebaskan media dari kuasa negara dan juga publik. Tidak heran jika kemudian muncul sejumlah ancaman bagi penyelenggaraan kepentingan publik. Media publik dikelola laksana industri penyedia jasa bisnis yang menghasilkan keuntungan bukan memberi pelayanan bagi kepentingan publik. Pemenuhan kebutuhan publik, menjaga kepentingan publik, dan menjamin akses publik yg bisa menjamin diskursus kepentingan dan kebaikan bersama tidak lagi menjadi prioritas dalam industri media. Akses ke forum pembentukan pendapat umum publik semakin lemah dan pada akhirnya *public sphere* semakin terkontaminasi kepentingan bisnis dan eksplorasi kapitalis semata.

Liberalisasi Politik

Pasca Reformasi juga ditandai dengan semakin bebasnya kebebasan berekspresi dalam berpolitik. Reformasi yang membawa tuntutan atas demokratisasi di segala bidang menyasar juga bidang media massa. Tak pelak terjadi tuntutan penyesuaian atas berbagai perangkat hukum yang dinilai tidak sejalan dengan demokratisasi bidang media. *State regulation* dimana negara mendominasi pengaturan media mulai melonggarkan sejumlah aturan agar nampak sejalan dengan tuntutan reformasi dan demokratisasi bidang media. Rezim Habibie yang naik saat reformasi berusaha untuk menderegulasi aturan yang menghambat tumbuhnya media massa sebagai upaya untuk memperoleh dukungan dan legitimasi dari publik. Munculnya berbagai ragam regulasi politik yang mencoba untuk memberi akses kepada warga dalam perkembangannya mendorong terjadinya liberalisasi politik. Hal ini karena proses konsolidasi sipil belum matang dan kekuatan sipil kritis banyak terimobilisasi menjadi bagian dari lingkaran elit

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

negara. Situasi ini juga mendorong reformasi bidang hukum yang membuat banyak penyesuaian dalam regulasi politik termasuk didalamnya partai politik yang menjadi pilar legislatif. Menyimak perjalanan pengaturan media di Indonesia dapat dilihat adanya pergeseran dari *state regulation* menuju *market regulation*. Kekuatan kekuatan sipil seolah lepas dari kungkungan politik dan kemudian mendapatkan momen untuk unjuk ekspresi kekuatan politik. Pasca reformasi, munculnya sejumlah deregulasi telah mendorong kekuatan kekuatan politik untuk muncul baik partai baru maupun LSM untuk ikut serta meramaikan wacana dan diskursus masalah publik.

Tak syak lagi media tumbuh dan berkembang pesat di tengah kebebasan politik yang diperoleh. Regulasi media yang tidak mensyaratkan SIUP menurut Hamad (2004:66) telah membawa berkah bagi pertumbuhan media di Indonesia. Pertama, memberi basis yang kuat bagi lahirnya pers industri dengan menggeser pers idealis. Kedua, mengundang para pemodal untuk masuk ke media yang belum tentu menjadi bisnis utama mereka. Ketiga, memunculkan kelompok kelompok usaha penerbitan media. Hamad (2004) memaparkan ketika gerakan reformasi datang dengan membebaskan media dari belenggu politik kecenderungan tiga hal tersebut semakin menguat. Media dan pers Indonesia semakin leluasa mengekspresikan keyakinan politiknya tanpa harus merasa terancam usahanya. Bahkan sejumlah media terjerumus menjadi media partisan dan terkesan jor-joran memberitakan tokoh dan partai politik yang didukung dan diserangnya. Kepentingan politik media lantas berbaur dengan kepentingan usaha mereka.

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Kendati dalam faktanya tidak ada yang murni *market regulation*, karena dimanapun ada rezim negara tetap memiliki kuasa, dominasi market sering berkelindan dengan rezim untuk saling mengamankan kepentingan masing masing. Akibatnya, dorongan

media menjadi industri semakin menguat dan proses liberalisasi kawasan publik mulai berlangsung. Industri media mulai memegang peranan penting dalam konteks politik Indonesia.

Dominasi media korporasi di Indonesia pasca reformasi bukannya tidak problematik. Banyak paradox yang muncul akibat dominasi media bisnis ini. Sementara cita cita media nasional untuk membentuk jati diri keindonesiaan yang demokratis bertumpu pada kepentingan warga semakin jauh dari apa yang dilakukan media korporasi. Kenyataannya kepentingan negara dan pasar lebih terakomodasi, dibandingkan kepentingan masyarakat sipil di dalamnya. (Ida, 2010)

Akhirnya, mulai lah rezim pasar menguasai warna media di Indonesia. Beragam masalah mulai timbul silih berganti dan terjadi karut marut dalam sistem penyiaran nasional, dimana media korporasi terus mendominasi diskursus wacana publik. Media nasional yang diharapkan dapat menjadi ruang publik bagi warga negara kerap melanggar kewajiban dan bahkan sering lari dari fungsi edukasi dan pengawasan. Fenomena konglomerasi media mulai muncul seiring dengan melemahnya negara dan menguatnya para pengusaha media. Kondisi ini tidak berubah hingga kini. Platform media nasional yang didominasi media korporasi bisnis itulah yang saat ini mendominasi media Indonesia.

Perkembangan Teknologi Komunikasi

Disisi lain perkembangan teknologi juga berlangsung cepat dan tidak mampu diimbangi regulasi. Regulasi media kita tergagap gagap mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi yang berlangsung cepat. Regulasi kita hanya bisa menjadi pemadam karena datang begitu masalah timbul dan sudah ada, dan ia tidak mampu menjadi alat perekayasa sosial *(social engineering)* yang efektif dalam mengantisipasi segala dampak negatif yang muncul.

Media penyiaran kini tengah memasuki era konvergen dan media baru. Era ini menurut Sendjaja (2007) merupakan perpaduan dari 3 elemen sarana 3Cs yakni *communication network, computing/ information technology dan digitised media and information content.* Salah satu ciri yang menonjol adalah perubahan model komunikasi dari *one to many* menjadi *many to many communications*. Di level praktis era ni juga membawa implikasi pada terjadinya konvergensi *multitasking* dan *multi content*.

Media penyiaran juga tengah bergerak ke arah sini hingga menjadi multiplatform dan terintegrasi dengan berbagai media online. Perkembangan ini juga akan berjalan cepat seiring dengan semakin berkembangnya teknologi internet dan media sosial. Hal ini memaksa media penyiaran harus terintegrasi dengan media internet yang bisa diakses oleh publik kapan saja dan dimana saja.

Perkembangan ini juga akan membawa dampak kepada perilaku para konsumen media. Ke depan media penyiaran akan terhubung dengan media sosial yang akan diakses menggunakan smartphone dan itu artinya kebutuhan untuk menyajikan informasi online dan on demand semakin kuat. Media ke depan terintegrasi dengan teknologi seperti itu yang harus menyediakan banyak content agar tetap bisa mempertahankan konsumennya.

Dalam posisi itu kepentingan ekonomi politik tetap akan menjadi basis dalam mengamati pertarungan kuasa pada sektor penyiaran. Peran global dan juga ekonomi internasional tidak bisa dilepaskan. Perkembangan ekonomi dan industri media global juga akan berpengaruh terhadap bisnis media. Proses integrasi ekonomi global bisa membawa tekanan terhadap rezim dan lebih rentan terhadap tekanan tekanan eksternal (Hidayat, 2003:1) Arena kontestasi media ini sejatinya adalah konstruksi sosial yang melibatkan interaksi kekuasaan dalam penggal sejarah tertentu. Bukan fenomena yg statis, tetapi dinamis dan terus berjalan.

Realitas pasar berkelindan dalam situasi yang tidak selalu berimbang antar kekuatan atau agen.Sepanjang kekuatan tertsebut tidak imbang maka hegemoni dan dominasi akan terus berlangsung sepanjang waktu

Bagaimanapun, menurut Hidayat (2003) tidak mungkin mengeliminasi kekuatan pasar dan juga negara dalam situasi seperti ini karena itu diperlukan penyadaran, pemberdayaan, dan konsolidasi publik. Bagaimana publik mampu mewujudkan penyiaran publik yang mandiri, dikelola secara mandiri atas kekuatan civil society, dengan menggunakan dukungan dana publik sehingga tercipta *public sphere* yang relatif terlindung dari pengaruh yang berlebihan dari pasar dan negara.

Media Komunitas & Komodifikasi Religi

Perkembangan media komunitas sebagai salah satu pilar media demokrasi mengalami pasang surut dalam sejarah perkembangan media di Indonesia. Media komunitas yang memberi peluang kepada warga negara untuk berpartisipasi aktif dan ikut serta memajukan media menghadapi tantangan yang tidak mudah. Tentu saja tantangan itu tidak bisa dilepaskan dari kontestasi yang dipaparkan dimuka.

Media komunitas termasuk didalamnya media berbasis kelompok agama seperti milik kelompok masyarakat islam, secara *performance conduct* media di Indonesia mungkin tidak segemerlap media swasta yang dikelola korporasi bisnis profesional. Media islam atau yang berlatar religi mengalami stagnasi dalam posisi hegemoni industrialisasi media seperti itu. Isi media industri yang bertumpu pada libido konsumen semakin menjauhkan isi media religi dari konsumen media Indonesia.

KPM INDONESIA
www.penerbitkpmindonesia.com
Dilarang keras memperbanyak naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Dalam konteks industri media, siaran agama atau religi hanya akan memiliki peluang untuk tetap bertahan jika mampu melakukan komodifikasi isi. Acara religi dipaksa untuk mengikuti logika pengaturan pasar agar tetap memiliki rating dan penonton. Akhirnya, berbagai acara religi justru terjebak pada kepentingan pragmatis demi mengejar rating semata dengan mendramatisasi berbagai jalan cerita menjadi serba ekstra, tanpa memiliki kedalaman dan pemahaman esensi ajaran agama. Tidak jarang acara sinetron keluarga menjadi penuh olok-olok, kekerasan fisik dan kata-kata makian, dan menjurus kejam serta sadis. Belum lagi visualisasi siksa dan azab agama kerap hadir dengan tayangan yang menakutkan. Dramatisasi serba ekstra ini menjadikan tayangan religi bak film horor. Celakanya lagi, acara-acara seperti itu tetap disuka dan ratingnya tinggi.

Tidak dimungkiri, sinetron religi kita selama ini juga banyak terjebak pada kepentingan sesaat yang sekadar mementingkan tampilan fisik artis dan *setting* kehidupan keluarga mapan serta tidak berusaha untuk keluar pakem dengan *setting* mayoritas masyarakat yakni keluarga kelas bawah guna mendorong empati dan kesalehan sosial. Tayangan sinetron tersebut akhirnya tidak memberi inspirasi dan mendorong umat untuk melakukan kontemplasi lebih dalam terhadap ajaran agama.

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Dalam konteks ini sinetron religi sebagian besar menyuguhkan siaran religius 'seolah-olah', hanya sekadar sebagai lipstik pemanis dan tidak menyentuh aspek substansi. Banyak program yang dikemas dalam bingkai religi, tetapi cerita dan isinya bertentangan dan melenceng dengan isi dan pesan agama yang sesungguhnya. Beberapa hal yang mengkhawatirkan dalam sinetron religi kita adalah asosial, memicu sikap pragmatisme, konsumerisme dan hedonisme. Selain itu, dramatisasi azab dan siksa membuat ajaran agama penuh darah dan membuat orang ketakutan dalam memahami esensi ajaran agama yang hakiki.

Pendek kata tayangan TV kita tidak membumi dan hanya sekadar cerita yang berandai-andai dan jauh dari pesan religius yang mengarah pada kesalehan sosial. Gara-gara tayangan siksa kubur yang gosong dan penuh belatung serta penuh darah, banyak anak-anak tidak berani pergi ke masjid untuk tarawih dan sholat malam. Tidak sedikit anak-anak ketakutan keluar dari kamar dan akhirnya terpaksa ngompol di tempat tidurnya. Banyak akibat negatif dari tayangan religi seperti itu yang tidak disadari oleh pembuat sinetron religi. Hal ini tentu membahayakan bagi masyarakat, khususnya dalam memahami ajaran agama.

Menurut pengamatan Imawan (2008) banyak tayangan televisi berbau mistik yang bertentangan dengan substansi ajaran islam. Imawan (208) juga mengkritisi acara religi dengan menyebut sebagai post-spiritualitas. Jika ditelaah lebih mendalam papar Imawan dengan merujuk pada Pilihan (2005) acara religi di televisi tersebut memperlihatkan sebuah kondisi ketika yang kita sebut suci dicemari oleh yang kotor, yang spiritual dinodai oleh yang material, yang Ilahiah ditulari oleh yang duniawi. Sebuah percampuran entitas, peleburan esensi, dan sekaligus kesimpangsiuran nilai. Kondisi bercampurnya nilai-nilai spiritual dengan nilai-nilai materialisme, bersekutunya yang duniawi dengan yang Ilahiah, bertumpang tindihnya hasrat rendah dengan kesucian, sehingga perbedaan di antara keduanya menjadi kabur, itulah yang dinamakan Imawan sebagai pos spiritualitas.

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Wacana pos spiritualitas, tambah Imawan (2008) menjadikan kontradiksi sebagai ruang hidup dan prinsip utama. Tak bisa dipungkiri, perkembangan masyarakat kontemporer ditandai dengan terseretnya realitas ritual keagamaan ke dalam ruang pengaruh budaya populer, sehingga seseorang terjerumus ke pusaran sifat dangkal dan artifisial untuk menjauh dan terpental dari makna hidup dan nilai-nilai hakiki. Idealnya, nilai-nilai religi tidak mendangkalkan ritual dan mencabut makna hakikinya.

Dalam amatan Imawan (2008) banyak tayangan religi yang tidak sesuai dengan ajaran yang hendak disampaikan. Demikian pula dapat dijumpai pada berbagai ritual keagamaan, seperti Lebaran, haji, zakat, sampai wacana keagamaan di talk show keagamaan, maupun perayaan hari besar keagamaan.

Dalam situasi itu, Imawan (2008) menyebut bahwa di satu pihak, televisi merupakan mesin penyebar nilai spiritualitas, tapi sekaligus ia bertindak sebagai wahana berlangsungnya pemalsuan, pendistorsian, dan penyelewengan. Dalam tayangan religi ramadhan, misalnya, berbagai bentuk wacana spiritualitas seakan menawarkan jalan pencerahan jiwa, tapi pada saat yang sama sedang berlangsung proses memerangkap gaya hidup konsumeristis. Berbagai bentuk kemasan citraan dan gaya hidup, seperti menu buka puasa, busana simbol kesalehan, parcel, paket liburan, dan berbuka bersama artis kini menjadi bagian dari ritual keagamaan. Sebuah kegiatan ritual itu lantas digiring ke dalam perangkap kultur populer, lengkap dengan manipulasi artifisial, permainan bahasa, dan citra sebagai cara menciptakan imajinasi kolektif. Kesemuanya itu hanyalah cara jitu mengomodifikasi kesucian.

KPM INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Perubahan perilaku konsumen media juga tidak mudah untuk dinilai dari aspek substansi. Beberapa yang patut diketengahkan adalah munculnya mental *instant society syndrome.* TV bisa mencipta hasrat serba ingin cepat walau dengan jalan pintas. Hal ini memiliki implikasi yang serius bagi pembentukan mental dan budaya generasi muda. Cara mereka berpakaian, *make-up*, dan aksesoris terasa berlebihan. Akhirnya, banyak anak muda yang menjadi pragmatis, konsumeris, dan juga hedonis. Glorifikasi, pencipta sesuatu yang keren, heboh lagi mentereng. Glamorifikasi ini tidak lain hanya akan membuat masyarakat terus bermimpi dan hidup di awang-awang. Semua program tv akhirnya terus menerus

mengeksploitasi ekspektasi dan mimpi publik. Program tv menjadi *hyperreality* dan jauh dari realitas sosial.

Mendesakkan Media Islami Alternatif

Dibalik pesimisme itu, masih adakah secercah harapan bagi perkembangan media alternatif termasuk media islam kedepan. Menarik penjelasan Imawan Mashuri (2011) bahwa media tv lokal masih memiliki harapan. Data ast anggota Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) mengalami peningkatan positif yakni 7% pertahun. Bahkan, beberapa tv lokal ada yang bisa mencapai 67%. Data ini sungguh menjadi obat pilu di tengah pesimisme kebijakan penyiaran yang tak menentu. Di balik problematika yang dihadapi tv lokal, ternyata, jika tv lokal dapat dikelola secara profesional maka industri ini mampu bersaing dan berkembang baik. Demikian juga media komunitas akan juga bisa berkembang dengan baik jika dikelola dengan baik bertumpu pada prinsip prinsip tata kelola yang profesional.

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras menyebar naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Manajemen media, termasuk media penyiaran sebagaimana pernah digambarkan Rahayu dalam Siregar (2010) identik dengan ketidakpastian. Faktor yang turut menyebabkan diantaranya perubahan regulasi, depresi ekonomi dan sistem permodalan, perkembangan teknologi, meningkatnya tuntutan dan kesadaran publik, keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas, serta pergeseran minat konsumen. Menurut Diyah dalam Siregar (2010), manajemen media harus mampu mengantisipasi dan mengatasi faktor ketidakpastian tersebut.

Media komunitas harus mulai memikirkan untuk menggunakan pendekatan *sains* dan *local wisdom* dalam mengelola tv lokal agar bisa bertahan dan berkembang. Media komunitas harus mulai memikirkan untuk memiliki *data base* dan sistem informasi yang

andal. Apalagi saat ini publik mulai akrab dengan berbagai teknologi informasi.

Paling tidak, Media komunitas perlu memberi perhatian terhadap pengelolaan *data base* terkait dengan aspek demografis dan psikografis pemirsa yang selalu menunjukkan tren berubah dan dinamis. Berapa jumlah penonton aktif, jumlah pesawat tv, pola perilaku menonton, daya dukung ekonomi bisa dipantau secara *realtime.* Selain itu, pengelola Media komunitas juga harus mulai mengembangkan jejaring untuk produksi dan pemasaran program, termasuk *joint* dan tukar program dengan tv lokal yang lain guna mengatasi kendala kekurangan *supply* program.

Yang tidak bisa dianggap remeh adalah soal *sustainability,* baik manajemen maupun program. Media komunitas harus memiliki visi ke depan yang jelas, sehingga bisa diterjemahkan dalam misi dan program yang terukur mengingat perubahan yang sangat dinamis menyangkut *lifestyle*, teknologi maupun ilmu pengetahuan. Media komunitas islam harus mampu mengantisipasi berbagai perubahan tersebut dengan cepat dan bisa mengambil keuntungan dari perubahan tersebut melalui sisi bisnis, program, dan teknis.

INDONESIA
www.penerbitbukukamu.com
Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seijin Penerbit

Ketika media nasional dikuasai media bisnis, apa yang mesti harus kita lakukan. Dapatkah kita ruang untuk mendesak media alternatif pro publik untuk menjadi kontrol atas dominasi media bisnis tersebut. Apa yang harus dilakukan masyarakat sipil, termasuk didalamnya umat islam melalui penyiaran islami.

Sistem penyiaran yang ada di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kepentingan dan persoalan politik. Sistem media nasional harus terus didorong untuk memiliki pemihakan terhadap umat dan juga warga. Sistem itu harus juga dikembangkan berbasis pada kepentingan umat dan bertanggungjawab atas pembentukan karakter bangsa. Sistem itu harus patuh dan taat kepada cita cita

penyiaran yang demokratis, adil dan bermartabat sebagaimana tertuang dalam regulasi penyiaran.

Beberapa tantangan bagi pengelola media penyiaran alternatif ke depan 1) **Isi Program** : menarik, menghibur, dan mendidik. Selama ini data AGB Nielsen memperlihatkan bahwa publik lokal masih belum tertarik pada acara dengan segmen khusus, seperti pendidikan. Publik lokal masih menyukai acara hiburan serba gado-gado, sekadar hiburan. Menyiasati kondisi ini maka TV komunitas harus melakukan edukasi pemirsa untuk menguatkan acara khusus, program-program khas genuin lokalis, juga tetap menjadi supermarket untuk memenuhi keinginan publik yang beragam. 2) **Pendanaan *(fundraising)*:** media alternatif harus sehat secara bisnis dan menghasilkan keuntungan agar bisa berkembang. Selama ini media komunitas masih belum mampu menghasilkan pendanaan yang kuat. Media komunitas harus mampu melakukan penguatan sumber pendanaan dengan terobosan program-program lokal yang khas. Media tv komunitas juga harus mampu menekan biaya produksi. TV komunitas harus mampu menekan biaya produksi program lokal. 3) **Teknologi :** pengelola media komunitas tv islam harus akrab dengan teknologi *broadcast* termasuk teknologi baru digital agar dapat melakukan adaptasi, re-empowering, *maintenance*, *support* serta pengembangan teknologi. Selama ini tidak jarang publik lokal malas melihat media komunitas dan tv lokal karena kualitas gambarnya tidak jelas dan kalah jauh dari tv swasta nasional.

KBM INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

TV-9 Membumikan Nilai Islam Nusantara dalam Bisnis Media Lokal

Perkembangan televisi lokal komersial merupakan salah satu hasil transformasi sistem pertelevisian Indonesia (Hendrawan, 2013: 5). Televisi lokal tumbuh dan berkembang di Indonesia melengkapi

televisi jaringan yang bersiaran nasional. Menurut para pengamat media keberadaan televisi swasta merupakan langkah penting menuju sistem penyiaran yang demokratis karena adanya keberagaman kepemilikan dan keberagaman isi siaran (Silalahi, 2008;Armado,2002, Susilo, 2002, Hendrawan, 2013).

Pada awal perkembangan televisi lokal diharapkan menjadi alternatif dan menurut Hendarwan (2013) dapat menjadi penyeimbang dominasi tv swasta nasional yang berbasis di Jakarta. TV lokal seolah menjadi simbol perlawanan atas dominasi tv nasional Jakarta yang menguasai penyiaran nasional. TV lokal dengan demikian menurut Hendrawan (2013) harus menjadi medium untuk mempraktikkan identitas kultural (etnis dan agama) yang telah lama diabaikan oleh stasiun televisi nasional. Dengan berfokus pada dinamika local, tambah Hendrawan, televisi lokal dapat berkontribusi pada pembentukan ruang public dan ekonomi local.

TV-9 yang dikelola PWNU Jatim resmi beroperasi pada 31 Januari 2010 dengan mengusung *tagline* santun menyejukkan. Televisi TV-9 sebagai tv kaum santri dioperasionalkan dari Gedung Nahdlatul Ulama di Jalan Raya Darmo 96 Surabaya. TV9 menurut pengelola diharapkan dapat menjadi tv antimainstream yang ingin mengajak pemirsanya menjadikan ulama sebagai panutan dan mengajak anak muda untuk menemukan ekspresi seni dalam nikmat dan kesyahduan bershalawat dan memberi arahan keagamaan yang benar yang disampaikan oleh para kyai dan bu nyai yang berkompeten menyebarkan paham, pemikiran, dan amaliah ahlussunnah waljamaah tidak hanya dikalangan santri, tetapi juga masyarakat kota dan kelas menengah. TV9 diharapkan dapat menjadi kekuatan baru bagi gerakan dakwah islam *ahlussunnah waljamaah* dengan bertumpu pada semangat kebangsaan dan nasionalisme.

Sebagai tv dakwah TV-9 menghadapi dilema antara fungsi sosial atau fungsi korporasi. Sebagai media dakwah ia amat dekat dengan misi social religi, sementara sebagai media korporasi ia juga memiliki kewajiban untuk bisa menghasilkan keuntungan. Sebagai tahap awal pengelola mencoba untuk mendesain program yang *out of box* dengan mengusung moto sejuk dan santun, memberi bimbingan keagamaan kepada pemirsa dengan cara yang baik dan sesuai dengan kaidah amalan *ahlussunnah wal jamaah.* Program mainstream anak muda yang mengidolakan artis diarahkan untuk mengidolakan para ulama, ekspresi seni melalui shalawat. Program TV9 mencoba keluar dari prinsip sekadar menghibur tetapi menuntut dan memberi kesejukan sebagaimana prinsip *rahmatanlilalaamin.* Program disusun dengan mengusung kealamian setting tanpa ada rekayasa dan komodifikasi dan kreatif yang berlebihan sehingga program program tv 9 laksana memindahkan apa yang ada di dalam masyarakat sehari-hari kedalam layar TV secara alami apa adanya.

Program pengajian yang diberikan oleh para kiai, dibiarkan mengalir tanpa adanya intervensi dari programmer dan berjalan asli sebagaimana para kiai memberi tausiah dan pengajian. Tidak ada intervensi dan pesan apapun serta konstruksi yang disampaikan kepada para pengisi program karena TV9 sebenarnya sedang memindah saja setting dari local ke layar televisi. Program televisi ini mencoba mengusung tradisi pesantren dan tradisi islam tradisional yang selama ini dijalankan masyarakat di pedesaan.. Konsep yang diusung adalah *entertained dakwah.* Dakwah sebagai substansi dan *entertainment* sebagai cara dan pelengkap. TV9 mencoba melakukan resonansi strategi dakwah dengan jalan kultural di masa lalu dan selama ini berkembang di masyarakat.

Berikut beberapa program acara TV9 yang digali dari Konsep dakwah *salafus shalihin* dan diangkat ke layar kaca (Hakim Jayli, 2013). Program kiswah, kiswah event, nderes kitab kuning, bengkel

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

keluarga sakinah, hujjah aswaja, pernik unik, apa kata bu nyai, klinik islami, rindu makkah, khazanah, xtra kuliner, wisata religi, shollu alannabi, sinema religi, dan music indo. Konsep program ini dibuat alami dan tanpa intervensi kreatif yang berlebihan dan lebih mementingkan kepada substansi. Dalam program dakwah TV9 menggunakan konsep dasar para mubaligh NU yang menjalankan dakwahnya dengan cara menghibur dan nyaman dengan lebih menekankan aspek substansi. Program dibedain dengan santai agar tercipta familiar dan santai sebagaimana selama ini dilakukan oleh masyarakat sehari-hari.

Dalam program berita sebagaimana dipaparkan Hakim Jayli (2013) TV-9 juga menerapkan prinsip santun menyejukkan. Informasi dan berita yang disajikan jernih dan mencerahkan menjadi pertimbangan utama atas pemberitaan. TV9 mencoba menghadirkan jurnalisme kemaslahatan yakni menghadirkan pemberitaan, focus kepada perbincangan dan angle pemberitaan yang mencerahkan, memberdayakan, dan memampukan masyarakat yang diorientasikan kepada al maslahatul amah, kepentingan bersama, khususnya kaum mustad'afin. Jurnalisme kemaslahatan agak berbeda dengan cara pandang jurnalisme perang yang lebih mementingkan unsur sensasi, konflik dan pertentangan. Peristiwa dilihat secara hitam putih, pro kontra, saling hasut dan meninggalkan konflik mendalam di masyarakat dan pemirsa. Jurnalisme kemaslahatan papar Hakim (2013) tidak sekadar bermuara kepada kedamaian dengan cara damai, tetapi lebih dari itu lebih menekankan kepada terwujudnya kemaslahatan masyarakat.

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Sebagai tv religi bersegmen khusus warga NU yang berjumlah 60% dari warga Jawa Timur 37 juta maka jika TV9 mampu meraih 25 juta potensial untuk menjadi loyal viewer maka tv9 sebenarnya merupakan tv dengan basis penonton yang kuat di Jawa Timur. Dengan mengusung tradisi islam nusantara yang mementingkan

rahmat bagi umat tv9 selayaknya dikelola dengan prinsip amalan untuk membangun umat. Sudah saatnya channel tv lokal dipercayakan kepada kelompok organisasi kemasyarakatan yang sudah teruji dalam membangun umat dan dipercaya untuk membangun peradaban berbasis tradisi masyarakat.

Ruang Publik Islami Nusantara

Mewujudkan ruang publik islami yang sesungguhnya dalam media penyiaran lokal akan menjadi pintu pembuka bagi kualitas isi siaran dan kecerdasan warga (rasionalitas publik). Media harus menjadi ruang publik yang demokratis dengan memberi posisi kesetaraan antar umat. Ashadi Siregar (2003) melihat banyak tantangan untuk mewujudkan hal itu, selain menghadapi kekuasaan negara, dan pasar, juga kekuasaan kolektif sosial *(communalism).*

Dalam penjelasan Siregar (2003), kekuasaan kolektif sosial bisa membuat warga masyarakat menjadi massa yang kehilangan posisi personal, dan dikalahkan oleh homogenisasi yang berlangsung dalam komunalisme. Untuk itu, mewujudkan ruang publik harus bisa mengeliminasi 3 kekuatan tersebut. Dengan demikian dalam pandangan Siregar (2003) ruang publik termasuk dalam media diharapkan dapat menjadi zona bebas dan netral yang didalamnya berlangsung dinamika kehidupan warga secara personal, yang bersih dari kekuasaan negara, pasar, dan komunalisme dimana individu dapat berkembang pemikiran dan wawasannya secara sehat.

INDONESIA
Dilarang keras memperbanyak atau
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Melalui media komunitas dan lokal, diharapkan warga dapat berinteraksi, mendiskusikan berbagai kepentingannya secara bermartabat. Interaksi ditandai dengan posisi tawar menawar (negosiasi) personal dalam proses diskusi publik *(public discussion)* atas dasar rasionalitas dan kecerdasan, bukan atas dasar kekerasan

(kekuatan fisik dan psikis). Mengingat selama ini kekerasan dapat terjadi secara personal, institusional oleh negara, maupun komunalisme masyarakat.

Hal ini tidak hanya menyangkut kebebasan warga mendapat informasi publik serta kebebasan warga menyatakan pendapat tentang masalah publik, tetapi berlaku juga untuk media, dimana media memiliki kebebasan untuk mencari dan menyampaikan informasi kepada publik.

Masyarakat dan media komunitas harus bebas dari tekanan kekuasaan eksternal, baik dari negara maupun masyarakat (kekuasaan kapitalisme dan komunisme). Media penyiaran komunitas harus didorong untuk menjadi zona netral agar memungkinkan warga memperoleh informasi yang benar. Dengan demikian warga dapat memiliki pemikiran dan pendapat yang rasional tentang masalah publik yang aktual.

Jika tahapan itu dapat dilakukan selanjutnya maka tahap berikutnya adalah mengenalkan virtue nilai nilai islami dalam konten siaran. Nilai itu harus substantif dalam program siaran yang basis utamanya adalah kemaslahatan publik dan kebaikan publik yakni apakah itu penting bagi publik, dibutuhkan publik dan juga bisa memberi kemanfaatan bagi publik sebagai rahmat seluruh umat, semoga.

KBM INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah hasil layout ini tanpa Seijin Penerbit

Referensi

Hamad, (2004). *Konstruksi Realitas Politik dalam media Massa: Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita Berita Politik*, Granit, Jakarta

Hendrawan, Bram (2013), *Televisi Lokal: Antara Kepentingan Korporat dan Fungsi Sosial*, dalam Jurnal Komunikasi Indonesia Vol. II

No. 1 April, hal 5- 14. Departemen Komunikasi Universitas Indonesia Jakarta

Hidayat (2013) *Fundamentalisme Pasar dan konstruksi Sosial Industri Penyiaran: Kerangka Teori Mengamati Pertarungan di Sektor Penyiaran*, dalam Gazali, dkk (2013) Konstruksi Sosial Industri Penyiaran, Departemen Ilmu Komunikasi Ui Jakarta

Hidayat (2000) Pers dalam Kapitalisme Orde Baru, dalam Hidayat dkk (2000) Pers dalam Revolusi Mei, Runtuhnya sebuah hegemoni, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta

Ida, Rachmah (2010) *Media, Pasar, dan Regulasi: Dinamika Media Penyiaran Lokal Di Indonesia Pasca-Reformasi, d*alam Pengantar Buku Ekonomi Politik Media Penyiaran Lokal, Surokim, Interpena Yogyakarta.

Ida, Rachmah (2009) *Watching Indonesian Sinetron: Imagining Audience in front of Television*, Berlin: VDM Dr. Mueller Publication

Ida, Rachmah (2011) 'Reorganisation of Media Power and the Influence of Local Media Entrepreneurs in Post-Authoritarian Indonesia,' dalam Krishna Sen dan David T. Hills, *Media in the 21st Century Indonesia*, London and New York: Routledge

Kitley, Philip (2003) (Ed.) *Television, Regulation and Civil Society in Asia*, London and New York: Routledge Curzon

Sendjaja, Sasa Djuarsa (2007) *Tantangan Kebijakan Komunikasi di Era Konvergensi dan Media Baru di Indonesia*, Naskah Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Indonesia, Jakarta.

Soedibyo, Agus, (2007) *Ekonomi Politik Media Penyiaran Indonesia*, Jakarta: LkiS, Yogyakarta

Imawan, Teguh (2008) *Tayangan TV; Kematian Spiritualitas Ramadan*, Opini Jawa Pos

KBM
INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit



INDONESIA
Dilarang mengcopy atau menyebarkan naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Dilema dan Titik Balik Media Luar Ruang pada Aras Lokal: Kasus Surabaya

Rendy Pahrun Wadipalapa

Pendahuluan

Pada bulan Januari 2011 atau hanya tiga bulan setelah terpilihnya Tri Rismaharini sebagai wali kota Surabaya, konjungtur politik Surabaya berubah karena usulan *impeachment* (pemakzulan jabatan) wali kota dari DPRD Kota

Surabaya. Pokok soal yang menjadi *raison d'être* pelengseran walikota adalah produk hukum kebijakan komunikasi dalam bentuk Peraturan Walikota (Perwali) Surabaya Nomor 56 Tahun 2010 mengenai kenaikan pajak reklame dan Perwali Nomor 57 Tahun 2010 mengenai kenaikan pajak reklame di kawasan terbatas. Peristiwa ini dicatat sebagai upaya *impeachment* pertama dan serius yang lahir dari konfrontasi kebijakan komunikasi di Indonesia dan bertahan dalam rentang waktu yang sangat lama.[1] Kebijakan komunikasi yang diimplementasikan melalui dua perwali itu secara langsung bukan hanya mendisiplinkan tata-letak dan merapikan administrasi media luar ruang, melainkan juga mengatur penetapan harga baru. Implikasi dari kebijakan ini, 167 titik dari 16.012 titik reklame akan segera terkena kenaikan pajak reklame hingga Rp 120 juta per titik. Reklame tersebut berukuran di atas 50 meter persegi yang kebanyakan di jalur-jalur utama kota. Sementara 1.256 titik reklame dengan ukuran antara 8 meter persegi hingga 50 meter persegi naik antara Rp 3 juta hingga Rp10 juta per titik.[2]

INDONESIA
www.penerbitbukukita.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Jika titik tolak hitung diambil dari besaran PAD, sebelum pajak reklame dinaikkan, PAD Kota Surabaya dari sektor reklame mencapai angka Rp 8 miliar per tahun. Setelah dua Perwali ini diketuk, proyeksi PAD naik mencapai Rp 13 miliar per tahun, persentase kenaikan yang luar biasa drastis di atas 50%. Dari situ, dapat dikemukakan tiga alasan dan urgensi dari tulisan ini. *Pertama*, studi kasus atas kebijakan komunikasi media luar ruang dan kritik kebijakan atasnya, masih cukup jarang untuk diambil sebagai sebuah tema, atau jika pun ada, seringkali dikerjakan secara parsial, bukan dalam skema komprehensif, mulai regulasi, tata-

[1] Periksa M. Saleh, *Impeachment Kepala Daerah (Studi Kasus Usulan Pemberhentian Walikota Surabaya Ir. Tri Rismaharini)*, *Jurnal Narotama*, vol XI, 2012.
[2] Data didapat dari perhitungan manual peneliti berdasarkan Perwali Nomor 56 Tahun 2010 dan Perwali Nomor 57 Tahun 2010

letak, hingga substansi. Jika media Penyiaran dan media cetak memiliki UU Pers dan UU Penyiaran, serta jika media baru (internet) memiliki UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), maka media luar ruang belum memiliki UU semacam itu, sehingga tak dapat dipenuhi prasyarat *lex specialis* yang mampu memberikan detail di tingkat implementasi.

Kedua, tuntutan atas kerja ini secara teoretik senantiasa melibatkan trikotomi negara-pasar-publik, sehingga analisis atas ketiganya adalah hal yang tidak terelakkan. Beberapa referensi penelitian menunjukkan kecenderungan analisis substansi,[3] analisis arsitektur[4], serta analisis ekonomi[5]--sesuatu yang bersifat terlampau parsial untuk tema kebijakan komunikasi.

Ketiga, Surabaya menjadi kota paling riuh untuk perkara kebijakan media luar ruang, yang dipicu oleh terbitnya peraturan walikota mengenai penetapan harga baru reklame. Pengaturan media luar ruang dalam bentuk reklame di Surabaya, melibatkan konfigurasi yang cukup lengkap antara relasi negara-pasar-masyarakat sipil. Disamping lengkapnya konfigurasi aktor, Surabaya juga dipilih karena kebijakan tersebut telah menjadi wacana yang berkembang sedemikian rupa, sehingga mampu menggiring badan legislatif untuk mengusulkan pemakzulan (*impeachment*) atas walikota Surabaya, Tri Rismaharini. Sementara itu, kebijakan media luar ruang dipilih karena kebijakan ini relatif dikesampingkan dalam wacana-wacana publik, serta jarang didalami sebagai salah satu

KBM INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, menfotocopy naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

[3] Very Arwanto, *Analisis Isi Iklan Rokok pada Media Luar Ruang di Yogyakarta*, Skripsi UPN Veteran Yogyakarta, 2011.

[4] Lenandi Soetrisno Lasmono, *Perancangan Sistem Papan Reklame Tahan Angin*, Skripsi Universitas Petra Surabaya, 2010.

[5] Budiono, *Analisis Efektivitas Atas Pemungutan Pajak Reklame Sebagai Upaya Peningkatan PAD*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, 2003; Helvianti, *Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap PAD Di Kabupaten Rokan Hilir, Riau*, tesis Universitas Sumatera Utara, 2009; Dini Nurmayasari, *Analisis Penerimaan Pajak Reklame Kota Semarang*, tesis Universitas Diponegoro, 2010; Faizah Wachdin, *Pengaruh Pajak Reklame & Pajak Hiburan Terhadap PAD Kota Surabaya*, skripsi UPN Veteran Surabaya, 2010;

bentuk kebijakan komunikasi, di samping konteks komunikasi media penyiaran (elektronik), media cetak, maupun media baru (internet).[6] Berdasar latar belakang yang telah dibedah pada bagian awal, tulisan ini ingin menyasar pada pertanyaan: i). bagaimana proses kebijakan komunikasi dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 56 Tahun 2010 dan Perwali Nomor 57 Tahun 2010: ii). bagaimana dinamika proses kebijakan Perwali Surabaya Nomor 56 Tahun 2010 dan Perwali Nomor 57 Tahun 2010.

Regulasi Media Luar Ruang: Komparasi Luar dan Dalam Negeri

Penelusuran pertama peneliti dapat dari telaah Aragonès & Sánchez, yang mengelaborasi bahwa di Porto Alegre, kemenangan pemilu Partai Buruh dalam pemilihan umum wali kota telah memberikan titik pijak yang sangat penting bagi kebijakan media luar ruang ketika transparansi sudah mulai diperkenalkan dan diperkuat[7]. Pada masa kemenangan tersebut, partai mengusung metode penentuan anggaran publik secara partisipatif yang mulai diterapkan sejak 1989. Sejak itu, metode ini meluas dan diadaptasi ke lebih dari 190 kota dan beberapa negara. Ini merupakan koreksi atas pendekatan sebelumnya yang memutuskan sesuatu di belakang pintu oleh segelintir orang, tanpa pengetahuan warga masyarakat. Implikasinya, peraturan proteksi atas ruang publik dari media-media liar membuahkan hasil yang memuaskan. Politik yang melibatkan partisipasi berhasil menghasilkan masyarakat sipil yang kuat yang mampu menciptakan situasi saling kontrol, termasuk dalam kebijakan ekstrim membebaskan seluruh ruang

www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras mencetak naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

[6] Lihat Ulasan Cabe. (2006). *Green Space Strategies: A Good Practice Guide. London: Commission for Architecture and The Built Environment*.; Cabe. (2010). *Urban Green Nation: Building The Evidence Base. London: Commission for Architecture and The Built Environment*.

[7] Aragonès, Enriqueta., Sánchez., Santiago, (2004). *A Model Of Participatory Democracy: Understanding The Case Of Porto Alegre* September PAC Project, European Commission

kota dari iklan media luar ruang[8]. Agak mirip dengan Porto Alegre adalah apa yang terjadi pada Sao Paulo. Gilberto Kassab, wali kota Sao Paulo, berani membayangkan kota yang ia pimpin yang bebas iklan luar ruang. Ia membuat peraturan radikal pada tahun 2006 bernama *Lei Cidade Limpa* (peraturan kota bersih) yang melarang keberadaan segala iklan luar ruang — termasuk pembagian pamflet di jalan.[9] Bagi Gilberto, peperangan melawan polusi adalah keniscayaan, dan ia ingin memulai dari yang paling mencolok, yaitu polusi visual. Dewan perwakilan kota menyetujui ide Gilberto. Pada awal tahun 2007, aturan itu betul-betul dijalankan. Dalam lima tahun, 15.000 reklame dan 1.600 papan toko diturunkan. Sao Paulo menjadi kota yang berbeda sama sekali. Rumah-rumah yang tadinya tertutupi reklame kini menampakkan wajah aslinya. Tak heran 70 persen warga kota sepakat bila aturan ini dilanjutkan.[10] Detail peraturan bernomor PL 379/06 ini awalnya diprediksi akan menyebabkan kerugian (*potential loss*) hingga 133 juta US Dollar, disamping akan mengancam pengangguran 20.000 pegawai media luar ruang disana.[11] Dengan sanksi perdata hingga 4.500 US Dollar per hari, kebijakan ini berjalan efektif.

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Hong Kong memberikan tafsir lain yang menarik. Salah satu usaha pemerintah Hong Kong dalam memulai optimalisasi ruang publik adalah dengan menerapkan *public-private partnership*. Pemerintah Hong Kong memberikan insentif bonus luas lantai tambahan vertikal bagi pihak privat yang menyediakan ruang publik di lahan propertinya. Bonus luas lantai tambahan ini bisa mencapai 5 kali

---

8 Terence Wood & Warwick E. Murray, "Participatory Democracy In Brazil And Local Geographies: Porto Alegre And Belo Horizonte Compared", *European Review of Latin American and Caribbean Studies* 83, October 2007, 19-41

9 The Economist, "Visual pollution", Oct 11 2007

10 Robin Hartanto, Mimpi Jakarta Tanpa Papan Reklame, diakses dari http://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/mimpi-jakarta-tanpa-papan-reklame-072355767.html. Terakhir diakses pada 22/05/13.

11 Patrick Burgoyne, "Sao Paulo: The City that Said No to Advertising", Businesweek, June 18 2007.

lipat dari ruang publik yang diberikan oleh pihak properti yang bersangkutan. Ruang yang kemudian banyak dikenal sebagai *Privately Owned Public Space* (POPS) atau *Privately Owned Public Open Space* (POPOS) banyak terlihat di area urban Hong Kong. Istilah "*Privately Owned Public Space*" sendiri diperkenalkan di New York pada tahun 1960, istilah ini mengandung dua makna yang secara hakikat bertentangan[12]:

> *"Privately Owned" refers to the legal status of the land and/or building on or in which the public space is located. Owners would continue to control overall access and use of their private property and the public as a whole could not secure rights of access and use without the owner's express permission. Thus, it is a "Public Space" rather than a public property in this case since it is not owned by the city.*
>
> *"Public Space" means a physical place located on private property to which the owner has granted legally binding rights of access and use to members of the public. Ownership continues to reside with the private owner, public space may be thought of as an easement held by the public on the owner's property.*

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, menyalin atau menyebarkan hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Lebih lanjut lagi, Kayden menyampaikan bahwa penemuan regulasi ini telah meningkatkan kesadaran warga dalam ruang publik, membatasi intervensi pasar, dan memperluas lalu-lintas diskursus publik. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ruang publik yang terintegrasi dengan pembangunan demi menyediakan pengalaman penjalan kaki yang lebih baik. Moda perencanaan ini mendukung kerjasama antara sektor publik dan privat. Dengan demikian, persoalan tata-kelola media luar ruang, terselesaikan dengan sendirinya. Pengaturan dan manajemen ruang publik yang

[12] Kayden, *op., cit.,* hlm 30

baik telah membuat proteksi untuk dirinya sendiri, terutama dari persoalan-persoalan kesemrawutan.

Pemerintah United Kingdom memberikan perspektif lainnya dengan menempatkan komisi independen dengan kewenangan spesifik guna melindungi ruang publik. Di UK, *Commission for Architecture and the Built Environment* atau lebih dikenal dengan CABE hadir sebagai komisi independen yang memberikan solusi kepada pemerintah dan penilaian terhadap perancangan desain arsitektur untuk melindungi ruang publik. Tujuh puluh persen dari pemerintah lokal di UK berjalan seirama dengan solusi desain dari CABE. Dengan kata lain, langkah afirmasi perlindungan ruang publik dan tata kelola media luar ruang sudah terangkum pada masing-masing regional yang mengimplementasikan rekomendasi CABE.

Pemerintah London juga rajin merangsang secara intensif penyelenggaran ruang hijau melalui beberapa program seperti *Great Spaces Design*[13]. Melalui program ini, *London's boroughs* (bisa dianalogikan seperti kota administratif jika di Indonesia) dirangsang untuk meningkatkan kualitas ruang hijau di distrik masing-masing bekerjasama dengan agen pemerintah *Design for London* dan *London Development Agency*. Aspek estetik menjadi poin kunci, sehingga segala macam gangguan lainnya (media liar), akan ditindak.

Jika disederhanakan, maka pendekatan tiga wilayah dalam kebijakan media luar ruang dapat disarikan dalam matriks berikut:

www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

[13] A. Madanipour, "Marginal Public Spaces In European Cities" dalam A. Madanipour, *Whose Public Space? International Case Studies In Urban Design And Development*.(Oxon: Routledge: 2010) hlm. 31-50.

Pendekatan Kebijakan Media Luar Ruang			Sub-Metode
Porto Alegre-SaoPaulo	♦ Partisipasi publik ♦ Transparansi Keuangan	– Koreksi politik status quo dengan orientasi demokrasi ekonomi – Pusat perubahan berada pada dimensi pergantian faksi dalam rezim	– Partisipasi anggaran untuk ruang publik
Hong Kong	♦ POPS-POPOS	– Kerjasama antara sektor publik dan privat – Meningkatkan kesadaran warga dalam ruang publik, membatasi intervensi pasar, dan memperluas lalu-lintas diskursus publik	– Insentif Bonus
UK	♦ Komisi/badan/agensi khusus	– Penciptaan agensi/badan/komisi khusus yang berwenang mengatur media luar ruang – Program dan insentif ruang hijau	– Desentralisasi kewenangan komisi ketingkat distrik.

KBM INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah hasil layout ini tanpa izin Penerbit

Dalam konteks Indonesia, kebijakan media luar ruang berpusat pada perhitungan pajak reklame. Bila dilihat dari kontribusinya bagi pajak daerah, pajak reklame merupakan komponen ekonomi yang sedemikian pentingnya bagi pendapatan daerah yang berpotensi dan ditujukan langsung kepada usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pemasukan dari pajak reklame didapat dari nilai sewa reklame yang dipasang dengan tarif sewa reklame berdasarkan dari lokasi pemasangan reklame, lamanya pemasangan reklame, dan jenis ukuran reklame.[14] Pihak-pihak yang menggunakan jasa reklame dari bidang pendidikan, industri, perhotelan, hiburan, bank-bank dan lembaga keuangan, transportasi, komunikasi dan pihak pemerintah. Pajak Reklame adalah pungutan yang dikenakan terhadap penyelenggaraan reklame.[15] Pajak Reklame dikenakan dengan alasan bahwa reklame dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau menyajikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

KSM INDONESIA
www.penerbitbukumuran.com
Dilarang keras, mencetak naskah

Selain konsentrasi peraturan yang lebih tersedot ke ranah ekonomi dalam bentuk pajak/retribusi, regulasi media luar ruang di Indonesia juga sangat bergantung dengan peraturan lainnya. Ketiadaan regulasi yang spesifik dan komprehensif menciptakan kesulitan-kesulitan interpretatif dalam membaca fenomena media luar ruang di luar apa yang telah diatur dalam Perda/Perwali mengenai reklame. Maka, ketergantungan pada peraturan lain menjadi tak terhindari, oleh karena memang independensi regulasi reklame dan media luar ruang tidak *clear* sejak awal.

Terhadap bagaimana tata letak reklame, peraturan yang mengatur hal ini bukan secara spesifik memasukkan variabel reklame sebagai

[14] Marihot P Siahaan, *Pajak Dan Retribusi Daerah*, (Raja Grafindo Persada Jakarta: 2005) Hlm..35.
[15] Ibid.

tema regulasi, melainkan melalui peraturan lain semisal Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.34/2006 tentang jalan serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/PRT/M/2010, tentang pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan. Zonasi pemasangan dan tata letaknya selalu berhubungan dengan peraturan lain yang secara tematik beririsan, tetapi tidak secara khusus mengatur tentang reklame sebagai media luar ruang.[16] Perhitungan atas zonasi itu juga secara ekonomi memiliki logika yang sama sebagaimana zonasi atas hal lain, semisal SPBU dan bangunan komersial lainnya.

Peristiwa ini secara teoretik menguatkan kekosongan peraturan dan kerancuan implementasi peraturan media luar ruang, yang menyangkut bukan hanya banyak hal melainkan banyak divisi. Konsekuensi teknisnya, dinas yang secara tematik tidak memiliki hubungan dengan media, dapat berurusan dan terlibat intens dalam pengaturan media luar ruang. Jika diringkas dari peraturan menteri, peraturan pemerintah, perda, dan undang-undang mengenai media luar ruang, kebijakan media luar ruang memberikan irisan demikian banyak dari peran dinas-dinas yang bersangkutan. Instansi tersebut antara lain: i). Dinas Tata Kota; ii). Dinas pengawasan dan pembangunan kota; iii). Dinas Pertamanan; iv). Dinas Pekerjaan Umum; v). Dinas Kebersihan; vi). Dinas Pendapatan Daerah; vii). Biro Ketertiban Umum.

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras mengetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Reklame, Privatisasi Media & Ruang Publik Komunikasi

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-

[16] Bisnis Indonesia, 1 April 2010.

besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu pajak daerah yang dapat memberikan pendapatan kepada daerahnya adalah Pajak Reklame. Pajak itu adalah bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yakni penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Logika privatisasi juga muncul dalam tahap ini. Dominasi perusahaan-perusahaan tertentu (yang beberapa kepentingannya sudah diurai dalam latar belakang penelitian ini), telah mendominasi pula *public space*. Soal ini menjadi ancaman serius atas netralitas ruang publik dari kepentingan ekonomi-politik, kapitalisasi, dan sebagainya. Tren menuju privatisasi telah mengubah forum kehidupan ruang publik. Kota telah menjadi serangkaian kantong-kantong pribadi secara ekonomi dan melakukan segregasi sosial. Istilah-istilah seperti publik dan privat sarat dengan asosiasi ambigu dan konotasi moral yang sulit dihindari. Untuk tujuan kita, *public space* adalah ikatan kerumunan terkait sebagai lawan obligasi *privat space* antara keluarga dan relasi perkawanan. Dengan demikian, ruang publik adalah forum di mana kehidupan publik berlangsung. Keseimbangan antara ranah publik dan swasta telah bergeser jauh, dan telah menciptakan muasal privatisasi yang serius atas kehidupan publik. Penekanan pada ranah publik memuncak pada abad ke-18 dengan munculnya kaum borjuis di London dan Paris.

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Tiap ruang dalam kota diberi nilainya secara ekonomis, dan diberlakukan kategorisasi sedemikian rupa sehingga hanya kelompok tertentulah yang mampu menguasainya. Oligarki kekuasaan atas ruang kota, telah menjelma menjadi privatisasi atas ruang, dan pada gilirannya, privatisasi atas media luar ruang. Kota menjadi begitu ekonomis dan memberlakukan standar diskriminatif ekonomi. Taktik dalam melakukan strategi ekonomi atas ruang adalah menggunakan dana publik untuk perusahaan

pribadi (misalnya agen periklanan media luar ruang), menjual harta benda publik dan pelayanan kepada kelompok swasta oleh pemerintah lokal, menggunakan peraturan zonasi eksklusif dan sebagainya. Keputusan seperti yang disebutkan sebelumnya membentuk ruang publik dan dikendalikan oleh kebijakan publik yang mendorong privatisasi.

Kerangka pikir atas kebijakan media luar ruang bukan hanya membutuhkan landas tumpu teoritik yang memadai atas kebijakan dan hubungannya dengan ekonomi politik itu sendiri, melainkan juga dibutuhkan elaborasi atas bagaimana media luar ruang memainkan peran dalam ruang publik, serta bagaimana kebijakan atasnya dimungkinkan ada. Dalam perspektif yang agak lentur dan berorientasi pada lokasi, sebuah ruang publik yang baik harus memperhatikan empat faktor utama yakni: (i) Akses dan *linkage*; (ii) tujuan dan aktivitas, (iii) kenyamanan dan tampilan, dan (iv) keramahan.[17] Dinyatakan juga jika ada tiga kualitas yang menentukan relativitas 'ke-publik-an' suatu ruang yakni kepemilikan fungsi, akses dan kegunaan. Selama memiliki kepemilikan fungsi yang netral, dapat diakses oleh publik dan digunakan secara bersama-sama oleh individu atau kelompok yang berbeda, maka dapat dikategorikan sebagai ruang publik.

KBM INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Ruang publik dan perancangan kota berkaitan dengan tanggapan inderawi manusia terhadap lingkungan fisik kota dan alam komunikatif: penampilan visual, kualitas estetika, dan karakter spasial. Konsep perancangan kota haruslah mengenali dan

[17] Pengertian ruang publik (*public spaces*) tidak secara filsafati dirujuk dari karya-karya seminal Jurgen Habermas mengenai ruang publik (*public spheres*) atau ruang publik politis Hannah Arendt, melainkan karena kepentingan praktis dalam melihat demikian condongnya penelitian-penelitian terdahulu menempatkan media luar ruang dalam hubungannya dengan ruang, tata ruang, atau yang secara formal disebut sebagai kebijakan tata ruang (lihat pada bagian latar belakang masalah). Terhadap hal ini, periksa Carmona, Tisdell, Heath, & Oc, (2010). *Public Spaces Urban Spaces: The Dimensions Of Urban Design* (2nd Ed.). Oxford: Elsevier.

menunjang elemen-elemen visual utama kota dengan meningkatkan kualitas estetika.[18]Ruang publik dideskripsikan sebagai suatu sistem kompleks berkaitan dengan segala bagian bangunan dan lingkungan alam yang dapat diakses dengan gratis oleh publik yang meliputi: jalan, *square*, lapangan, ruang terbuka hijau, atau ruang privat yang memiliki keterbukaan dan kemudahan aksesibilitas untuk publik. Sementara itu, secara lebih spesifik Marker mengutarakan tentang empat kualitas yang harus dimiliki ruang publik, akses fisik, akses sosial, akses kepada aktivitas dan diskusi atau interkoneksi dan akses kepada informasi. Keempat kualitas inilah yang tampaknya mendefinisikan kekuatan demokrasi dari sebuah ruang publik dan hubungannya dengan media luar ruang[19].

Seperti pendapat Marker, dalam kondisi kontemporer, persoalan media luar ruang dalam desain *public spaces* sering kali mengalami ketersembunyian agenda yang mendahulukan kepentingan ekonomi dari kebutuhan sosial.[20] Agenda kebutuhan dan hak publik atas komposisi ideal antara media luar ruang dan dunia sosial yang ditinggali, tentu saja tidak dapat dengan mudah menemukan irisannya dengan prinsip ekonomi yang selalu mengkonversikan segala sesuatu dengan nilai jual dan margin laba. Disinilah urgensi dalam melihat undang-undang sebagai titik tolak dibutuhkan. Regulasi diasumsikan menjamin dan mengatur hak publik, mengantisipasi risiko yang ada, dan meningkatkan pengelolaan yang seimbang antara kepentingan negara, pasar dan publik dalam konteks media luar ruang. Kualitas demokrasi, tipikal rezim, kapasitas SDM dan produk kebijakan negara yang

[18]Mellvile C. Branch, 1996. *Perencanaan Kota Komprehensif*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

[19] Blaine Merker, "Taking Place - Rebar's Absurd Tactics In Generous Urbanism" dalam J. Hou, *Insurgent Public Space - Guerilla Urbanism And The Remaking Of Contemporary Cities* (Oxon, Routledge: 2010) Hlm. 45-58

[20] Ibid.

bervariasi, pada akhirnya harus ditelisik dengan cara yang agak berbeda. Pencarian kebijakan ideal dapat dilakukan, tapi tidak terlalu bisa dipandang penting sebelum model ideal dan sintesa kebijakan ideal tersebut ditemukan referensinya.[21]

Surabaya: Anomali dan/atau Terobosan?

Dalam perencanaan awal, pembahasan, hingga perumusan akhir dari desain Perwali 56 dan 57, satu-satunya SKPD yang memegang kendali paling dominan adalah Dinas Pendapatan. Sementara divisi lainnya tidak dilibatkan, misalnya divisi hukum yang memeriksa logika peraturan, atau tiga asisten utama yang semestinya memahami secara rinci konteks substansi dari desain tersebut. Bahkan, masih menurut Suharto, bagian hukum diperkecil perannya dengan hanya memperbaiki redaksi atau bahasa hukum pada teks peraturan walikota. Menurut SOP, semestinya bagian hukum berperan penting dalam melakukan kajian hukum dari suatu peraturan sekaligus menguji logikanya.

INDONESIA
www.penerbitakademika.com
Dilarang keras mencetak naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Maka, tampak sekali jika keterpusatan pembahasan kepada dominasi Dinas Pendapatan, sedikit banyak mengkonfirmasi hipotesis riset ini: bahwa peraturan walikota media luar ruang seringkali memang mengacu pada acuan tunggal peraturan yang bersifat ekonomistis, yakni UU no. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah. Meski jika dilihat konsiderans Perwali 56 dan 57 yang memuat demikian banyak Undang-undang dan peraturan sebelumnya, tetapi keterpusatan pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tetap tak dapat dinafikan. UU no. 28 tahun 2009 membahas secara spesifik media luar ruang dalam hubungannya dengan pajak daerah, dimana reklame dilihat sebagai medium kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang

[21] J. S Kayden, 2000. *Privately Owned Public Space: The New York City Experience*. New York: John Wiley And Sons, Inc.

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam perspektif Pemerintah Kota Surabaya, ada empat hal pokok yang dikemukakan sebagai argumen utama disusunnya Perwali 56 dan 57. *Pertama*, konstruksi media luar ruang tidak layak dan selanjutnya berisiko tinggi membahayakan keselamatan. *Kedua*, media luar ruang mengeksploitasi penggunaan jalan, badan jalan dan menyudutkan publik sehingga berkurangnya ruang. *Ketiga*, iklan-iklan media luar ruang dinilai sebagai sampah visual yang mengotori lingkungan publik sehingga memerlukan penataan. *Keempat*, jika lokasinya keliru, risiko kecelakaan akan tinggi karena reklame dapat mengalihkan perhatian pengendara dan pengguna jalan.

Dari sektor legislatif, Partai Golkar merupakan satu-satunya partai yang resisten atas kebijakan media luar ruang Surabaya melalui Perwali 56 dan 57, sekaligus tetap berada pada jalur pemakzulan tanpa berubah mulai dari awal hingga akhir, kendati partai lain telah berubah haluan. Eddie Budi Prabowo yang sebelumnya juga mengemukakan bahwa partainya tetap konsisten atas oposisi kebijakan terhadap walikota Surabaya, membeberkan beberapa alasan kenapa kemudian manuver-manuver politik yang dilakukan oleh elite-elite partai menjadi berubah 180%. Argumen disusun dari level makro hingga mikro. Secara makro, politik kebijakan saat ini dipegang oleh *ruling party*—dalam konteks masa itu sedang dikuasai oleh partai Demokrat, baik di tingkatan eksekutif nasional maupun legislatif, dan tentu saja kekuatan legislatif tingkat II Surabaya. Berubahnya sikap yang ditunjukkan oleh partai Demokrat sebagai kekuatan yang hampir menguasai lembaga-lembaga pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif di berbagai daerah, merupakan antisipasi supaya dampak yang ditimbulkan

dari oposisi kebijakan dan dukungan pemakzulan terhadap walikota Surabaya tidak merembet ke daerah lain. Dalam jangka panjang, diskursus ini dihalangi agar tidak mengkristal dan menjadi logika umum yang dapat dipakai untuk melihat, memeriksa, mendorong, Hal ini menjadi efek domino yang dilihat berbahaya andai diteruskan, selain inkonstitusional, juga menyumbang pandangan subversi politik yang boleh jadi menular dan menjadi senjata makan tuan bagi eksekutif partai Demokrat di pelbagai daerah.

Latar belakang kenapa kemudian Gubernur Jatim, Soekarwo, mengirimkan surat keputusan kepada DPRD Surabaya untuk memberhentikan pemakzulan terhadap walikota Risma, merupakan salah satu upaya guna mengantisipasi efek domino tersebut. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi sikap DPP dan DPD Demokrat yang bahkan mengambil tindakan tindakan tegas dengan memberikan sanksi kepada anggota legislatif dari partai tersebut, dan bahkan, Wisnu Wardhana yang sebelumnya merupakan ketua DPC Demokrat, kemudian dicopot dari jabatannya. Partai, dalam perspektif pemerintah kota Surabaya, dengan demikian dianggap tidak memiliki kepentingan apapun dalam resistensi kebijakan, apalagi dalam rangka pemakzulan walikota tersebut. Lebih jauh, ketakutan atas efek domino yang akan terjadi jika resistensi kebijakan ini berlanjut hingga pemakzulan tersebut benar-benar terwujud, adalah semata-mata perkara partai, yang dibaca oleh Demokrat sebagai risiko besar politik di masa depan. Pada bagian ini, maka beberapa poin penting dapat direfleksikan lebih lanjut, sebagai berikut:

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin penerbit

Pertama, dari penelitian tampak terang jika proyeksi, perhitungan dan matematika target PAD dan realisasi pajak reklame, menjadi alasan utama yang mendasari gagasan pembentukan Perwali di atas. Dari sini, tampak jika prioritas utama dari Pemerintah Kota Surabaya dalam menyusun Perwali 56 dan 57 adalah kepentingan

ekonomi belaka. Klaim dan argumen bahwa dua Perwali tersebut adalah untuk penataan ruang publik kota, seketika gugur.

Kedua, jika motif ekonomi menjadi menu utamanya, maka kebijakan media luar ruang lewat peraturan walikota 56 dan 57 tidak mampu menciptakan ruang publik komunikasi. Tidak ada panduan dalam menerapkan upaya *upgrading* estetika visual, disamping juga kontrol atas penempatannya. Alih-alih demikian, lembaga eksekutif atau Pemerintah Kota Surabaya justru berperan sebagai pihak yang paling berkepentingan untuk mengamankan target capaian PAD dari media luar ruang melalui dua instrumen legal formalnya, yakni Perwali 56 dan 57. Sementara itu, legislatif DPRD Kota Surabaya yang dilangkahi hak dan posisinya sebagai partner pembahas peraturan walikota, melakukan pukulan balik dengan kepentingan utama melindungi partner bisnis—selain bahwa inti pimpinan DPRD Kota adalah bagian dari pengusaha reklame itu sendiri. Temuan ini memperlihatkan demikian kuatnya prioritas ekonomi tersebut, sehingga menciptakan konsekuensi ekonomi-politik dan konfigurasi peran dan posisi dari masing-masing aktor di Kota Surabaya.

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah

Ketiga, tidak ada perdebatan, pembahasan, atau materi penjelasan yang cukup rigid mengenai elemen-elemen komunikasi (substansi/konten iklan, estetika visual iklan) maupun kelayakan konstruksi dan verifikasi atas konstruksi reklame dalam penyusunan Perwali 56 dan 57, seperti yang sejak awal diklaim oleh Walikota Tri Rismaharini sendiri. Hal ini sangat penting, jika dalam banyak peristiwa dapat dilihat kecelakaan atau runtuhnya papan reklame, tiang, dan material reklame sebagai akibat lemahnya konstruksi. Kerugian publik dan risiko yang lebih besar adalah hal-hal yang tidak diperhitungkan oleh negara. Dengan demikian, persoalan yang mengemuka dalam penyusunan Perwali 56 dan 57, serta dalam pembahasan sekaligus dinamika yang menyertainya, bukanlah problem administratif belaka, melainkan problem

ekonomi politik kebijakan komunikasi. Unsur-unsur ekonomi politik tampak dari upaya negara lewat Pemkot Surabaya dalam mengelola media luar ruang dalam logika ekonomi, peran aktif infiltrasi kepentingan pengusaha lewat DPRD Kota, serta dinamikanya kepentingan publik disana.

Keempat, penulis juga menemukan jika beberapa langkah penyusunan dan perencanaan desain Perwali 56 dan 57 diabaikan begitu saja. Konsolidasi antar SKPD yang berkepentingan tidak tercapai, koordinasi dengan sektor pengusaha tidak dikerjakan, dan publik/masyarakat sipil tidak memiliki posisi apapun atau dimintai pertimbangan apapun dalam penyusunan dua Perwali tersebut. Melencengnya orientasi penyusunan Perwali 56 dan 57 kota Surabaya dari yang publik-sentris menjadi ekonomi-sentris, dimungkinkan melalui celah dilema administratif.

Kelima, pada satu sisi, pengusaha menaruh apresiasi atas niat Walikota Surabaya melalui dua Perwali ini. Kadin melihat bahwa kepastian tarif reklame dan keputusan dalam memberi zonasi tarif reklame di kawasan-kawasan tertentu, adalah terobosan kebijakan yang penting untuk memotong jalur pungutan liar, korupsi dan nepotisme dalam kebijakan media luar ruang. Dengan nominal yang besar, media luar ruang menjadi arena kontestasi untuk menyedot jalur uang yang mengalir di sana. Tetapi di sisi lain, pengusaha reklame besar justru melihat sebaliknya: adanya kepentingan kapital yang terancam. Pembelahan lain juga terjadi pada tubuh eksekutif. Keterlibatan yang intens dari satu SKPD (Dinas Pendapatan) dan mengabaikan yang lainnya, termasuk pejabat strata atas setara Asisten Walikota, menunjukkan dua kepentingan yang berbeda untuk satu perkara yang sama. Ringkas kata, terjadi pembelahan aktor dan kepentingan dalam penyusunan kebijakan media luar ruang Surabaya.

Keenam, dalam peta konfigurasi aktor, secara makro, politik kebijakan media luar ruang selain dipegang total oleh Pemkot Surabaya melalui Dinas Pendapatan, DPRD Kota juga menyiratkan kepentingan yang demikian mendalam. Politik kebijakan pada konteks Perwali 56 dan 57 paling kental dipegang oleh *ruling party*—partai Demokrat, baik di tingkatan eksekutif nasional maupun legislatif, dan tentu saja kekuatan legislatif tingkat II Surabaya. Manuver dan berubahnya sikap fraksi di DPRD sangat mengganggu implementasi dua Perwali ini, meski kemudian koordinasi partai di pusat kekuasaan menginstruksikan agar pemakzulan dibatalkan. Tetapi poin pentingnya, partai-partai di taraf lokal adalah kekuatan yang hampir menguasai lembaga-lembaga pemerintahan dan mempengaruhinya.

Ketujuh, pemahaman kembali ruang publik sebagai ruang bersama yang bermanfaat bagi semua dapat berdampak pada kembalinya kata "publik" yang selama ini hilang dari wacana perkotaaan kota Surabaya. Demokratisasi ruang merupakan bentuk negosiasi warga kota terhadap praktik eksploitasi ruang kota Surabaya untuk kepentingan iklan semata. Demokratisasi ini bertujuan untuk memposisikan kepentingan warga akan ruang kota yang bersih dan indah secara visual, lebih penting dari kepentingan ekonomi semata. Mekanisme pembuatan kebijakan media luar ruang yang berlaku di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini, menurut hemat penulis, tidak jauh berbeda dengan yang telah dibakukan oleh pemerintah Orde Baru. Tidak bisa diingkari bahwa, semenjak diberlakukannya UU 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, di sana sini telah terjadi pencairan pola baku Orde Baru. Munculnya aktor-aktor baru penentu kebijakan publik tingkat lokal pada saat mana dirinya memiliki kewenangan sangat luas, telah membuka peluang untuk mencairkan pola baku mekanisme pembuatan kebijakan publik. Masing-masing daerah memiliki caranya sendiri dalam memodifikasi pola tersebut,

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

termasuk kota Surabaya dan diantara mereka sebetulnya saling belajar bagaimana mengembangkan proses kebijakan yang lebih partisipatif. Sungguhpun demikian, ada beberapa catatan penting.

Perubahan-perubahan tersebut di atas lebih terlihat dalam bentuk inovasi atau terobosan pada level perorangan. Faktor Tri Rismaharini sebagai walikota Surabaya, misalnya, membuat arah kebijakan media luar ruang bergeser secara signifikan. Artinya, kalau nantinya posisi penentu kebijakan ini pindah ke tangan pejabat lain (baik di eksekutif maupun legislatif) tidak ada jaminan inovasi ini akan dilanjutkan akan terbakukan sebagai konvensi yang terlembaga. Acuan dasar (yuridis formal) yang ada maupun rujukan teoritisnya tidak banyak bergeser. Selain itu secara teoritis maupun empiris kebijakan media luar ruang selama ini dibayangkan sebagai proses internal organisasi pemerintahan (dalam lingkup eksekutif dan legislatif). Masih bercokolnya bayangan ini sebetulnya adalah pertanda masih hidupnya mekanisme di masa lalu. Lebih dari itu, penentuan kebijakan tidak jarang dipahami sebagai penggunaan hak khusus dari seorang pejabat penyelenggara kekuasaan negara, bukan amanat rakyat yang harus ditunaikan. Partisipasi diberikan tidak demi partisipasi itu sendiri, namun demi kesuksesan agenda-agenda pejabat.

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Hal lain yang harus diingat, ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pembuatan kebijakan media luar ruang, sejak dulu tidak mengalami perubahan mendasar. Mengenai perumusan dan paradigma kebijakan komunikasi yang lebih ideal, belum dimasukkan sebagai instrumen baru. Dari segi aktor yang memiliki posisi dan peran dalam konstelasi kebijakan media luar ruang ini, juga tidak bergerak ke manapun, dengan tetap mengangkat elite-elite politik, baik dari legislatif maupun eksekutif. Apalagi, peran aktif pengusaha reklame semakin kuat dan besar karena koalisinya yang aktif dengan elite-elite politik. Mereka memotori proses *agenda setting* dalam dinamika kebijakan komunikasi. Dalam rangka

pengkondisian dan sekaligus *agenda setting* ini mereka melakukan pendekatan terhadap figur-figur kunci yang nantinya menentukan proses legislasi. Karena hal-hal tersebut di atas, pelembagaan proses kebijakan komunikasi media luar ruang yang partisipatif, saat ini masih bercokol dalam statusnya sebagai agenda kebijakan itu sendiri, meskipun aspirasi ke arah itu sudah lama disuarakan.

Seperti yang telah didiskusikan dalam uraian-uraian di atas, perlu dirancang sebuah model untuk menjembatani silang-pengaruh kepentingan dan aktor, agar tetap dalam koridor kebijakan komunikasi yang ideal. Media luar ruang telah terbukti menjadi arena kontestasi antar kepentingan yang pada gilirannya telah meminggirkan cita-cita ideal ruang publik komunikatif dan estetika visual dari sebuah kota. Sebagai fungsi regulator, memang sahih andai dikatakan negara berhak dan memiliki wewenang mengatur kebijakan media, tetapi keseimbangan kepentingan negara dengan kepentingan publik tidak pernah dapat dijaga secara proporsional. Pada tahap ini, fungsi negara menjadi vital untuk merumuskan kebijakan media luar ruang yang tidak dominatif dan tetap berangkat dari sudut pandang ideal keilmuan komunikasi.

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah

Guna lebih memudahkan, periksa bagan alur berikut:

Perspektif Ruang Publik Komunikasi

Draft Final

Pemerintah Lokal

Kontrol dan pembahasan SKPD

Hasil: Draft Nol

Pembahasan bersama Stakeholder:

1. **Publik (komunitas, warga, NGO)**
2. **Pengusaha**
3. **Biro reklame**
4. **Pakar**

Konsultasi bersama Legislatif

Pengesahan & Implementasi

Evaluasi & Koreksi Kebijakan

Model di atas menekankan pada dua hal utama: pertama, diambilnya perspektif ruang publik komunikasi sebagai tiang pancang utama dari kebijakan, dan kedua, aksentuasi pada partisipasi. Ruang publik komunikasi tidak pernah dapat diwujudkan bukan karena ia utopis, melainkan karena secara sengaja tidak dipakai sebagai sudut pandang pengambilan kebijakan komunikasi. Perwali 56 dan 57 setidaknya merefleksikan hal ini. Kecenderungan eksekutif mengambil perspektif ekonomi dalam kebijakan media luar ruang secara langsung mempengaruhi kualitas kebijakan itu ditinjau dari elemen-elemen komunikatif: keterbukaan, kenyamanan, estetika bagi publik. Sementara itu, 'partisipasi' selama ini diterjemahkan secara simplistis sebagai 'peran serta' atau 'keikutsertaan'. Konotasi paling populer, partisipasi adalah keikutsertaan untuk membicarakan agenda yang telah dipatok oleh pemerintah. Secara politis, partisipasi perlu dimaknai sebagai keikutsertaan untuk ikut ambil bagian, dalam kapasitasnya sebagai warga negara. Jelasnya, keikutsertaan yang dilakukan bukan hanya dalam mengiyakan ataupun menolak proposal kebijakan pemerintah, namun juga mengusulkan adanya kebijakan tertentu kalau hal itu memang diperlukan, sekalipun belum disiapkan oleh pemerintah. Maka, menjadi perlu ditegaskan bahwa kata "partisipasi" tidak harus dikaitkan dengan keikutsertaan terhadap agenda pemerintah.

KPM INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak haskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Sebagaimana diperlihatkan dalam bagan model di atas, elemen partisipasi harus muncul sejak pembahasan rancangan sebuah kebijakan media luar ruang. Eksponen publik harus ditempatkan secara proaktif dalam berpartisipasi dalam perancangan kebijakan. Partisipasi adalah hak politik yang sebetulnya sudah dijamin dalam

berbagai ketentuan perundang-undangan, namun jaminan itu tidak pernah dirumuskan secara operasional. Sehubungan dengan hal itu, maka partisipasi justru harus dituntut, dan komunitas yang terlibat dalam advokasi kebijakan komunikasi menuntutnya dalam bentuk jaminan dalam format yang lebih operasional.

Kesimpulan & Saran

Tawaran terhadap tolak tarik media luar ruang ini adalah, *pertama*, merevisi atau bahkan membuat peraturan *lex specialis* yang jelas bagi media luar ruang. Keadaan ini demikian mendesak, mengingat ketiadaan payung peraturan dalam penyusunan peraturan ihwal media luar ruang di tingkat lokal. *Kedua*, memberikan panduan terpusat mengenai wilayah dan wewenang aktor-aktor di tingkat lokal dalam perumusan peraturan media luar ruang. Intervensi dan penetrasi yang terlalu dominan dari satu SKPD atau divisi dibanding yang lainnya, membuktikan diperlukannya pemisahan yang tegas hak dan kewajiban masing-masing aktor. Hal ini dapat dikerjakan oleh pemerintah pusat.

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Ketiga, membatasi perspektif PAD-sentris dengan mengutamakan regulasi yang berorientasi pada perspektif kebijakan komunikasi, yakni ruang publik, elemen estetika visual, dan penataan. Dominasi watak ekonomistis dalam tiap-tiap regulasi media luar ruang, memperlihatkan sikap PAD-sentris; sementara hak-hak publik dan keselamatan publik dinafikan sebagai variabel sampiran belaka.

Keempat, diperlukan sebuah model yang tidak hanya mampu mengakomodasi kepentingan semua aktor, tetapi juga memberikan partisipasi penuh pada publik agar terlibat secara intens dalam kebijakan media luar ruang. Model kebijakan komunikasi harus memuat terobosan yang mampu mengatasi dilema PAD maupun relasi elite politik dan pengusaha. Terobosan yang dimaksud dapat dikerjakan dengan memasukkan dua variabel utama: insentif

kepada pengusaha atas reklame dengan standar dan kriteria ideal dari ruang publik komunikasi, serta diberlakukannya *dedicated fund*, yakni pendapatan dari pajak reklame harus segera didistribusikan ke sektor-sektor publik (aspek seni, lembaga/komunitas warga, pendidikan, UKM industri kreatif, dan seterusnya).

Tujuan besar dari implementasi model ini adalah keseimbangan antara tumbuh-kembang media luar ruang dan pemberdayaan publik—dua entitas yang selama ini justru tampak timpang dan dominatif.

Referensi

Aragonès, Enriqueta., Sánchez., Santiago, (2004). *A Model Of Participatory Democracy: Understanding The Case Of Porto Alegre* September PAC Project, European Commission

Arwanto, Very. 2011. *Analisis Isi Iklan Rokok pada Media Luar Ruang di Yogyakarta*, Skripsi UPN Veteran Yogyakarta.Bisnis Indonesia, 1 April 2010.

Branch, Mellvile C. 1996. *Perencanaan Kota Komprehensif*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Budiono, 2003. *Analisis Efektivitas Atas Pemungutan Pajak Reklame Sebagai Upaya Peningkatan*

PAD, Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang,

Cabe. 2006. *Green Space Strategies: A Good Practice Guide. London: Commission for Architecture and The Built Environment*.;

_____2010. *Urban Green Nation: Building The Evidence Base. London: Commission for Architecture and The Built Environment*.

Helvianti, 2009. *Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap PAD Di Kabupaten Rokan Hilir, Riau*, tesis Universitas Sumatera Utara.

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras memcetak naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Kayden, J. S. (2000). *Privately Owned Public Space: The New York City Experience*. New York: John Wiley And Sons, Inc.

Lasmono, Lenandi Soetrisno. 2010. *Perancangan Sistem Papan Reklame Tahan Angin*, Skripsi Universitas Petra Surabaya.

Lenandi Soetrisno Lasmono, (2010). *Perancangan Sistem Papan Reklame Tahan Angin*, Universitas Petra Surabaya.

Madanipour, A, (2010). "Marginal Public Spaces In European Cities" Dalam A. Madanipour, *Whose Public Space? International Case Studies In Urban Design And Development*, Oxon, Routledge.

Marihot P, (2005) *Pajak Dan Retribusi Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Merker, Blaine, (2010). "Taking Place - Rebar's Absurd Tactics In Generous Urbanism" Dalam J. Hou, (2010). *Insurgent Public Space - Guerilla Urbanism And The Remaking Of Contemporary Cities*, Oxon, Routledge.

Nurmayasari, Dini. 2010. *Analisis Penerimaan Pajak Reklame Kota Semarang*, tesis Universitas Diponegoro.

Perwali Nomor 56 Tahun 2010 dan Perwali Nomor 57 Tahun 2010

Saleh, *Impeachment Kepala Daerah (Studi Kasus Usulan Pemberhentian Walikota Surabaya Ir. Tri Rismaharini)*, *Jurnal Narotama*, vol XI, 2012.

Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Dan Retribusi Daerah*, Raja Grafindo Persada Jakarta.

Wachdin, Faizah. 2010. *Pengaruh Pajak Reklame & Pajak Hiburan Terhadap PAD Kota Surabaya*, skripsi UPN Veteran Surabaya.

Wood, Terence., Warwick E. Murray, *Participatory Democracy In Brazil And Local Geographies: Porto Alegre And Belo Horizonte Compared*, *European Review of Latin American and Caribbean Studies* 83, October 2007

INDONESIA

KBM INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit



Komunikasi Digital dan Transformasi Sosial: Peluang dan Tantangan untuk Masyarakat Jawa Timur

Harliantara

Pendahuluan

Di seluruh dunia, pertumbuhan teknologi komunikasi digital telah mengubah masyarakat dan perilaku individu, tidak terkecuali di Jawa Timur. (Wiryany et al., 2022). Dengan kemajuan pesat dalam teknologi komunikasi, orang

sekarang dapat menyatakan pendapat mereka secara lebih bebas daripada sebelumnya melalui platform media sosial. Ini telah memungkinkan orang-orang yang sebelumnya tidak didengarkan oleh media utama untuk menyampaikan pendapat mereka. (Prakoso & Runturambi, 2021). Pandemi COVID-19 tahun 2020 telah menyebabkan peningkatan penggunaan platform digital dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menyebabkan pembatasan interaksi fisik dan kebutuhan untuk menggunakan solusi digital untuk berbagai tugas, seperti pekerjaan, pendidikan, ibadah, dan keterlibatan sosial. Periode ini ditandai dengan peningkatan penggunaan media digital untuk komunikasi, penyebaran informasi, dan jejaring sosial. Penggunaan media digital ini memiliki efek baik maupun buruk pada struktur sosial.. (Dhamayanti 2022). Dengan munculnya era digital, telah terjadi perubahan besar dalam cara orang terlibat dalam politik dan pemerintahan; ini telah mendorong partisipasi politik yang lebih inklusif dan memberdayakan warga negara dari berbagai latar belakang. Pergeseran digital ini juga berdampak pada pola komunikasi, perdagangan, dan keterlibatan warga negara, yang berdampak pada cara orang terhubung, mengonsumsi informasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik. (Elizamiharti & Nelfira (2023).

Dengan menjadikan platform digital sebagai sumber utama informasi dan komunikasi, banyak masalah telah muncul. Yang paling menonjol adalah penyebaran informasi palsu dan manipulasi konten digital untuk tujuan politik. Fenomena ini telah menjadi perhatian penting bagi masyarakat modern, menunjukkan betapa pentingnya literasi digital dan pengembangan mekanisme pengecekan fakta untuk memerangi penyebaran berita bohong. Komunikasi digital telah berdampak besar pada partisipasi politik, khususnya di Indonesia, di mana platform digital telah menjadi alat penting untuk mobilisasi dan keterlibatan politik. Munculnya era

digital telah mendorong perubahan besar dalam cara orang terlibat dengan pemerintah dan politik, sehingga partisipasi politik yang lebih inklusif dan memperkuat suara warga negara dari berbagai latar belakang.(Elizamiharti & Nelfira (2023). Namun demikian, perkembangan teknologi ini secara bersamaan juga menimbulkan masalah, terutama penyebaran informasi yang salah, ujaran kebencian, dan konten yang memecah belah yang merusak prinsip demokrasi. (Yılmaz et al., 2024). Di Indonesia, diskusi tentang agama telah dirusak oleh tuduhan bahwa ada intoleransi terhadap agama dan penyebaran ujaran kebencian di media sosial. Akibatnya, tindakan intoleransi seperti pembangunan tempat ibadah, penyerangan terhadap kelompok tertentu, dan ungkapan kebencian muncul. Potensi konflik sosial telah meningkat karena perkembangan ini. (Prakoso & Runturambi, 2021).

Ekonomi juga dipengaruhi oleh peningkatan ketergantungan pada komunikasi digital. Komunikasi digital sangat memengaruhi partisipasi politik, terutama di Indonesia, di mana platform digital telah menjadi alat penting untuk mobilisasi politik dan keterlibatan. Dengan munculnya era digital, terjadi perubahan besar dalam cara orang berinteraksi dengan pemerintah dan politik. Ini telah mendorong partisipasi politik yang lebih inklusif dan memperkuat suara warga negara dari berbagai latar belakang.. (Elizamiharti and Nelfira, 2023). Namun, perkembangan teknologi ini secara bersamaan juga menimbulkan masalah, terutama penyebaran informasi yang salah, ujaran kebencian, dan konten yang memecah belah, yang mengancam demokrasi. (Yılmaz et al., 2024). Tuduhan bahwa ada intoleransi terhadap agama dan penyebaran ujaran kebencian di media sosial telah mengganggu diskusi agama di Indonesia. Ini telah menyebabkan peristiwa intoleransi, seperti pembuatan tempat ibadah yang dilarang, diskusi buku yang dilarang, penyerangan terhadap kelompok tertentu, dan ungkapan kebencian. Risiko konflik sosial dapat meningkat sebagai akibat

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

dari perkembangan ini. (Prakoso & Runturambi, 2021). Meningkatnya ketergantungan pada komunikasi digital juga memiliki dampak ekonomi. Singkatnya, platform digital telah terbukti memiliki kemampuan untuk meningkatkan keterlibatan dan partisipasi politik warga negara. Namun, secara bersamaan, platform ini menghadapi masalah, seperti penyebaran informasi yang salah dan memperburuk polarisasi politik. (Sustikarini, 2020).

Karena ekonomi digital telah masuk ke berbagai aspek kehidupan Jawa Timur, memahami dampaknya yang beragam terhadap masyarakat menjadi semakin penting. Ini karena ekonomi digital telah muncul sebagai pendorong pertumbuhan yang signifikan di wilayah tersebut dengan mendorong inovasi, kewirausahaan, dan penciptaan lapangan kerja. Menurut East Ventures' Digital Competition Index (Wardhono et al., 2022), pandemi menyebabkan peningkatan aktivitas digital, yang menghasilkan peningkatan daya saing digital. Komunikasi digital telah menjadi sangat penting untuk memungkinkan aktivitas berlangsung melalui layanan online, terutama dalam konteks tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 terhadap interaksi tatap muka yang lebih lama (Dhamayanti, 2022). Kontribusi ekonomi digital terhadap PDB Indonesia meningkat drastis dari 3,61% pada 2016 menjadi 4% pada 2017. Menggambarkan dampak besar kemajuan teknologi, proyeksi menunjukkan peningkatan lebih lanjut menjadi 10% pada tahun 2018. Kebutuhan akan pembelajaran online telah menjadi hal yang sangat penting, mendorong para pendidik untuk membuat lingkungan belajar virtual yang menarik dan efisien meskipun keterbatasan kuota internet menyebabkan masalah.

Penggunaan media digital seperti podcast telah berkembang menjadi alat yang bermanfaat untuk mempertahankan aktivitas dan hubungan sosial meskipun interaksi tatap muka terbatas. Sesuai dengan platform pembelajaran digital konvensional seperti Zoom dan Microsoft Teams, platform ini menawarkan media yang

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

fleksibel (Dhamayanti, 2022). Untuk menanggapi fenomena digitalisasi, Indonesia membuat Peta Jalan Digital Indonesia pada tahun 2020 untuk membantu sektor-sektor penting seperti infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan komunitas digital. Peluang digital, perilaku digital, dan infrastruktur mendukung transformasi digital di sektor perbankan. Lembaga keuangan adalah bagian penting dari sistem keuangan dan berperan penting dalam mendorong adopsi instrumen keuangan digital (Shanti et al., 2024). Ketika e-commerce, layanan online, dan kewirausahaan digital berkembang, integrasi teknologi digital telah memainkan peran penting dalam menciptakan peluang ekonomi baru bagi individu dan perusahaan.

Cara orang mengakses, mengonsumsi, dan memahami informasi telah diubah secara signifikan oleh komunikasi digital. Akibatnya, pendapat publik, norma sosial, dan prinsip budaya di daerah tersebut semuanya telah dipengaruhi oleh hal ini. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan peran komunikasi digital dalam memediasi dampak globalisasi terhadap budaya dan identitas lokal, serta kekuatan platform digital untuk memperburuk ketidaksetaraan saat ini dan mendorong inklusivitas. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan analisis menyeluruh tentang kemungkinan dan hambatan yang ditimbulkan oleh komunikasi digital. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk meningkatkan masyarakat di Jawa Timur dan wilayah sekitarnya dengan memanfaatkan potensi transformasi komunikasi digital. Inisiatif pemerintah seperti program pendidikan dan pelatihan sangat penting untuk meningkatkan literasi digital dan memungkinkan setiap orang menggunakan teknologi digital secara efektif. Selain itu, munculnya transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan telah menghasilkan peningkatan efisiensi dan transparansi administratif serta peningkatan akses terhadap layanan publik (Gusman, 2024).

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Pembahasan

Untuk mendorong pertumbuhan digital yang berkelanjutan dan memastikan bahwa manfaatnya dapat dinikmati secara luas oleh masyarakat Indonesia, diperlukan pengembangan infrastruktur digital, promosi literasi digital, dan pembentukan kerangka kerja peraturan yang mendukung (Wardhono et al., 2022) (Shanti et al., 2024). Terlepas dari kemajuan yang telah dicapai, literasi digital, kerangka kerja regulasi, dan pengembangan infrastruktur masih menghadapi masalah. Untuk membangun ekosistem digital yang inklusif dan memungkinkan, pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sipil harus bekerja sama. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah Indonesia memulai lima rencana untuk mendorong transformasi digital. Mengembangkan sumber daya manusia, menyelaraskan undang-undang dengan kemajuan digital, dan berkolaborasi dengan sektor swasta adalah bagian dari pendekatan ini (Kurniawan & Arti, 2020). Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan peluang baru bagi bisnis dan masyarakat, pemerintah dan bisnis secara aktif mengembangkan rencana untuk memanfaatkan potensi ekonomi digital (Sudiantini et al., 2023).

INDONESIA
www.penerbitsukamandiri.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Menurut Sudiantini et al. (2023), kekurangan infrastruktur teknologi, akses Internet yang terbatas, dan kualitas akses Internet di bawah standar telah menimbulkan tantangan terus-menerus yang membutuhkan investasi terus-menerus dalam teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Ada banyak peluang bagi para pelaku bisnis di era digital, terutama dalam bidang kemitraan global. Jenis kolaborasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas operasi perusahaan (Sudiantini et al., 2023). Transformasi digital tidak hanya merupakan perubahan teknologi; itu juga merupakan transformasi sosial yang signifikan yang membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan berfokus

pada manusia. Untuk mencapainya, pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sipil harus bekerja sama untuk membuat ekosistem digital yang inklusif yang memberdayakan orang, mendorong inovasi, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Pemerintah dan perusahaan di seluruh dunia sedang membuat rencana untuk memanfaatkan transformasi ekonomi digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang baru bagi bisnis dan masyarakat (Gusman, 2024; Kurniawan & Arti, 2020; Sudiantini et al., 2023).

Transformasi digital yang dilakukan pemerintah Indonesia telah memperluas akses terhadap layanan publik dan meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan (Gusman, 2024). Di masa depan, sangat penting untuk mengevaluasi prospek, kesulitan, dan konsekuensi yang lebih luas dari transformasi digital terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan partisipasi masyarakat (Gusman, 2024; Kurniawan & Arti, 2020; Sudiantini et al., 2023). Penyerapan teknologi digital telah memiliki dampak yang signifikan pada sejumlah industri, yang telah menyebabkan perubahan pada model bisnis, peningkatan produktivitas, dan pembukaan potensi inovasi baru (Sudiantini et al., 2023). Kapasitas transformatif teknologi sedang dipelajari di berbagai bidang, seperti keuangan, pendidikan, kesehatan, dan tata kelola pemerintahan. Ini menunjukkan kemampuan untuk menghasilkan solusi baru dan hasil yang lebih baik (Gusman, 2024; Kurniawan & Arti, 2020; Sudiantini et al., 2023). Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bagaimana transformasi digital berjalan, bagaimana dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan cara mengoptimalkan manfaatnya sembari mengurangi bahayanya. Berinvestasi dalam infrastruktur digital, mendorong literasi digital, dan membangun ekosistem inovatif adalah semua hal yang harus diperhatikan. Kemajuan telah dicatat dalam ekonomi digital Indonesia pada tahun 2019, yang

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

menggambarkan kemajuan dalam bisnis (Gusman, 2024; Kurniawan & Arti, 2020; Sudiantini et al., 2023).

Untuk mendukung transformasi digital di sektor publik, studi perbandingan kurikulum keamanan siber sangat penting (Kurniawan dan Arti 2020). Posisi strategis Indonesia dalam hal bisnis terbukti pada tahun 2019. Selain itu, transformasi digital digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Pengembangan infrastruktur digital, mendorong literasi digital, dan pembentukan kerangka peraturan yang mendukung adalah semua bagian dari upaya ini (Shanti et al., 2024). Transformasi digital di sektor bisnis dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan layanan publik (Kurniawan & Arti, 2020). Pada tahun 2020, Indonesia membuat Peta Jalan Digital Indonesia, yang bertujuan untuk mendukung transformasi digital di empat bidang strategis: infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan komunitas digital. Untuk memastikan transformasi digital ini berhasil, diperlukan investasi dalam infrastruktur digital, mendorong literasi digital, dan membuat kerangka regulasi yang mendukung. Karena institusi keuangan mempercepat aktivitas keuangan digital, perbankan digital merupakan bagian penting dari perkembangan ekonomi digital. Peluang digital, perilaku digital, dan transformasi digital adalah tiga komponen utama yang mendukung digitalisasi industri perbankan Indonesia, menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Shanti et al., 2024).

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Transformasi digital telah berkembang pesat dan mempengaruhi Indonesia di banyak bidang, mulai dari ekonomi dan tata kelola pemerintah hingga budaya dan masyarakat (Gusman, 2024; Kurniawan & Arti, 2020; Sudiantini et al., 2023). Indonesia telah memulai transformasi digital sejak 2020. Ini ditunjukkan oleh pembuatan Peta Jalan Digital Indonesia, yang bertujuan untuk mendorong kemajuan dalam infrastruktur digital, tata kelola

pemerintahan, ekonomi, dan masyarakat. Dokumen strategis ini menekankan komitmen Indonesia untuk memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inklusi di berbagai bidang. Selain itu, berbagai faktor, termasuk peluang digital, perilaku digital, dan infrastruktur digital, telah mendorong sektor jasa keuangan, khususnya perbankan, untuk mengalami transformasi digital yang signifikan (Shanti et al., 2024). Transisi ini menunjukkan tren global yang lebih luas di mana pemerintah dan perusahaan secara bertahap mengakui kekuatan transformasional teknologi digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan peluang baru (Sudiantini et al., 2023). Di Indonesia, transformasi digital telah membawa kemajuan besar dalam hal efisiensi manajemen, transparansi, dan akses ke layanan publik. Keberhasilan transformasi digital didukung oleh upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan teknologi digital secara efektif melalui program pelatihan dan pendidikan (Gusman, 2024). Namun, masalah seperti infrastruktur teknologi yang tidak memadai, akses Internet yang terbatas, dan kekhawatiran tentang keamanan siber masih ada. Karena itu, semua pihak harus bekerja sama untuk mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa transformasi digital akan menguntungkan semua orang (Gusman, 2024; Kurniawan & Arti, 2020; Shanti dkk., 2024). Untuk mengimbangi peluang dan tantangan yang ditimbulkan oleh transformasi digital di Indonesia, pendekatan yang holistik dan berpusat pada manusia diperlukan untuk memaksimalkan manfaat dan mengurangi kerugian (Gusman, 2024; Kurniawan & Arti, 2020; Shanti et al., 2024).

Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya besar untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan teknologi digital melalui program pendidikan dan pelatihan (Gusman, 2024). Namun demikian, literasi digital, kerangka kerja regulasi, dan pembangunan infrastruktur masih menghadapi

tantangan (Gusman, 2024; Kurniawan dan Arti, 2020; Shanti et al., 2024). Untuk membangun ekosistem digital yang inklusif dan memungkinkan, pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sipil harus bekerja sama. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah Indonesia memulai lima rencana untuk mengkatalisasi transformasi digital. Pengembangan kemampuan SDM, kolaborasi dengan sektor swasta, dan harmonisasi regulasi dengan kemajuan digital adalah semua bagian dari rencana ini (Gusman, 2024; Kurniawan & Arti, 2020). Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan peluang baru bagi masyarakat dan pelaku usaha, pemerintah dan pelaku usaha secara aktif mengembangkan rencana untuk memanfaatkan potensi ekonomi digital (Gusman, 2024; Kurniawan & Arti, 2020; Shanti et al., 2024). Para pengusaha di era komputer dan internet memiliki banyak peluang, terutama dalam kemitraan internasional. Bisnis dapat memperoleh manfaat dari kerja sama yang lebih efektif dan efisien (Gusman, 2024; Kurniawan dan Arti, 2020; Sudiantini et al., 2023).

Simpulan

www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Di Indonesia, transformasi digital membawa peluang maupun hambatan. Sangat penting untuk menggunakan pendekatan holistik dan berpusat pada manusia untuk memaksimalkan manfaat dan mengurangi risiko transformasi ini. Pemerintah perlu berusaha memaksimalkan transformasi digital dengan meningkatkan infrastruktur digital, meningkatkan literasi digital, dan menciptakan lingkungan regulasi yang baik. Melalui transformasi digital, pemerintah Indonesia perlu meningkatkan efektivitas dan transparansi administrasi serta meningkatkan akses ke layanan publik.

Referensi

Dhamayanti, M. (2022). Utilising Podcasts as Literacy and Educational Media. In *KOMUNIKA Jurnal Dakwah dan Komunikasi* (Vol. 16, Issue 2, p. 129). State Institute on Islamic Studies Purwokerto. https://doi.org/10.24090/komunika.v16i1.6784

Elizamiharti, E. & Nelfira, N. (2023). Demokrasi Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Dalam Partisipasi Politik. In *Jurnal Riset Multidisiplin dan Inovasi Teknologi* (Vol. 2, Issue 1, p. 61). https://doi.org/10.59653/jimat.v2i01.342

Gusman, S. W. (2024). Development of the Indonesian Government's Digital Transformation. In: *Dinasti International Journal of Education Management and Social Science* (Vol. 5, Issue 5, p. 1128). https://doi.org/10.38035/dijemss.v5i5.2868

Kumala, S. L. (2022). Perkembangan konomi Berbasis Digital di Indonesia. *In the Journal of Economics and Regional Science* (vol. 1, Issue 2, p. 109). https://doi.org/10.52421/jurnal-esensi.v1i2.190

Kurniawan, D. & Arti, R. M. (2020). Comparative Study of a Cybersecurity Curriculum To Support Digital Transformation in The Public Sector. In the Iapa Proceedings Conference (p. 547). *Indonesian Association for Public Administration*. https://doi.org/10.30589/proceedings.2020.427

Prakoso, G. R., & Runturambi, A. J. S. (2021). Strategic Intelligence Analysis Of Religion-Based Hate Speech In Social Media: A Case Study Of The Directorate Intelligence And Security At Polda Metro Jaya. In the *International Review of Humanities Studies* (vol. 6, Issue 1). https://doi.org/10.7454/irhs.v6i1.299

Shanti, R., Siregar, H., Zulbainarni, N., & Tony, T. (2024). Revolutionising banking: Neobanks' digital transformation for enhanced efficiency. In the *Journal of Risk and Financial*

Management (vol. 17, Issue 5, p. 188). Multidisciplinary Digital Publishing Institute. https://doi.org/10.3390/jrfm 17050188

Sudiantini, D., Ayu, M. P., and Aswan, M. C. A. S., Prastuti, M. A., & Apriliya, M. (2023). Transformasi Digital : Dampak, Tantangan, Dan Peluang Untuk Pertumbuhan Ekonomi Digital. In *Trending Jurnal Manajemen dan Ekonomi* (Vol. 1, Issue 3, p. 21). https://doi.org/10.30640/trending.v1i3.1115

Sustikarini, A. (2020). *Digital Democracy in Indonesia's 2019 Election: Between Citizen Participation and Political Polarization.* https://doi.org/10.2991/assehr.k.200402.055

Wardhono, A., Nasir, M., Abd., Aprilia, A., & Putra, P. T. N., & Zebua, B. H. N. (2022). Is the Digital Economy Driving the Economic Growth of the Sumatra Region During the Pandemic? In the *Journal of Economics Research and Social Sciences* (Vol. 6, Issue 1, p. 76). https://doi.org/10.18196/jerss.v6i1.13676

Wiryany, D., Natasha, S., & Kurniawan, R. (2022). Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Perubahan Sistem Komunikasi Indonesia. In *Jurnal Nomosleca (Vol. 8, Issue* 2, p. 242). Universitas Merdeka Malang. https://doi.org/10.26905/nomosleca.v8i2.8821

Yılmaz, I., Triwibowo, W., Bachtiar, H., Barton, G. (2024). *Competing Populisms, Digital Technologies and the 2024 Elections in Indonesia*. https://doi.org/10.55271/pp0029



Adaptasi Sistem Komunikasi Kesehatan (Studi Kasus di Gresik, Lamongan, dan Bojonegoro)

Tatag Handaka

Pendahuluan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) di Jawa Timur masih menghadapi persoalan kesehatan jamban, terutama di daerah pedesaan. Pemerintah melalui Departemen Kesehatan (Depkes) telah menetapkan kriteria jamban sehat

(improved). Jamban sehat memiliki indikator berikut: tidak mencemari sumber air/jarak minimal sepuluh meter dari sumber air, tidak berbau dan tinja tidak dapat dijamah oleh serangga atau tikus, mudah dibersihkan dan aman digunakan, dilengkapi dinding dan atap pelindung, cukup penerangan, lantai kedap air, luas ruangan cukup/tidak terlalu rendah, ventilasi cukup baik, tersedia air dan alat pembersih.

Hasil penelitian *Water and Sanitation Program World Bank (WSP-World Bank)* tahun 2010 di pedesaan Jawa Timur menunjukkan jumlah jamban tidak sehat *(unimproved)* masih cukup banyak. Data masyarakat pedesaan Jawa Timur yang memiliki jamban tidak sehat dijelaskan dalam tabel 1:

Tabel 1 Jumlah Jamban Tidak Sehat

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Jamban *Unimproved*
1	Bojonegoro	Kapas	Bakalan	305
		Gondang	Pajeng	282
		Temayang	Papringan	153
			Jono	175
2	Gresik	Wringin Anom	Kesamben Kulon	557
			Pedagangan	405
			Sumengko	209
			Kepuh Klagen	348
			Sembung	530
3	Lamongan	Modo	Modo	71
		Turi	Ngujungrejo	239
		Karangbinangun	Karangbinangun	81

Sumber diolah dari: WSP-World Bank (2010)

Jumlah total jamban tidak sehat di Kabupaten Bojonegoro ada 1.296 buah, di Kabupaten Lamongan ada 777 buah dan di Kabupaten

KBM INDONESIA www.penerbitbukukurikulum.com Dilarang keras, menyalin atau menyebarkan hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Gresik 5.640 buah. Data ini menunjukkan bahwa salah satu kompleksitas lingkungan yang dihadapi sistem komunikasi kesehatan adalah masih banyaknya jamban tidak sehat.

Sistem komunikasi kesehatan disini dimaksudkan untuk fungsi produksi informasi yang dijalankan oleh Pemkab melalui Dinkes. Selain kompleksitas kesehatan jamban, sistem komunikasi kesehatan juga menghadapi kompleksitas budaya cuci tangan pakai sabun (CTPS). CTPS adalah program yang diinisiasikan Pemerintah pusat untuk masyarakat.

Tulisan ini menggunakan teori sistem komunikasi dalam perspektif Niklas Luhmann. Sebelum membahas teori sistem komunikasi, perlu melihat dulu tradisi sibernetik *(cybernetic tradition)* yang mendasarinya. Teori dalam tradisi sibernetik mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan seperti: Bagaimana sebuah sistem bekerja? Hal apa sajakah yang dapat mengubah sistem? Bagaimana kita dapat mengamati sistem? (Griffin, 2012: 39).

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Ide tentang bentuk sistem adalah inti dari pemikiran sibernetik. Sistem adalah seperangkat komponen-komponen yang berinteraksi bersama membentuk sesuatu yang terdiri dari sejumlah bagian-bagian tersebut. Sistem mengambil input dari lingkungan, mengolah, dan menciptakan output untuk lingkungannya. Kadang input dan output berupa materi nyata/riil, tapi kadang terdiri dari energi dan informasi. Karena sistem berada dalam lingkungan yang dinamis, ia harus dapat beradaptasi dan mampu berubah (Littlejohn dan Foss, 2008: 39-40).

Ada beberapa konsep penting dalam tradisi sibernetik, antara lain *feedback*, informasi dan *autopoiesis*. Niklas Luhmann mengadopsi *autopoiesis* dalam teori sistem sosiologi. Ia mengatakan bahwa sistem sosial tidak mengorganisasikan dirinya tetapi secara metaforis *memproduksi* lingkungan untuk dirinya sendiri. Bagi Luhmann sistem sosial dibentuk melalui komunikasi yang berada

diantara mereka. Lingkungan mereka hanya terdiri dari komunikasi (Littlejohn dan Foss, 2009: 285-288).

Sistem komunikasi didefinisikan Luhmann sebagai interaksi. Sebagai sistem *autopoiesis* mereka membentuk diri mereka sendiri dengan operasi berupa komunikasi. Sistem komunikasi memiliki batas-batas, dan masalah referensi pertamanya adalah reduksi kompleksitas (Luhmann, 1989: 28-29; King and Thornhill, 2006: 200).

Luhmann mendefinisikan komunikasi sebagai kesatuan informasi, pesan dan pemahaman ((Luhmann, 2000: 96; Luhmann, 2004: 86; Leydesdorff, 2000: 276; Viskovatoff, 1999: 501-502). Komunikasi tercipta melalui sintesis dari tiga jenis seleksi perbedaan, yaitu seleksi informasi, seleksi ujaran dari informasi ini, dan seleksi pemahaman atau ketidakpahaman dari ujaran dan informasinya (Luhmann, 2002: 157; Luhmann, 1986: 123; King and Thornhill, 2003: 17; Hagen, 2000: 3).

Masyarakat dibentuk oleh komunikasi dan komunikasi itu sendiri. Komunikasi disini bukan merujuk pada makna klasik atau model *"sender-receiver"*. Ini adalah tindakan konstitutif masyarakat dan bebas dari seorang "pembicara" atau seorang "subjek". "Komunikasi" bukan tindakan tunggal tetapi selalu terdiri dari tiga hal, yaitu informasi, pesan dan pemahaman (Albert and Hilkermeier, 2004: 182). Diluar masyarakat, tidak ada komunikasi (Fuchs, 1999: 117).

Sistem komunikasi adalah sistem tertutup yang lengkap, menciptakan komponen-komponen yang membentuk dirinya melalui komunikasi itu sendiri. Dalam kaitan dengan hal ini, sistem komunikasi adalah sistem *autopoiesis* yang memproduksi dan mereproduksi sesuatu/informasi (Luhmann, 2002: 160-161; Luhmann, 2000: 11).

KBM INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Sistem komunikasi selain tertutup, juga sekaligus terbuka. Ia harus bisa membedakan diri dengan lingkungannya, menentukan batas-batasnya, mereduksi kompleksitas, namun juga sekaligus membuka diri untuk mengambil informasi dari lingkungannya (Luhmann, 1992: 254). Lingkungan, secara sederhana adalah "sesuatu yang lain". Seseorang harus membedakan lingkungan dari sistem yang berada dalam lingkungan. Lingkungan terdiri dari banyak sistem yang kompleks. Untuk menganalisa perbedaan antara sistem dan lingkungan, dimulai dengan asumsi bahwa lingkungan selalu lebih kompleks dari sistem itu sendiri (Luhmann, 1995: 181-182). Sistem merupakan reduksi kompleksitas dari lingkungannya. Luhmann mengatakan, karena sistem berada dalam masyarakat, dan masyarakat adalah komunikasi (Lee, 2000: 320).

Sistem-sistem *autopoiesis* mempunyai empat karakteristik berikut: *pertama*, suatu sistem *autopoiesis* menghasilkan unsur-unsur dasar yang membentuk sistem itu. *Kedua*, sistem-sistem *autopoiesis* mengorganisasi diri dalam dua cara – mereka mengorganisasikan perbatasan-perbatasannya sendiri, dan mengorganisasikan struktur-struktur internalnya. *Ketiga*, sistem-sistem *autopoiesis* mengacu kepada diri sendiri (Esposito, 1996). *Keempat*, suatu sistem *autopoiesis* adalah suatu sistem tertutup (Ritzer, 2012: 568-570; Luhman, 1995: 368-369).

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Sistem-sistem sosial yang bersifat *autopoiesis* ini adalah masyarakat. Sistem yang *autopoiesis* akan membedakan diri dengan sistem yang lain dan sekaligus membedakan diri dengan lingkungannya. Sistem komunikasi ada dalam masyarakat (Hardiman, 2008: 12). Selain melakukan *autopoiesis*, sistem juga melakukan apa yang oleh Luhmann disebut sebagai *double contingency*. *Double contingency* adalah proses dimana, dalam interaksi, individu harus memperhitungkan orientasi orang lain terhadap diri mereka (Turner, 2006: 343; Luhman, 1995: 116-117; Lee, 2000: 324-325).

Penelitian tentang komunikasi kesehatan pernah dilakukan sebelumnya. Salah satunya adalah penelitian tentang pola komunikasi kesehatan masyarakat pedesaan di Jawa Timur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi kesehatan terdiri dari komunikasi antar personal, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa (Handaka, et.al., 2016: 65-69).

Pembahasan

1. Sistem Komunikasi Kesehatan

Sistem komunikasi kesehatan adalah proses produksi dan reproduksi informasi untuk menyelesaikan kompleksitas lingkungan. Kompleksitas lingkungan yang dihadapi sistem komunikasi kesehatan adalah masih tingginya jamban yang tidak sehat dan budaya cuci tangan pakai sabun (CTPS) yang masih rendah. Sistem komunikasi kesehatan terdiri dari tiga subsistem, yaitu subsistem promosi kesehatan (promkes), kesehatan lingkungan (kesling), dan pelayanan kesehatan (yankes). Sistem komunikasi kesehatan dijalankan oleh struktur komunikasi yang ada di Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Sistem komunikasi kesehatan dijelaskan dalam gambar 2:

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Kompleksitas Lingkungan

Sistem Komunikasi Kesehatan

Sub Sistem Kesling

Sub Sistem Promkes

Sub Sistem Yankes

Produksi Informasi

Reproduksi Informasi

Umpan Balik

Petugas-Kader

Gambar 2 Sistem Komunikasi Kesehatan

Sistem komunikasi kesehatan berada dalam kompleksitas lingkungan. Lingkungan terdiri dari berbagai informasi, ada yang berkaitan dengan sistem komunikasi kesehatan, tapi lebih banyak lagi yang tidak berkaitan dengannya. Tidak semua informasi bermanfaat untuk sistem komunikasi kesehatan. Informasi lingkungan bersifat tidak pasti, tidak jelas, dan tidak terprediksi *(equivocality)*. Sistem reduksi dan menyeleksi informasi lingkungan yang ia nilai bermanfaat untuk dirinya.

Sehingga informasi lingkungan menjadi lebih jelas, pasti, dan terprediksi. Sistem komunikasi kesehatan menggunakan informasi ini untuk memproduksi informasi. Informasi ini bisa berupa regulasi, struktur, wacana, atau himbauan. Masing-masing sub sistem memiliki proses produksi informasi yang khas. Masing-masing sub sistem memiliki batas sendiri-sendiri dalam produksi informasi. Informasi dari masing-masing sub sistem didistribusikan petugas kesehatan ke kader melalui kelompok PKK atau Posyandu.

Interaksi antara petugas kesehatan dengan kader akan melahirkan umpan balik *(feedback)* untuk sistem. Sistem akan mengelola umpan balik ini untuk memproduksi informasi berikutnya. Informasi ini selanjutnya didistribusikan petugas kesehatan ke kader (garis putus-putus). Interaksi kedua aktor ini kembali melahirkan umpan balik untuk sistem. Demikian seterusnya proses produksi dan reproduksi informasi ini berjalan (gambar 2).

Sistem komunikasi kesehatan dalam menghadapi kompleksitas lingkungan telah memproduksi dan mendistribusikan informasi. Misalnya koordinasi program penyuluhan kesehatan dengan Puskesmas dan media promosi kesehatan (poster, brosur, pamflet, leaflet, dan buku). Media tersebut berisi tentang pesan jamban sehat dan CTPS. Selain media cetak, sistem juga telah memproduksi informasi melalui media radio. Berupa acara "dialog interaktif"

dengan narasumber dari Dinkes. Sistem juga memproduksi informasi melalui media tradisional (ludruk dan tayub).

Alur pendistribusian informasi kesehatan jamban dan CTPS dimulai dari sistem, terutama melalui subsistem promkes. Dari sub sistem ini dilanjutkan ke Puskesmas. Petugas kesehatan di Puskesmas akan meneruskan informasi ke Puskesmas Pembantu (Pustu), Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes), Bidan Desa dan PKK/Posyandu. Bidan dan kader PKK yang akan menyampaikan informasi tersebut ke masyarakat.

2. Kompleksitas Lingkungan dan Adaptasi Sistem

Sistem komunikasi kesehatan di tiga wilayah (Gresik, Lamongan, dan Bojonegoro) memiliki kompleksitas khas. Masing-masing memiliki kompleksitas berbeda karena memiliki konteks sosial, budaya, dan lingkungan fisik yang juga berbeda. Misalnya Gresik dan Lamongan memiliki banyak lahan tambak, sementara Bojonegoro tidak memiliki hal serupa. Lingkungan tambak membawa kompleksitas tersendiri yang berkaitan dengan kesehatan jamban dan CTPS.

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Lahan tambak yang luas dan sungai di sekitarnya membuat masyarakat merasa mudah membuat jamban dan buang air besar *(open defecation)*. Masyarakat di sekitar tambak membuat jamban hanya dengan bambu dan plastik karung untuk penutup. Banyak dijumpai jamban bambu berdiri di atas tambak dan sungai di daerah seperti ini. CTPS juga sulit dilakukan petani tambak ketika akan makan. Petani tambak hanya mencuci tangan di air tambak atau sungai sebelum makan. Petani sering makan siang di tambak karena istri mereka biasanya mengirim makan ke lahan tambak.

Masing-masing sistem beradaptasi dengan kompleksitas lingkungan ini, dengan cara memproduksi dan mereproduksi informasi. Produksi dan reproduksi informasi tidak sekedar

mempersoalkan isi informasi, tapi juga bagaimana ia didistribusikan. Tiap sistem mengembangkan strategi dalam mendistribusikan informasi.

Kompleksitas lingkungan yang dihadapi sistem komunikasi kesehatan terdiri dari, *pertama*, letak pemukiman penduduk yang tersebar di berbagai desa, tingkat pendidikan yang beragam, dan tingkat status sosial ekonomi menengah ke bawah. Sistem dalam menghadapi kompleksitas lingkungan ini mendistribusikan informasi melalui media. Sistem menggunakan media massa (radio, poster, brosur, pamflet, leaflet, dan buku). Media ini salah satunya berisi tentang kesehatan jamban dan CTPS. Media ini disebarkan melalui struktur komunikasi, yaitu Puskesmas, Pustu, dan PKK/Posyandu.

Distribusi pesan melalui media ini menghadapi kendala karena tidak semua media cetak sampai ke masyarakat. Selain itu pesan media kesehatan juga kadang tidak dipahami seperti apa yang diinginkan sistem. Masyarakat masih belum memiliki pemahaman yang benar tentang apa kriteria jamban sehat dan CTPS. Bahkan masyarakat masih ada yang belum paham tentang jamban sehat dan CTPS. Misalnya banyak masyarakat yang belum paham kapan saja melakukan CTPS.

Sistem dalam menghadapi umpan balik lingkungan ini, mereproduksi informasi berikutnya. Reproduksi informasi tersebut adalah menggunakan media tradisional (ludruk dan tayub) untuk menyampaikan pesan kesehatan. Sistem menilai bahwa media ini lebih "dekat" dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. "Dekat" disini dalam arti bahwa masyarakat telah lama mengenal media ini. Selain bahasa yang digunakan dalam media ini juga "dekat" dengan masyarakat karena bahasa mereka sehari-hari.

Sistem biasanya mendesain pesan kesehatan untuk disampaikan oleh aktor ludruk dan tayub untuk disampaikan di tengah lakon.

Pesan kesehatan disampaikan dengan bahasa daerah, bahasa yang digunakan masyarakat pedesaan di kehidupan sehari-hari mereka. Masyarakat juga banyak yang sudah mengenal aktor dalam lakon ludruk dan tayub yang dipentaskan.

Selain menggunakan media tradisional, sistem komunikasi kesehatan juga mengadakan "lomba poster". Kompetisi ini diadakan untuk kategori peserta umum, mahasiswa, dan siswa sekolah. Salah satu tema poster yang dilombakan adalah kesehatan jamban dan CTPS. Sistem berharap media ini mencerminkan pemahaman masyarakat dari berbagai kalangan tentang makna kesehatan jamban dan CTPS. Media yang menjuarai kompetisi akan digunakan oleh sistem untuk membantu mendistribusikan pesan kesehatan ke masyarakat.

Kedua, kompleksitas lingkungan yang dihadapi sistem komunikasi kesehatan adalah audiens bapak-bapak yang sulit mendapat terpaan pesan kesehatan. Media cetak yang diproduksi sistem tidak menerpa mereka. Rata-rata pekerjaan kepala keluarga pedesaan di wilayah ini adalah petani tambak. Mereka menggunakan sebagian waktunya mulai pagi hingga sore hari di sawah atau tambak. Sehingga struktur komunikasi kesehatan sulit menjangkaunya.

Sistem dalam menghadapi tantangan ini memproduksi informasi berupa pengiriman petugas untuk mendistribusikan pesan kesehatan melalui warung kopi (warkop). Sebagian petani sering menggunakan waktu senggang di malam hari dengan duduk dan beli makan-minum di warkop (*cangkruk*). Banyak berdiri warkop di daerah pedesaan Gresik dan Lamongan. Bapak-bapak sering menggunakan tempat ini untuk cangkruk. Sistem menggunakan momen ini untuk menyampaikan pesan kesehatan melalui petugas yang dikirim ke warkop.

Namun tidak semua petani tambak pergi untuk *cagkruk* ke warkop. Mereka biasanya tergabung dalam jamaah keagamaan. Sistem

dalam menyikapi umpan balik lingkungan ini lantas mereproduksi informasi. Informasi tersebut adalah mengirim petugas untuk menghadiri jamaah pengajian, yasinan, tahlilan, dan istighosah untuk menyampaikan pesan kesehatan.

Petugas biasanya menyampaikan pesan kesehatan di akhir kegiatan yasinan, tahlil, dan istighosah. Kegiatan jamaah ini rutin dilakukan oleh masyarakat, dihadiri baik oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Kadang ada juga jamaah pengajian khusus untuk ibu-ibu dan untuk bapak-bapak. Kegiatan jamaah keagamaan ini ada di semua daerah Gresik, Lamongan, dan Bojonegoro.

Sistem juga melakukan pendekatan ke tokoh agama dan tokoh masyarakat. Banyak tokoh agama (Kyai) di ketiga daerah ini, karena banyak berdiri pondok pesantren (ponpes). Petugas kesehatan membina interaksi dengan para tokoh agama dengan berkunjung ke ponpes. Para tokoh agama inilah yang akan membantu menyampaikan pesan kesehatan ke masyarakat melalui ponpes atau pengajian di desa-desa.

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Ketiga, kompleksitas lingkungan berupa pengetahuan anak-anak tentang kesehatan jamban dan terutama CTPS. Sistem komunikasi kesehatan dalam menghadapi kompleksitas ini memproduksi informasi berupa regulasi untuk bekerja sama dengan Unit Kesehatan Sekolah (UKS). Banyak Sekolah Dasar (SD) di desa-desa daerah Gresik, Lamongan, dan Bojonegoro memiliki UKS ini. Sistem berkoordinasi dengan SD untuk memberikan penyuluhan tentang CTPS dan kesehatan jamban ke murid-murid.

Setelah murid-murid mendapat pengetahuan tentang jamban sehat dan CTPS. Maka mereka harus mempraktekkan perilaku buang air besar dan kecil di jamban sehat. Murid-murid juga harus diajari untuk membudidayakan perilaku CTPS di sekolah. Namun tidak semua SD memiliki fasilitas untuk mempraktekkan kedua perilaku ini.

Fasilitas jamban sehat tidak banyak menghadapi masalah karena rata-rata tiap SD sudah memiliki fasilitas ini. Namun hampir semua SD tidak memiliki fasilitas CTPS. Ada SD yang bisa menyediakan fasilitas CTPS secara mandiri, namun lebih banyak SD yang tidak bisa menyediakan fasilitas CTPS. Sistem komunikasi kesehatan tidak bisa memproduksi informasi terkait dengan umpan balik lingkungan ini. Sistem tentu tidak sanggup untuk menyediakan fasilitas CTPS ini di tiap SD.

Namun sistem kesehatan di Bojonegoro berhasil memproduksi informasi berupa kerja sama dengan perusahaan migas untuk menyediakan fasilitas kesehatan jamban dan CTPS. Kerja sama ini berupa program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dimiliki perusahaan migas tersebut untuk pembangunan fasilitas jamban sehat.

Keempat, kompleksitas lingkungan yang dihadapi sistem adalah belum semua masyarakat berperilaku buang air besar dan kecil di jamban sehat serta CTPS. Meskipun mereka sudah memiliki pengetahuan yang cukup tentang kedua pesan kesehatan ini. Salah satu kendala masyarakat adalah pengadaan fasilitas jamban sehat. Masih banyak masyarakat yang belum bisa membangun fasilitas tersebut.

Sistem sudah memproduksi informasi berupa regulasi untuk bekerjasama dengan pemerintah desa. Beberapa pemerintah desa di Gresik sudah ada yang memulai untuk membantu membangun fasilitas jamban sehat. Meskipun bantuan pemerintah desa ini belum bisa mencakup seluruh warga. Namun setidaknya telah membantu sistem menyediakan fasilitas umum untuk masyarakat desa.

Kelima, kompleksitas yang dihadapi sistem adalah lingkungan internalnya. Sistem mengaku bahwa pesan kesehatan jamban dan CTPS sudah diproduksi dan didistribusikan. Namun kader PKK

dan Posyandu menilai bahwa pesan kesehatan jamban dan CTPS belum sampai ke mereka. Masyarakat tidak pernah menerima media cetak (poster) yang berisi tentang kesehatan jamban dan CTPS.

Perubahan aktor dalam struktur komunikasi kesehatan adalah kompleksitas internal berikutnya. Perubahan aktor dalam struktur misalnya penggantian kepala Puskesmas. Perubahan ini kadang membawa dampak pada ritme sistem dalam produksi informasi. Misalnya aktor baru yang tidak begitu perhatian dengan kompleksitas kesehatan jamban dan CTPS.

Visi aktor seperti ini akan mengakibatkan produksi informasi menjadi terganggu. Bahkan frekuensi interaksi antar aktor sebagai salah satu syarat untuk produksi informasi menjadi makin rendah. Bila terjadi interaksi antar aktor juga bukan interaksi yang efektif dalam mendukung produksi informasi. Interaksi yang mengalami hambatan *(barriers)* akan berakibat pada menurunnya kualitas produksi informasi.

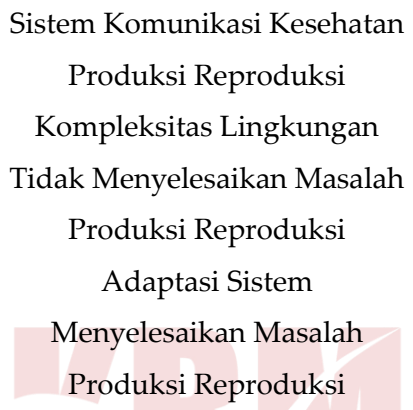
INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Kompleksitas internal sistem berikutnya adalah penilaian kader PKK dan Posyandu tentang peran Bidan desa. Kader menilai bahwa bidan desa kadang tidak mau diundang ke Posyandu bila diluar jam kerja. Padahal masyarakat desa hanya bisa berkegiatan di Posyandu pada hari Sabtu atau Ahad. Sehingga kegiatan Posyandu jarang dihadiri bidan desa. Kader membutuhkan peran bidan untuk membantu mereka memberi penjelasan terkait berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. Sistem belum memproduksi informasi terkait kompleksitas internalnya ini.

Kondisi ini sekaligus mengindikasikan bahwa sistem tidak memperhitungkan persepsi dan reaksi sub sistem dalam dirinya dan sistem diluar dirinya ketika mendistribusikan informasi. Sistem komunikasi kesehatan belum mengembangkan *double*

contingency ketika berinteraksi dengan sub sistem dan sistem eksternal.

Adaptasi sistem komunikasi kesehatan terhadap kompleksitas lingkungan dijelaskan dalam gambar 3:



Gambar 3 Adaptasi Sistem Komunikasi Kesehatan

Sistem komunikasi menghadapi kompleksitas lingkungan kesehatan jamban dan CTPS. Yaitu jumlah jamban tidak sehat yang masih tinggi di daerah pedesaan dan kebiasaan CTPS masyarakat yang masih rendah. Sistem memproduksi dan mereproduksi informasi untuk menyelesaikan tuntutan dan tantangan lingkungan. Ada informasi yang menyelesaikan masalah, tapi ada juga informasi yang tidak menyelesaikan masalah.

Sistem yang mereduksi dan menyeleksi informasi lingkungan, kemudian memproduksi dan mereproduksi informasi untuk menyelesaikan kompleksitas lingkungannya. Merupakan indikator bahwa sistem komunikasi kesehatan telah berupaya untuk beradaptasi dengan kompleksitas lingkungan. Meskipun dalam beradaptasi ini, tidak semua kompleksitas lingkungan bisa diselesaikan sistem komunikasi kesehatan.

3. Kompleksitas Lingkungan dan Inisiasi Masyarakat

Kompleksitas lingkungan berupa keterbatasan fasilitas jamban sehat, dihadapi hampir semua masyarakat desa di wilayah Gresik, Lamongan, dan Bojonegoro. Masyarakat di salah satu desa di Gresik menginisiasi pembangunan fasilitas jamban sehat karena dua sebab, *pertama*, banyak anak mereka yang bekerja di pabrik. Upah kerja ini yang digunakan keluarga untuk membangun fasilitas jamban sehat.

Kedua, beberapa anak mereka menikah dengan orang lain yang berasal dari luar daerah. Keluarga yang tidak punya jamban sehat merasa malu bila keluarga menantu berkunjung ke rumah. Beberapa keluarga akhirnya membangun fasilitas jamban sehat agar tidak malu bila keluarga menantu berkunjung ke rumah.

Masalah pengetahuan kesehatan jamban dan CTPS yang sudah dimiliki masyarakat namun belum bisa mempraktekkannya, bukan hanya dialami masyarakat di pedesaan Gresik, namun juga di pedesaan Lamongan dan Bojonegoro. Masyarakat desa kesulitan biaya untuk membangun fasilitas jamban sehat.

www.penerbitkamudrim.com
Dilarang keras, mencetak naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Masyarakat di salah satu desa di Bojonegoro menghadapi kompleksitas yang beda lagi dengan Gresik. Masyarakat masih banyak yang buang air besar di sungai yang melewati tengah desa. Bila musim penghujan tidak begitu menimbulkan masalah pencemaran bau. Namun bila musim kemarau tiba, bau *feses* ini akan "menyengat" penduduk desa. Bahkan bila masuk ke desa ini di musim kemarau, maka kita akan disambut dengan bau *feses* ini.

Masyarakat desa kemudian memutuskan untuk memberi sanksi kepada warga yang buang air besar di sungai. Mereka menetapkan akan memotret siapa saja yang buang air besar di sungai. Foto ini akan dipasang di kantor balai desa. Sanksi sosial ini ternyata cukup efektif untuk mendorong warga membangun fasilitas jamban sehat.

Masyarakat desa sudah tidak ada yang buang air besar di sungai sekarang.

Sistem sudah beradaptasi dengan memproduksi dan mereproduksi informasi untuk menyelesaikan kompleksitas lingkungan. Namun kadang masyarakat juga berperan dalam menginisiasi informasi untuk menyelesaikan kompleksitas lingkungan. Inisiasi masyarakat ini biasanya bersifat khas sesuai konteks sosial, budaya, dan ekonomi mereka.

Simpulan

Sistem komunikasi kesehatan adalah proses produksi dan reproduksi informasi untuk menyelesaikan kompleksitas lingkungan berupa kesehatan jamban dan CTPS. Informasi ini diharapkan membantu masyarakat agar memiliki pengetahuan dan berperilaku sehat dalam hal buang air besar dan kecil serta CTPS. Kompleksitas terdiri dari tuntutan dan tantangan lingkungan yang terus berkembang.

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Sistem komunikasi kesehatan dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan, memproduksi informasi berupa media cetak untuk menyampaikan pesan kesehatan jamban dan CTPS. Selain itu sistem juga memproduksi media tradisional. Sistem mengirim petugas ke warkop untuk menyampaikan pesan kesehatan ke bapak-bapak petani tambak. Sistem juga mengirim petugas untuk mengikuti jamaah yasinan, tahlil, dan istighosah. Petugas menyampaikan pesan kesehatan melalui komunitas ini. Sistem juga mendistribusikan pesan CTPS ke siswa SD melalui UKS.

Sistem komunikasi kesehatan berada di tengah kompleksitas lingkungan. Sistem selalu dihadapkan pada tuntutan dan tantangan lingkungan yang terus berkembang. Sistem beradaptasi

dengan perubahan lingkungan melalui produksi dan reproduksi informasi. Sistem bisa menyelesaikan beberapa kompleksitas lingkungan yang dihadapi. Namun ada juga kompleksitas lingkungan yang belum bisa terselesaikan. Masyarakat juga turut membantu sistem dalam menyelesaikan kompleksitas lingkungan berupa kesehatan jamban dan CTPS.

Referensi

Albert, M. and Hilkermeier, L. (ed). 2004. *Observing International Relations: Niklas Luhmann and World Politics*. New York: Routledge.

Fuchs, S. 1999. Niklas Luhmann. *Sociological Theory*. Vol. 17, No. 1. pp. 117-119. American Sociological Association.

Griffin, EM. 2012. *A First Look at Communication Theory*. 8th Edition. New York: McGraw Hill.

Hagen, R. 2000. Observing Luhmann. *Acta Sociologica*. Vol. 43, No. 1. pp. 3-4. SAGE Publications Ltd.

Handaka, T., Dessy T. dan Hetti M. 2016. Pola Komunikasi Kesehatan Masyarakat Pedesaan di Jawa Timur. *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*. Terakreditasi Dirjen Dikti No: 80/DIKTI/Kep/2012. Vol. 18. No.1. Maret 2016. Hal 65-69. LPPM Universitas Padjadjaran.

Hardiman, F. B. 2008. Teori Sistem Niklas Luhmann. *Jurnal Filsafat Driyarkara*. Th. XXIX No. 3. Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara.

King, M. and Thornhill, C. 2003. *Niklas Luhmann's Theory of Politics and Law*. New York: Palgrave Macmillan.

King, M. and Thornhill, C. (ed). 2006. *Luhmann on Law and Politics: Critical Appraisals and Applications*. Oxford: Hart Publishing.

Lee, D. 2000. The Society of Society: The Grand Finale of Niklas Luhmann. *Journal of Sociological Theory*. No. 18 (July 2000). American Sociological Association. USA.

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Leydesdorff, L. 2000. Luhmann, Habermas, and the Theory of Communication. *Systems Research and Behavioral Science*. No. 17(3). pp.273-288.

Littlejohn, S.W. and Foss, K.A. 2008. *Theories of Human Communication*. 9th Edition. California: Thomson Wadsworth.

Littlejohn, S.W. and Foss, K.A. 2009. *Encyclopedia of Communication Theory*. California: SAGE Publications, Inc.

Luhmann, N. 1992. What is Communication. *Journal of the International Communication Association*. Volume 2. Issue 3. ISSN: 1050-3293. pp. 251-259.

Luhmann, N. 1995. *Social Systems*. Translated by John Bednarz, Jr. with Dirk Baecker. Stanford: Stanford University Press.

Luhmann, N. 2000. *The Reality of the Mass Media*. Translated by Kathleen Cross. California: Stanford University Press.

Luhmann, N. 1989. *Ecological Communication*. Translated by John Berdnarz, Jr. Chicago: The University of Chicago Press.

Luhmann, N. 2000. *Art as A Social System*. Translated by Eva M. Knodt. Stanford: Stanford University Press.

Luhmann, N. 1986. *Love as Passion: the Codification of Intimacy*. Translated by Jeremy Gaines and Doris L. Jones. Massachusetts: Harvard University Press.

Luhmann, N. 2004. *Law as A Social System*. Translated by Klaus A. Ziegert. New York: Oxford University Press.

Luhmann, N. 2002. *Theories of Distinction: Redescribing the Description of Modernity*. Translated by Joseph O'Neil [et al.]. California: Stanford University.

Monthly Report. 2010. *Activity Progress Community Based Total Sanitation: Development of Sanitation Community Access*. Water and Sanitation Program-World Bank (WSP-World Bank).

Ritzer, G. 2012. *Sociological Theory*. 8th Edition. Dialihbahasakan oleh Saut Pasaribu dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Turner, B.S. 2006. *The Cambridge Dictionary of Sociology*. Cambridge: Cambridge University Press.

Viskovatoff, A. 1999. Foundations of Niklas Luhmann's Theory of Social Systems. *Philosophy of the Social Sciences*. Vol. 29. No. 4. December 1999. pp. 481-516.

KBM INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

KBM INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit



Kebudayaan Lokal Reog Ponorogo (Studi Kasus Warok)

Abdullah dan Ahmad Fahrudin

INDONESIA
Dilarang menyalin atau mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Asal Usul Kota Ponorogo

Berdirinya Kabupaten Ponorogo dimulai setelah Raden Katong sampai di wilayah Wengker. Pada saat itu Wengker dipimpin oleh suryo Ngalam yang dikenal dengan Ki Ageng Kutu. Raden Katong memilih tempat yang memenuhi syarat untuk dijadikan pemukiman yaitu di dusun Plampitan, Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan (sekarang).

Melalui situasi dan kondisi yang penuh hambatan dan tantangan yang silih berganti, Raden Katong bersama Kyai Ageng Mirah dan Selo Aji beserta pengikutnya berupaya mendirikan pemukiman.

Kabupaten Ponorogo berdiri dari hasil musyawarah para tokoh pendiri kota Ponorogo yaitu Raden Katong, Selo Aji, Kyai Mirah, dan Jayadipa di oro-oro (tanah gersang dan luas). Sebelumnya, Raden Katong melihat ada sesuatu di tengah-tengah padang rumput yang luas. Raden Katong melihat benda yang berbeda sejumlah tiga buah. Beliau melihat tiga pusaka yaitu tombak, payung yang terbuka, dan semacam sabuk. Ketiga pusaka tersebut peninggalan Prabu Brawijaya V. Menurut cerita, pusaka tersebut tidak bisa dilihat oleh sembarang orang. Orang yang mampu melihat ketiga pusaka tersebut adalah orang yang setia terhadap Prabu Brawijaya V dan Raden Kaatong merupakan orang yang diharapkan bisa menggantikan Sang Prabu. Ketiga pusaka tersebut adalah Tombak Tunggul Naga, Payung Tunggul Wulung, dan Sabuk Cinde Puspito yang diwariskan kepada Raden Katong.

Raden Katong menyembah tiga kali lalu mengambil payung Tunggul Wulung, Selo Aji mengambil tombak Tunggul Naga, dan Kyai Ageng Mirah mengambil sabuk (ikat pinggang) Cinde Puspito. Setelah ketiga barang itu diambil, terdengar suara gemuruh tiga kali. Bersamaan dengan itu, tanah berhamburan ke atas dan jatuh ke kanan kiri. Tanah yang berjatuhan tadi akhirnya menjadi gumuk (gundukan tanah) sebanyak lima buah. Adapun tempat suara gemuruh terjadi, muncullah gua dengan lubang menganga. Kelak setelah empat puluh hari gua tersebut tertutup kembali seperti semula. Jayadipa memberikan nama gua tersebut, yaitu Gua Sigala-gala. Adapun gundukan tanah tadi, diberi nama Gunung Lima dan Gunung Sepikul, dari situlah asal mula Ponorogo. Musyawarah berlanjut untuk memberikan nama kota yang akan didirikan tersebut. Setelah mufakat dan kemauan tirakat, mereka memutuskan nama kota tersebut adalah Pramanaraga.

Pramana artinya perana yaitu menyatunya sumber cahaya dari matahari, bulan, dan bumi yang berpengaruh menyinari kehidupan manusia di alam raya. Jadi pramana dan raga diumpamakan seperti madu dan manisnya, atau bunga dan sarinya, umpama api dan nyalanya. Sedangkan pana berarti mengerti akan segala situasi, mengerti dengan pemahaman yang sesungguhnya.

Kata Pramanaraga lama kelamaan berubah menjadi Ponorogo. Pono bermakna pandai, mengerti, yaitu sudah mengerti pada semua keadaan. Rogo bermakna badan, jadi Ponorogo berarti manusia yang telah mengetahui, mengerti kepada dirinya sendiri yaitu manusia yang sudah mengetahui unggah-ungguh (sopan santun) atau manusia yang sudah mengetahui tata krama. Hari jadi Kabupaten Ponorogo diperingati setiap tanggal 11 Agustus, karena pada tanggal 11 Agustus 1496 Batara Katong dinobatkan sebagai adipati pertama Kadipaten Ponorogo. Setiap memperingati hari jadi Kabupaten Ponorogo diadakan Festival Reyog Mini. Festival ini diikuti oleh beberapa grup Reyog dari kecamatan yang ada di Ponorogo, sanggar, dan sekolah SD maupun SMP. Berbeda dengan Festival Reyog Nasional, acara ini hanya se- Karisidenan Madiun tidak diikuti oleh peserta dari luar Jawa. Pada tahun 1837, Ponorogo berpindah dari Kota Lama ke Kota Tengah menjadi Kabupaten Ponorogo. Setiap grebeg suro selalu dilakukan kirab pusaka dari kota lama ke kota baru (kota tengah). Biasanya acara kirab pusaka dilaksanakan pada saat malam satu suro. Kirab Pusaka diikuti oleh bupati dan wakil bupati beserta stafnya, kepala desa dari semua kecamatan yang ada di Ponorogo, dan partisipasi dari sekolah-sekolah di Kabupaten Ponorogo. Semenjak tahun 1944 hingga sekarang Kabupaten Ponorogo sudah berganti kepemimpinan sebanyak 17 kali.

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Ponorogo merupakan kota asal kesenian Reog itu lahir. Selain itu, warok juga merupakan bagian yang penting dari kesenian Reog dan sekaligus tokoh yang disegani oleh masyarakat Ponorogo.

Kesenian Reyog tidak hanya dhadhak merak besar akan tetapi juga ada Reyog mini. Selain kesenian Reog, Kabupaten Ponorogo memiliki banyak kesenian tradisional yang juga tidak kalah akan kualitasnya.

Secara administratif Kabupaten Ponorogo terdiri dari 21 Kecamatan seperti yang tertera sebelumnya. Menurut sensus penduduk tahun 2014, penduduk Kabupaten Ponorogo berjumlah 865.809 jiwa yang terdiri dari 432.578 penduduk laki-laki dan 433.231 penduduk perempuan.

Sebagian besar penduduk Kabupaten Ponorogo bekerja sebagai petani yaitu sebanyak 1032 orang, sedangkan buruh tani sebanyak 203 orang. Namun juga ada yang bekerja di bidang peternakan sebanyak 12 orang. Selain itu juga banyak yang bekerja menjadi PNS sebanyak 137 orang, TKI sebanyak 15 orang, dan sisanya karyawan swasta. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Ponorogo bermata pencaharian sebagai petani, baik petani lahan maupun petani penggarap.

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Agama yang dianut oleh penduduk Kabupaten Ponorogo beragam. Menurut data dari Badan Pusat Statistik dalam sensus penduduk tahun 2010, penganut agama Islam berjumlah 839.127 jiwa, Kristen berjumlah 2.864 jiwa, Katolik berjumlah 2.268 jiwa, Budha berjumlah 261 jiwa, Hindu berjumlah 82 jiwa, dan Kong Hu Cu berjumlah 14 jiwa, tidak terjawab dan tidak ditanyakan berjumlah 10.640 jiwa. Jumlah keseluruhan tempat beribadah di Ponorogo pada tahun 2010 sejumlah 4233 buah. Masjid berjumlah 1448 buah, Mushola berjumlah 2754 buah, Gereja Protestan berjumlah 21 buah, Gereja Katolik berjumlah 8 buah, dan Wihara berjumlah 2 buah.

Kebudayaan dan adat istiadat masyarakat Ponorogo dipengaruhi oleh kebudayaan dan adat istiadat masyarakat Jawa Tengah. Beberapa budaya masyarakat Ponorogo adalah Larung Risalah Do'a, Grebeg Suro, dan Kirab Pusaka. Masyarakat Ponorogo

memiliki adat istiadat yang sangat khas yaitu, becekan dan sejarah. Becekan yaitu suatu kegiatan dengan mendatangi dan memberikan bantuan berupa bahan makanan; beras, gula dan sejenisnya kepada keluarga, tetangga atau kenalan yang memiliki hajat pernikahan atau khitanan. Sedangkan sejarah yaitu silaturahmi ke tetangga dan sanak saudara pada saat hari raya Idul Fitri yang biasanya dilakukan dengan mendatangi rumah orang yang berumur lebih tua.

Reog dan Warok

Kesenian merupakan bagian dari kebudayaan yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Di dalam kehidupan manusia terdapat adat istiadat yang menciptakan berbagai jenis budaya dan merupakan ciri khas suatu bangsa. Kesenian tumbuh dan berkembang dalam masyarakat seiring dengan pertumbuhan serta perkembangan sosial budaya masyarakat pendukungnya, sampai sekarang dikenal berbagai macam cabang kesenian diantaranya seni rupa, seni musik, seni tari, dan drama (Koenjaraningrat, 1993:115).

INDONESIA
www.penerbitbukamudrah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Ponorogo merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, Ponorogo juga disebut Kota Reyog atau Bumi Reyog karena daerah ini merupakan asal dari kesenian Reog. Kesenian Reog merupakan kesenian tradisional yang penuh dengan nilai-nilai historis dan legendaries. Nilai-nilai tersebut tumbuh dan berkembang sejak dahulu hingga sekarang. Selain itu, kesenian Reyog ini juga merupakan kebanggaan daerah dan kebanggaan nasional. Reog adalah salah satu bukti kebudayaan daerah di Indonesia.

Reyog sampai sekarang masih dilestarikan oleh masyarakat Ponorogo. Pertunjukan kesenian Reog terdiri dari beberapa penari yakni penari Jathil, Bujang ganong, Warok, Klonosewandono, dan

Dhadhak merak. Kesenian ini muncul dari masyarakat pedesaan yang sederhana, bentuk penyajiannya juga sederhana. Masyarakat Ponorogo masih menjaga dengan baik kesenian tradisi ini. Dalam kesenian ini banyak hal yang terkesan mistis. Salah satu tokoh dalam kesenian Reog yang terkenal kemistisannya yaitu Warok.

Warok merupakan kebanggaan masyarakat Ponorogo yang mempunyai tekad suci serta siap memberikan tuntunan dan perlindungan tanpa pamrih. Warok berasal dari kata wewarah. Artinya, seseorang menjadi Warok karena mampu memberi petunjuk atau pengajaran kepada orang lain tentang hidup yang baik. Warok adalah orang yang sudah sempurna dalam laku hidupnya, dan sampai pada pengendapan batin. Menjadi Warok tidaklah mudah, harus mempunyai kesaktian yang diperoleh dari pusaka ataupun pada saat menuntut ilmu kanuragan dan kebatinan. Ilmu kanuragan itu diperlukan sebagai bentuk pertahanan fisik terhadap ancaman atau bahaya dari luar diri warok. Karena Warok itu diibaratkan prajurit yang kapanpun dan dimanapun terjadi peperangan di daerahnya, Warok harus selalu siap untuk berjuang menjaga daerahnya dan harus selalu siap untuk menerima tantangan. Warok juga harus menguasai apa yang disebut Reh Kamusankan Sejati yang artinya jalan kemanusiaan sejati. Dalam hidupnya, Warok selalu memberi pertolongan kepada masyarakat, negara, karena Allah atau tanpa pamrih. Berwatak satria, jujur, suka memberi pertolongan, berdarma bakti kepada negara dan bangsa, belas kasih kepada sesama, banyak ilmu dan sakti, serta menjadi suri teladan. Sifat-sifat itulah yang melekat dalam jiwa Warok.

INDONESIA
www.penerbithukumurah.com
Dilarang keras, mencetak haskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Reyog sampai sekarang masih dilestarikan oleh masyarakat Ponorogo. Pertunjukan kesenian Reog terdiri dari beberapa penari yakni penari Jathil, Bujang ganong, Warok, Klonosewandono, dan Dhadhak merak. Kesenian ini muncul dari masyarakat pedesaan yang sederhana, bentuk penyajiannya juga sederhana. Masyarakat

Ponorogo masih menjaga dengan baik kesenian tradisi ini. Dalam kesenian ini banyak hal yang terkesan mistis. Salah satu tokoh dalam kesenian Reog yang terkenal kemistisannya yaitu Warok.

Warok merupakan kebanggaan masyarakat Ponorogo yang mempunyai tekad suci serta siap memberikan tuntunan dan perlindungan tanpa pamrih. Warok berasal dari kata wewarah. Artinya, seseorang menjadi Warok karena mampu memberi petunjuk atau pengajaran kepada orang lain tentang hidup yang baik. Warok adalah orang yang sudah sempurna dalam laku hidupnya, dan sampai pada pengendapan batin. Menjadi Warok tidaklah mudah, harus mempunyai kesaktian yang diperoleh dari pusaka ataupun pada saat menuntut ilmu kanuragan dan kebatinan. Ilmu kanuragan itu diperlukan sebagai bentuk pertahanan fisik terhadap ancaman atau bahaya dari luar diri warok. Karena Warok itu diibaratkan prajurit yang kapanpun dan dimanapun terjadi peperangan di daerahnya, Warok harus selalu siap untuk berjuang menjaga daerahnya dan harus selalu siap untuk menerima tantangan. Warok juga harus menguasai apa yang disebut Reh Kamusankan Sejati yang artinya jalan kemanusiaan sejati. Dalam hidupnya, Warok selalu memberi pertolongan kepada masyarakat, negara, karena Allah atau tanpa pamrih. Berwatak satria, jujur, suka memberi pertolongan, berdarma bakti kepada negara dan bangsa, belas kasih kepada sesama, banyak ilmu dan sakti, serta menjadi suri teladan. Sifat-sifat itulah yang melekat dalam jiwa Warok.

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Beberapa syarat harus dipenuhi untuk menjadi Warok sejati. Adapun syaratnya antara lain harus mengekang segala hawa nafsu dan tidak berhubungan dengan wanita. Warok harus memiliki Gemblak (lelaki berusia 12-15 tahun yang berparas tampan dan terawat). Para Warok berlomba-lomba dalam memelihara Gemblak. Hal ini sudah menjadi tradisi dalam komunitas seniman Reog dahulunya. Bahkan sampai beradu kekuatan untuk

memperebutkan seorang Gemblak idaman. Warok yang memelihara banyak Gemblak berarti memiliki harta atau kaya. Gemblak tidak hanya disekolahkan dan dirawat, akan tetapi juga diajari sopan santun, menari dan berlatih kesenian Reog.

Kesenian Reyog tidak bisa terlepas dari tradisi Warok. Karena peran kesenian Reyog dan Warok merupakan simbol budaya yang dimiliki masyarakat Ponorogo. Dalam perkembangannya, tradisi Warok ini menjadi komunitas atau paguyuban yang disebut konco Reyog. Di dalam paguyuban ini terdiri atas 3 komponen, yaitu Warok, Warokan, dan Jathil. Warokan disini merupakan orang yang memakai baju hitam khas Warok dan mengikuti para Warok. Sedangkan Jathil merupakan sosok Gemblak yang dirias seperti wanita.

Selain itu ada yang namanya jathilan, Jathilan merupakan penari dalam reog yang memainkan peran prajurit berkuda Kerajaan Bantarangin (dalam cerita rakyat Prabu Kelana Sewandana). Sosok kuda tersebut diwakili oleh jaranan (eblek) yang dijepit diantara kedua kaki (selangkangan), terbuat dari anyaman bambu dan dihiasi dengan hiasan-hiasan tertentu. Terdapat dua kategori Jathil, yaitu : Jathil Obyog dan Jathil Salon. Jathil Obyog adalah sebutan untuk penari Jathilan dalam reog obyogan, sedangkan Jathil Salon adalah sebutan untuk penari Jathilan dalam reog festival (Zamzam 113).

Pada awalnya penari Jathilan adalah laki-laki yang tampan dan gagah, layaknya seorang prajurit, namun kini digantikan oleh perempuan, karena para penari laki-laki sekarang malu jika harus menari Jathilan. Rasa malu tersebut disebabkan karena konsekuensi seorang penari Jathilan yang sering dipegang, dijawil bahkan dicium oleh penonton, mengingat tradisi gemblakan yang sarat dengan homoseksualitas sebelum tahun 1980 yang lalu, dimana

penari Jathilan adalah para gemblak/pemuda tampan/bagus yang dipelihara oleh Warok.

Konotasi negatif dari seorang gemblak adalah tempat pemuasan hawa nafsu seorang Warok karena pantangan Warok untuk berhubungan seksual dengan wanita, demi menjaga kekuatan ilmu kedigdayaan yang dimilikinya. Konon, seorang Warok diberi wewaler (peringatan) oleh gurunya agar menjalankan beberapa pantangan, antara lain : mangan/makan, mendem/mabuk, madon/berhubungan dengan wanita. Walaupun tradisi gemblakan sudah punah sejak tahun 1980 karena dilarang oleh Pemerintah setempat, pandangan seperti itu belum hilang di mata masyarakat hingga saat ini, sehingga para penari Jathilan laki-laki menghindarinya. Namun kondisi tersebut mempunyai konotasi yang lebih negatif lagi karena peran Jathilan kini dimainkan oleh perempuan. Shodig Pristiwanto, S.Sn., Staf Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Ponorogo, Dewan Juri Festival Reog dan Pengamat Reog, menyatakan bahwa jika yang dipegang, dijawil, dicium itu laki-laki, sudah biasa dan masih bisa dikatakan lucu, bahkan sering dibuat bahan guyonan(candaan) para penonton, tetapi jika yang dipegang, dijawil, dicium itu perempuan, tidak sepantasnya terjadi pada suatu pertunjukan karena mengarah pada tindakan pelecehan seksual, apalagi gerakannya memang sensual sehingga secara tidak sadar membangkitkan hasrat seksual penonton yang mayoritas adalah laki-laki. Tidak jarang para Jathilan perempuan itu menonjolkan aura kewanitaannya di depan masyarakat umum termasuk anak-anak kecil, tambahan lagi dengan kostum yang ketat dan transparan.

www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Seni dalam Pandangan Islam

Islam dapat menerima semua hasil karya manusia selama sejalan dengan pandangan Islam menyangkut wujud alam raya ini.

Namun demikian wajar dipertanyakan bagaimana sikap satu masyarakat dengan kreasi seninya yang tidak sejalan dengan budaya masyarakatnya

Dalam konteks ini, perlu digaris bawahi bahwa Al-Quran memerintahkan kaum Muslim untuk menegakkan kebajikan, memerintahkan perbuatan makruf dan mencegah perbuatan munkar. Ma'ruf merupakan budaya masyarakat sejalan dengan nilai-nilai agama, sedangkan munkar adalah perbuatan yang tidak sejalan dengan budaya masyarakat.

Dari sini, setiap Muslim hendaknya memelihara nilai-nilai budaya yang makruf dan sejalan dengan ajaran agama, dan ini akan mengantarkan mereka untuk memelihara hasil seni budaya setiap masyarakat. Seandainya pengaruh --apalagi yang negatif-- dapat merusak adat-istiadat serta kreasi seni dari satu masyarakat, maka kaum Muslim di daerah itu harus tampil mempertahankan makruf yang diakui oleh masyarakatnya, serta membendung setiap usaha --dari manapun datangnya-- yang dapat merongrong ma'ruf tersebut. Bukankah Al-Quran memerintahkan untuk menegakkan makruf.

Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Dalam kesenian Reog Ponorogo, salah satu tokoh atau pemerannya adalah warok, warok memiliki sifat pemberani, penolong. Warok adalah orang yang sudah sempurna dalam laku hidupnya, dan sampai pada pengendapan batin. Menjadi Warok tidaklah mudah, harus mempunyai kesaktian yang diperoleh dari pusaka ataupun pada saat menuntut ilmu kanuragan dan kebatinan. Ilmu kanuragan itu diperlukan sebagai bentuk pertahanan fisik terhadap ancaman atau bahaya dari luar diri warok. Karena Warok itu diibaratkan prajurit yang kapanpun dan dimanapun terjadi peperangan di daerahnya, Warok harus selalu siap untuk berjuang menjaga daerahnya dan harus selalu siap untuk menerima

tantangan. Dalam Al-Quran sifat ini tergambarkan pada surat Al-Maidah: 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya. (Al Maidah: 2).

ayat ini merupakan penegasan perintah dari Allah SWT akan kewajiban tolong menolong dalam kebaikan dan takwa serta larangan untuk tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ayat ini pun tergambarkan pada salah satu sifat warok di kesenian reog ponorogo. Sebagai warok, seorang warok harus memiliki sifat saling menolong dan menegakkan kebenaran.

Ada hal yang menarik dari firman Allah SWT yang disebutkan di awal yaitu bahwa redaksi seperti ayat ini "Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa" ternyata hanya tersebut sekali dalam Al-Qur'an, sehingga ayat ini harus difahami dalam konteks umum; umum dari segi sasarannya dan umum dari segi jenis kebaikan yang dituntutnya.

Ibnu Katsir memahami makna umum ayat ini berdasarkan redaksinya tolong menolonglah kalian bahwa Allah swt memerintahkan semua hamba-Nya agar senantiasa tolong menolong dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang termasuk kategori Al-Birr dan mencegah dari terjadinya kemungkaran sebagai realisasi dari takwa. Sebaliknya Allah swt melarang mendukung segala jenis perbuatan batil yang melahirkan dosa dan permusuhan.

Selanjutnya Ibnu Katsir mengetengahkan dua hadits untuk memperkuat dan menjelaskan ayat ini, yaitu:

Pertama, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi, "Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar atas perlakuan mereka adalah lebih baik dan besar pahalanya daripada mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar atas perilaku mereka" (Imam Ahmad).

Kedua, hadits yang menyebutkan tentang perintah menolong siapapun, baik yang terzhalimi maupun yang menzhalimi. Rasulullah saw bersabda, "Tolonglah saudaramu yang menzhalimi dan yang terzhalimi". Maka para sahabat bertanya, "Menolong yang terzhalimi memang kami lakukan, tapi bagaimana menolong orang yang berbuat zhalim?". Rasulullah menjawab, "Mencegahnya dari terus menerus melakukan kezhaliman itu berarti engkau telah menolongnya". (Bukhari dan Ahmad).

Bentuk ta'awun secara aplikatif, dijabarkan oleh Al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya. Beliau menyebutkan sebagai contoh misalnya beberapa bentuk ta'awun yang bisa dilakukan berdasarkan ayat ini, diantaranya: seorang alim membantu manusia dengan ilmunya, seorang yang kaya membantu orang lain dengan hartanya, seorang yang berani membantu dengan keberaniannya berjuang di jalan Allah swt dan begitu seterusnya. Masing-masing membantu orang lain sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimilikinya.

KBM INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Simpulan

Ponorogo merupakan kota asal kesenian Reog itu lahir. Selain itu, warok juga merupakan bagian yang penting dari kesenian Reog dan sekaligus tokoh yang disegani oleh masyarakat Ponorogo. Kesenian Reyog tidak hanya dhadhak merak besar akan tetapi juga ada Reyog mini. Selain kesenian Reog, Kabupaten Ponorogo

memiliki banyak kesenian tradisional yang juga tidak kalah akan kualitasnya.

Dalam kesenian Reog ada salah satu pemeran yang bernama warok. Warok merupakan kebanggaan masyarakat Ponorogo yang mempunyai tekad suci serta siap memberikan tuntunan dan perlindungan tanpa pamrih. Warok berasal dari kata wewarah. Artinya, seseorang menjadi Warok karena mampu memberi petunjuk atau pengajaran kepada orang lain tentang hidup yang baik. Warok adalah orang yang sudah sempurna dalam laku hidupnya, dan sampai pada pengendapan batin. Menjadi Warok tidaklah mudah, harus mempunyai kesaktian yang diperoleh dari pusaka ataupun pada saat menuntut ilmu kanuragan dan kebatinan. Ilmu kanuragan itu diperlukan sebagai bentuk pertahanan fisik terhadap ancaman atau bahaya dari luar diri warok. Karena Warok itu diibaratkan prajurit yang kapanpun dan dimanapun terjadi peperangan di daerahnya, Warok harus selalu siap untuk berjuang menjaga daerahnya dan harus selalu siap untuk menerima tantangan. Warok juga harus menguasai apa yang disebut Reh Kamusankan Sejati yang artinya jalan kemanusiaan sejati. Dalam hidupnya, Warok selalu memberi pertolongan kepada masyarakat, negara, karena Allah atau tanpa pamrih. Berwatak satria, jujur, suka memberi pertolongan, berdarma bakti kepada negara dan bangsa, belas kasih kepada sesama, banyak ilmu dan sakti, serta menjadi suri teladan. Sifat-sifat itulah yang melekat dalam jiwa Warok.

www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Salah satu ayat Al-Quran yang menggambarkan sifat tokoh warok adalah Surat Al-Maidah ayat 2 "…Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya. (Al Maidah: 2)

ayat ini merupakan penegasan perintah dari Allah SWT akan kewajiban tolong menolong dalam kebaikan dan takwa serta larangan untuk tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.

Referensi

Zamzam, Muhammad Fauzannafi. (2005). Reog Ponorogo: Menari Diantara Dominasi dan Keragaman. Yogyakarta: Kepel Press.

Sutarto, Ayu. "Reog dan Ludruk: Dua Pusaka Budaya dari Jawa Timur yang Masih Bertahan." Makalah untuk Jelajah Budaya: Pengenalan Budaya Lokal Sebagai Wahana Peningkatan Pemahaman Keanekaragaman Budaya, Javanologi, Yogyakarta (2009).

http://ayatalquran.net/2014/12/al-quran-terjemah-bahasa-indonesia/

Suromenggolo warok ponorogo/books.google.co.id/books PJpGX4C&pg=PT3&lpg=PT3&dq=buku+suromenggolo+warok+2&source=bl&ots=-2tffzjXgv&sig=mRs4xQAAkwAahiaAQLTtxiqhSik&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwi1s6Kgvv3UAhWHo48KHdmCDCMQ6AEIPzAI#v=onepage&q=buku%20suromenggolo%20warok%202&f=false

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, menfotocopy naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit



Kontestasi Etnis Tionghoa Dalam Budaya Madura Yang Islami

Teguh Hidayatul Rachmad

INDONESIA
Dilarang keras memperbanyak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Pendahuluan

Masyarakat Cina memiliki rasa identitas yang kuat dari catatan sejarah Cina yang panjang. Menurut Mathews dan Mathews, satu alasan dibalik rasa bangga itu ialah bahwa "masa lalu mengobsesi masyarakat cina". Sesuai dengan penemuan arkeologi, masa prasejarah Cina telah dimulai 5.000 tahun yang lalu. Masyarakat Cina mulai mengumpulkan catatan

sejarahnya 3.500 tahun yang lalu selama masa Dinasti Shang yang membuat Cina menjadi peradaban dunia yang berkelanjutan yang paling tua. Nilai historis lain yang terus berlangsung sepanjang sejarah Cina adalah pandangan masyarakat Cina tentang marga dan keluarga lebih penting daripada negara. Pentingnya kekerabatan pada masyarakat Cina menjadi contoh lain dari ikatan yang terjadi antara sejarah budaya dan cara pandangnya terhadap dunia. Sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi Cina dan keinginan untuk berperan besar dalam kancah internasional, banyak negara telah mengalami peningkatan hubungan antar budaya dengan masyarakat Cina. Masyarakat Cina kemudian tersebar ke berbagai penjuru dunia salah satunya di Indonesia.

Di Indonesia masyarakat Cina kemudian menamai dirinya sebagai etnis Tionghoa. Leluhur orang Tionghoa-Indonesia bermigrasi secara bergelombang sejak ribuan tahun yang lalu melalui kegiatan perniagaan.Ramainya interaksi perdagangan di daerah pesisir tenggara Cina, menyebabkan banyak sekali orang- orang yang juga merasa perlu berlayar untuk berdagang.Demikian seterusnya, para pedagang tersebut kemudian memutuskan untuk menetap dan melanjutkan kehidupan dengan menikahi masyarakat pribumi. Proses akulturasi budaya antara etnis tionghoa dan masyarakat pribumi, khususnya di bangkalan madura menjadi satu keunikan yang khas untuk diteliti, terutama sistem kebudayaannya yang terdiri dari : bahasa, sistem pengetahuan, sistem masyarakat atau organisasi sosial, sistem teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi dan kesenian.

www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Pembahasan

1. Bahasa

Orang – orang TiongHoa yang berada di Madura, adalah sebenarnya memang asli orang Madura itu sendiri, namun tidak

mengenali bagaimana silsilahnya. Masyarakat yang memang masyarakat Madura mereka menggunakan bahasa daerah itu sendiri, tidak menggunakan bahasa Mandarin. Agama yang dianut oleh tionghoa adalah Kristen protestan dan katolik. Penggunaan bahasa komunikasi daerah yang membedakan nada atau intonasi ketika berkomunikasi dalam tempo cepat atau lambat, namun keseluruhannya sama saja. Penyesuaian bahasa yang dilakukan oleh etnis tionghoa merupakan bentuk dari interferensi bahasa.

Interferensi bahasa yaitu gangguan dalam bahasa, yang menggunakan pertama kali istilah interferensi ini dalam sosiolinguistik adalah Weinrich (1968:1) yang mengatakan bahwa interferensi bahasa adalah suatu bentuk penggunaan bahasa yang menyimpang dari kaidah-kaidah yang ada sebagai akibat adanya kontak bahasa karena penutur lebih dari satu bahasa. Selain itu Weinrich juga menegaskan bahwa interferensi adalah pemindahan unsur-unsur bahasa tertentu.

Cara bahasa etnis tionghoa yaitu menggunakan bahasa Madura asli. Tetapi jika pada saat ke Gereja mereka ada yang menggunakan bahasa Indonesia tetapi tidak jarang juga mereka menggunakan bahasa keseharian, namun tetap pada konteks atau lawan bicara kita terhadap situasional atau kondisional. Dalam lingkungan keluarga pun etnis tionhoa menggunakan bahasa Madura, namun tetap diselingi dengan bahasa Indonesia, karena maksudnya untuk mengajarkan anak-anaknya ketika mereka berhubungan atau berkomunikasi dengan masyarakat luar.

2. Sistem Pengetahuan

Dalam segi ilmu pengetahuan, etnis Tionghoa sangat dikenal sekali dengan ilmu pengobatan tradisionalnya. Pengobatan tradisional Cina percaya bahwa segala pross dalam tubuh manusia berhubungan dan berinteraksi dengan lingkungan. Praktek pengobatan tersebut berupa pengobatan herbal, akupuntur dan

pijat. Praktek pengobatan ini telah berkembang dan digunakan selama ribuan tahun. Ketika etnis Tionghoa bermigrasi ke Indonesia, pengetahuan mengenai pengobatan tradisional ini turut dibawa ke Indonesia dan memiliki sumbangsih yang cukup besar terhadap pengobatan tradisional di Indonesia. Hingga saat ini di Indonesia sudah banyak pengembangan yang dilakukan dalam metode pengobatan yang diperkenalkan oleh etnis Tionghoa ini. Seiring perkembangan zaman banyak alat yang digunakan untuk melakukan penyembuhan misalnya dengan melakukan akupuntur pada syaraf-syaraf tubuh manusia.

Akupuntur merupakan praktik tradisional dengan menusukkan jarum ke tubuh untuk menyembuhkan penyakit dan untuk menghilangkan rasa sakit.Teori yang digunakan dalam pengobatan mengacu pada acuan filsafat termasuk teori yin dan yang. Matocha menjelaskan orang Cina percaya bahwa kehidupan yang sehat dan bahagia dapat diperoleh jika dua kekuatan yin dan yang seimbang. Kemampuan pengobatan ini awalnya memang dibawa oleh para pendatang yang kemudian menetap di Indonesia. Selain itu, sistem penanggalan Tionghoa menggunakan sistem kalender lunisolar yaitu sebuah kalender yang menggunakan fase bulan sebagai acuan utama namun juga menambah pergantian musim di dalam perhitungan tahunnya. sehingga jumlah bulan dalam setahunnya dapat mencapai 12 sampai 13 bulan.

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Dalam melakukan analisis mengenai etnis Tionghoa yang ada Pulau Madura utamanya di Kabupaten Bangkalan, peneliti melakukan wawancara terhadap tiga keluarga etnis Tionghoa di tiga daerah yang berbeda di Bangkalan tepatnya di Desa Arosbaya, Pecinan dan Juga Gedongan. Dari ketiganya sepakat bahwa sistem pengetahuan dan pendidikan sangatlah penting. Dilihat dari segi pendidikan, mereka rata-rata menyekolahkan anaknya hingga pada sekolah jenjang tinggi. Hal ini dimaksudkan agar anak-anak mereka mampu bersaing dan juga mendapatkan kemudahan di

masa depan. Paling tidak ada bekal untuk meneruskan kehidupannya di masa yang akan datang. Bahkan etnis Tionghoa termasuk orang yang hemat, seperti halnya ketika peneliti menanyakan kepada salah satu narasumber di daerah Arosbaya yang menyatakan bahwa mereka (orang tua) memiliki prinsip bahwa mereka bekerja yang mayoritasnya berdagang salah satunya guna untuk mencukupi kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Namun di daerah Bangkalan sendiri hanya ada satu tempat yang khusus untuk tempat bersekolah bagi orang-orang Tionghoa atau Katolik. Padahal masyarakat Tionghoa di Bangkalan juga tidak sedikit. Maka dari itu banyak orang tua yang kemudian menyekolahkan anak-anak mereka di kota Surabaya yang menyediakan fasilitas lebih daripada di Bangkalan. Ketika masyarakat Tionghoa memiliki prinsip untuk melakukan sesuatu maka mereka akan konsisten dalam pelaksanaannya. Hal ini dimaksudkan agar tujuan mereka dapat tercapai.

Namun yang menjadi sangat disayangkan adalah tidak adanya pelestarian sistem pengetahuan oleh masyarakat etnis Tionghoa itu sendiri. Sistem pengetahuan mengenai pengobatan, peninggalan, maupun tradisi sudah tidak lagi dianut oleh kebanyakan etnis Tionghoa pada saat ini. Seperti yang telah kami tanyakan pada tiga keluarga Tionghoa yang ada di Bangkalan tempo hari, bahwa mereka tidak paham dengan hal-hal tersebut.

www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Hal ini karena sudah adanya akulturasi budaya yakni percampuran budaya dari masyarakat etnis Tionghoa itu sendiri dengan masyarakat lokal baik suku Jawa maupun Madura. Adanya peleburan budaya inilah yang kemudian menyebabkan banyak perubahan dalam pola perilaku dalam masyarakat. Masyarakat Tionghoa Bangkalan saat ini kebanyakan adalah hasil dari keturunan campuran sehingga dari generasi yang sebelumnya mereka tidak diajarkan bagaimana budaya yang dulunya menjadikan anam etnis Tionghoa menjadi besar. Kebanyakan

masyarakat pada umumnya sudah mulai mengikuti kehidupan modern, sehingga tradisi yang dulunya harus dilakukan kini sudah tidak lagi dilaksanakan bahkan tidak paham dengan sistem pengetahuan yang dulunya dibawa oleh masyarakat Tionghoa itu sendiri.

Berry menjelaskan dalam teori akulturasi sebagai "proses dari perubahan budaya dan psikologi yang terjadi akibat dari hubungan dua atau lebih kelompok budaya dan anggotanya". Dalam tahap individual, hal ini melibatkan proses panjang yang membutuhkan banyak pengetahuan melalui budaya baru.

3. Sistem Organisasi

Seperti yang diketahui bahwa sistem organisasi adalah suatu struktur organisasi yang ada di masyarakat yang menandakan adanya tatanan sosial yang ada di masyarakat sehingga suatu masyarakat tersebut bisa membentuk suatu kelompok yang mempunyai aturan-aturan yang dianutnya dalam menjalani hidup bermasyarakat dengan individu lainnya tidak hanya pada masyarakat pada umumnya namun pada masyarakat etnis apapun juga akan membentuk suatu sistem organisasi atau tatanan sosial.

INDONESIA
www.penerbitbukuindonesia.com
Dilarang keras mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Etnis Tionghoa yang ada di daerah Bangkalan dapat diketahui bahwa pulau madura dikenal dengan pulau yang islami, namun dibalik itu semua ada salah satu etnis yaitu etnis Tionghoa. Pada etnis tionghoa memang minoritas dalam lingkungan masyarakat yang ada di bangkalan dan tidak banyak orang tahu kalau di daerah bangkalan ini terdapat etnis Tionghoa. Meskipun etnis Tionghoa ini termasuk minoritas di lingkungan masyarakat bangkalan, namun sistem organisasi sudah berjalan dengan baik, namun kenyataan yang ada di setiap desa itu berbeda-beda. Seperti halnya di daerah Arosbaya-Bangkalan dengan nama ibu Suwarti yang termasuk etnis Tionghoa. Ibu suwarti memang mengetahui kalau struktur sosial memang dibutuhkan dalam bermasyarakat, namun di

daerahnya tersebut tidak ada yang namanya karang taruna (organisasi pemuda). Etnis tionghoa di Arosbaya mempunyai perkumpulan dengan sesama etnis tionghoa yakni setiap 3 bulan sekali dengan agenda kumpulan biasa atau sekedar temu kangen dan agenda tetap yakni dengan adanya arisan antar etnis tionghoa.

Selain ada di daerah arosbaya ada juga etnis tionghoa yang tinggal di daerah Pecinan, suatu daerah yang lebih dekat dengan pusat keramaian kota bangkalan. Masyarakat di daerah pecinan mempunyai sistem toleransi yang sangat kurang atau bahkan tidak ada. hal ini dikarenakan individualisme masih diterapkan di kalangan lingkungan masyarakat perkotaan, seperti yang dijelaskan oleh Oei Kok-Tejiang bahwa dalam lingkungannya tersebut hampir susah dalam berorganisasi social dengan masyarakatnya sekitarnya karena Oei Kok-Tejiang mengatakan bahwa aktivitas yang ada di rumahnya atau yang dilakukannya memang sangat menyita waktu. Oei Kok-Tejiang mengatakan bahwa dirinya juga sangat sibuk karena dari pagi sampai siang melakukan aktivitas dalam mengurusi kebutuhan rumah tangganya dan setelah aktivitas pun langsung istirahat bisa dikatakan bahwa waktu dari Oei Kok-Tejiang ini pun hampir tersita dalam melaksanakan kebutuhan rumah tangganya.

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Oei Kok-Tejiang juga mengatakan bahwa kegiatan karang taruna dan kelompok ibu PKK pun baru terbentuk dan tidak kurang lebih satu tahun berdirinya organisasi tersebut, namun Oei Kok-Tejiang juga sangat berbangga diri dengan adanya kumpulan masyarakat tersebut karena beliau bisa berbaur dengan masyarakat sekitar dan beliau juga mengatakan bahwa setiap 3 bulan juga ada kumpulan dengan sesama etnis tionghoa yakni dengan kegiatan arisan.

Ada juga etnis tionghoa yang tinggal di daerah gedongan (daerah ini merupakan sebuah perumahan yang mana hampir seluruh penduduknya merupakan masyarakat pendatang sehingga kita

bisa mengetahui bahwa percampuran budaya, etnis, dan yang lainnya telah terjadi dalam lingkungan ini). Seperti yang terjadi pada keluarga Cece Yuli (wanita blasteran tionghoa dan jawa) atau yang biasanya di panggil Cece oleh tetangganya, ini mengatakan bahwa toleransi yang terjadi pada lingkungannya ini sudah berjalan dengan baik, namun yang disayangkan oleh Cece ini tidak ada kumpulan khusus etnis tionghoa yang ada di daerahnya karena yang ada hanya kumpulan ibu-ibu pengajian. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk di daerah gedongan beragama islam. Dampak dari etnis tionghoa yang merupakan kaum minoritas adalah kegiatan orang etnis tionghoa yang hampir kebanyakan beragama nasrani tidak mempunyai sistem organisasi dengan latar belakang agama yang sama. Meskipun tidak ada kegiatan di daerahnya namun cece juga mengikuti kumpulan etnis tionghoa yang mana setiap 3 bulan sekali melakukan perkumpulan sesama etnis untuk melakukan kegiatan silaturahmi dan yang lainnya serta kegiatan utamanya yakni acara arisan seperti yang ada di daerah lain.

Sebagai makhluk sosial manusia memerlukan interaksi antar sesama masyarakat yang ada disekitar.Indonesia terdapat beberapa etnis yang sangat beragam yang salah satunya ialah etnis tionghoa, etnis tionghoa di Indonesia merupakan hasil dari keturunan bangsa cina yang merantau ke Indonesia kemudian menetap dan memiliki keturunan baik dengan sesama orang cina maupun dengan melakukan pernikahan campur dengan etnis pribumi. Dalam pengertian organisasi sosial menjelaskan bahwa bagaimana orang-orang memberikan struktur dalam hubungan-hubungan dan cara hidup mereka dengan orang-orang yang ada disekitarnya supaya mereka mendapat identitas dan rasa keamanan dengan masyarakat dan kebudayaan mereka.

Seperti halnya pada etnis tionghoa di mana pada organisasi sosial yang terjadi di kalangan etnis tionghoa pada umumnya sangat tertutup karena masyarakat tionghoa meyakini bahwa untuk

www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

melanjutkan keturunannya sehingga mereka membuat pembatasan diri untuk sesama masyarakat yang beretnis tionghoa, hal ini terbukti pada setiap kota sebaran etnis tionghoa mempunyai daerah khusus yang dinamakan pecinan dimana yang tinggal dan membuka usaha dagang adalah seluruh etnis tionghoa.

4. Sistem Mata Pencaharian

Keberhasilan orang Tionghoa dalam berdagang terdapat hubungannya dengan warisan leluhur yang diturunkan melalui dari satu generasi ke generasi. Hal tersebut seperti yang Ny. Suwarti katakan bahwa usaha dagang yang dimilikinya itu merupakan usaha dagang dari turun temurun. Semangat kerja orang Tionghoa dalam menjalankan bisnis di bidang ekonomi khususnya dalam perdagangan, terdapat beberapa etos kerja yang sesuai seperti :

(1) Kerja keras. Pedagang Tionghoa menyadari bahwa untuk meraih kesuksesan dalam hidup itu harus ada kemampuan dan motivasi di dalamnya. Kerja keras yang dimaksudkan adalah pantang menyerah yakni semangat kerja yang terus mengalir di dalam jiwa pedagang Tionghoa. Dengan melihat peluang, berpikir positif serta focus dimana hal tersebut dapat memberikan pekerjaan yaitu dengan berdagang. Seng (2009) dalam bukunya yang berjudul "Rahasia bisnis orang China" mengatakan bahwa bekerja keras atau berusaha merupakan ibarat kata keramat yang mendorong pedangan China berhasil dalam bisnisnya

(2) Hemat (hidup sederhana). Dalam kehidupan ekonomi pedagang etnis Tionghoa menunjukkan bahwa keluarga pedagang etnis Tionghoa menerapkan hidup hemat dan memperhitungkan segala pengeluaran yang diperolehnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pedagang etnis Tionghoa suka menabung guna keperluan masa mendatang yang dapat

www.penerbitbukukreasi.com
Dilarang keras mencetak naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

datang tanpa diduga atau demi tujuan membiayai pendidikan anak.

Sikap hemat juga dapat dilihat dari bagaimana kehidupan pedagang etnis Tionghoa sehari-harinya. Hidup sederhana juga merupakan bagian dari sikap hemat. Pedagang Tionghoa yang tidak mudah membelanjakan uangnya dan lebih memilih untuk menjadikan hidup mereka sederhana. Hal ini dapat dinilai dari rumah, kendaraan, busana yang mereka kenakan serta melihat bagaimana mereka mengisi waktu luang untuk mencari hiburan.

Sama seperti yang peneliti temui ketika melakukan wawancara, tiga rumah yang peneliti datangi masih kuno dan sederhana, masih terlihat sangat klasik. Tidak hanya bangunan rumah yang sangat sederhana akan tetapi cara berpakaian mereka pun sungguh sangat sederhana tidak berpakaian yang mewah. Namun ada satu keluarga yaitu Oei Kok Teijang mengatakan bahwa segi kehidupan orang Tionghoa adalah pelit.

(3) Disiplin. Pedagang Tionghoa sangat menghargai waktu dalam setiap kegiatannya. Bagi pedagang etnis Tionghoa waktu harus dihabiskan dengan hal-hal yang bermanfaat. Orang yang menyia-nyiakan adalah orang yang membuang kesempatan. Mereka sangat menerapkan kedisiplinan terhadap anak-anak mereka agar menjadi pribadi pribadi yang baik di mana ia akan menjadi orang yang dapat menghargai setiap waktu yang dimilikinya.

(4) Jujur. Sifat jujur dalam berdagang adalah hal yang dipegang jika ingin usahanya berhasil dan sukses. Kejujuran merupakan hal yang sangat penting dalam berdagang. Pedagang Tionghoa mempunyai kode etik yang melarang menggunakan cara-cara yang kotor. Menjatuhkan perdagangan orang lain adalah perbuatan terkutuk (Seng, 2009;61). Seperti yang dikatakan salah satu narasumber yaitu mbak yuli atau biasa dipanggil mbak Cece mengatakan :

"pedagang etnis china itu prinsipnya persaingan sehat, seperti di jalan Pecinan-Bangkalan itu, semuanya banyak yang berdagang emas, tetapi tidak ada konflik satu sama lain"

Pengalaman berdagang yang didapatkan oleh pedagang etnis Tionghoa tersebut diperoleh melalui orang tuanya di mana orang tuanya juga sebagai pedagang. Pandangan pedagang etnis Tionghoa yang sukses adalah mereka yang mau belajar berdagang mulai dari bawah. Dalam berdagang tidak ada batasan usia untuk menekuni usaha berdagang.

Apabila dilihat dari sifatnya orang Cina memiliki etnis yang memiliki ciri-ciri suka bekerja keras dan memiliki motto bahwa "waktu adalah uang", sehingga semangat mereka untuk terus maju dimanapun mereka berada masih tetap ada. Penelitian tentang etnis cina dan kiprahnya di Indonesia sudah banyak dilakukan, salah satunya oleh Puji Lestari (2007) dalam Jurnal Ilmu Komunikasi berjudul " Stereotip dan Kompetensi Komunikasi Bisnis Antar Bali dan Cina". Lestari menyatakan bahwa banyaknya suku dan etnik dapat menimbulkan stereotip antaretnik. Stereotip antaretnik yang mendekati realitas sering merupakan ekspresi rasa kesukubangsaan, namun di sisi lain stereotip yang tidak sesuai dengan realitas etnik tertentu dapat menjadi bumerang dan kesalahpahaman hubungan antar etnis. Sebaliknya, stereotip yang positif (mendekati realitas) akan mampu meningkatkan kompetensi komunikasi antarbudaya, khususnya di bidang bisnis.

5. Sistem Teknologi

Yang harus dimengerti yakni Teknologi sendiri adalah perkembangan dan aplikasi dari alat, mesin, material dan proses yang menolong manusia menyelesaikan masalahnya. Sedangkan informasi adalah hasil pemrosesan serta manipulasi dan penggorganisasian dari bebrapa orang yang berbentuk kelompok data yang mempunyai nilai pengetahuan bagi yang

menggunakannya. Sedangkan teknologi informasi sendiri adalah sebuah alat yang dapat memperlancar orang dalam menjalin informasi dengan menggunakan sebuah alat. Teknologi informasi dalam *The dictionary of computer information processing and telecommunications* (Haryadi,1993:253) teknologi informasi diberi batasan sebagai teknologi pengadaan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran berbagai jenis komunikasi dengan memanfaatkan komputer dan telekomunikasi yang lahir karena adanya dorongan-dorongan yang kuat untuk menciptakan teknologi baru yang dapat mengatasi kelambatan manusia mengolah informasi (Pendit 1994:37). Dari hasil Observasi yang telah dilakukan dan mendapatkan tema untuk menganalisis bagaimana perkembangan budaya yang telah dilakukan oleh warga keturunan tionghoa yang telah berpindah daerah asalnya dengan hidup dikota madura dengan melakukan segala penyesuaian yang pertama dilakukan kepada:

Ibu Suwarti yang berumur 61 tahun yang bertempat tinggal di Madura di desa Arosbaya yang biasanya tempat ini disebut dengan desa pecinan. Suwarti adalah keturunan tionghoa yang asal usulnya sejak lahir sudah berada di Bangkalan. Dari hasil observasi dan wawancara menuturkan bahwa keturunan tionghoa di desa pecinan Arosbaya rata-rata masih belum melek media (mereka yang masih keterbatasan akan teknologi informasi bahkan penggunaanya). Suwarti salah satu keturunan tionghoa yang berpendapat bahwa sistem teknologi di madura sudah berkembang tetapi masih kalah dengan sistem teknologi yang ada di kota-kota. Dan teknologi yang dipergunakan oleh Suwarti masih belum menggunakan HP android dan belum bisa mempergunakan internet, yang telah diperoleh hasil karena faktor usia. Keturunan tionghoa di pecinan arosbaya masih belum menggunakan jasa online dengan perkembangan teknologi seperti halnya JNE (pengiriman serta penerimaan barang online) serta beberapa jenis

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

jasa teknologi masih belum dilakukan oleh beberapa keturunan tionghoa di daerah Arosbaya. Online shop yang sekarang marak digunakan dalam sistem jual-beli di Indonesia sekarang masih belum dilaksanakan dan juga bahkan dari hasil wawancara tidak mengetahui perkembangan zaman seperti itu. Jadi melek media di desa ini sangat lah kurang bagi mereka keturunan tionghoa walaupun faktor kurang tersebut berasal dari masing-masing individu maupun faktor lingkungan juga.

Observasi dilakukan kepada keluarga keturunan Tionghoa yakni keluarga bapak Oei-kok teijiang yang berasal dari Sumenep yang asal usulnya merantau ke desa Gedongan Bangkalan karena mata pencahariannya adalah berdagang dan lebih memilih untuk merantau ke Bangkalan. Oei kok teijiang adalah seorang makelar emas di pecinan yang berpendapat bahwa sistem teknologi yang ada di Madura sudah bisa dijangkau dengan internet dan juga keluarga mereka sudah menggunakan alat teknologi untuk informasi seperti Handphone android dan mereka juga sudah menggunakan aplikasi. Di desa Gedongan ini para warga keturunan tionghoa sudah melek media tetapi mereka sedikit membatasi penggunaannya karena menggunakan sistem serta alat teknologi di Madura tidak terlalu penting dan boros biaya.

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Hasil observasi ketiga dari keluarga tionghoa yang bernama Yuli bertempat tinggal di desa Rangkap adalah salah satu keturunan tionghoa campuran yang berasal dari ibu jawa dan seorang ayah yang asli dari orang tionghoa. Cece Yuli adalah salah seorang tionghoa asli Bangkalan berpendapat bahwasanya warga tionghoa di desa Rangkap sudah sangat melek media, jadi sistem informasi, teknologi serta penggunaan alat teknologi sudah sangat canggih dan sangat mengikuti perkembangan zaman.

Dari ketiga narasumber keturunan tionghoa dan juga dari hasil observasi ketiga desa yang berbeda bahwasanya sistem teknologi

yang telah etnis tionghoa adalah mempunyai banyak kelebihan dan juga kekurangan. Salah satunya manusia menjadi lebih individualis, jika orang tersebut terlalu ketergantungan akan adanya teknologi yang selalu mewadahi dan juga mengakibatkan kurangnya toleransi kekeluargaan dengan sesama makhluk sosial. Dampak positifnya yaitu mempermudah dalam semua pekerjaan contohnya: dengan adanya teknologi sekarang dapat dengan mudah dan cepat mengirim serta menerima barang.

6. Sistem Religi

Selain kebudayaan, manusia hidup juga dipengaruhi oleh agama. Karena seperti yang diketahui, agama sendiri mengambil peranan penting dalam suatu budaya masyarakat. Agama atau religi adalah hubungan antara manusia dengan Tuhannya, di hati sebagai hakikat bersifat ghaib, hubungan yang menyatakan diri dalam bentuk kultus serta ritus dan sikap hidup berdasarkan doktrin tertentu. Dalam tataran empiris, agama terdiri dari beberapa unsur pokok, yaitu sistem kepercayaan kepada Tuhan, sistem aturan dalam kitab suci, sistem ritual dan symbol-simbol agama yang bersifat kebendaan.

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Sistem religi berasal dari kesadaran suatu suku bangsa akan adanya "suatu kekuatan" diluar manusia yang memiliki kekuatan tak terhingga bila dibandingkan dengan kekuatan manusia, juga untuk mencari jawaban atas berbagai peristiwa di lingkungan kehidupannya. Sistem kepercayaan masyrakat China / Tionghoa diwarisi oleh tradisi kuat pada empat sumber, yaitu penyembahan alam dan roh-roh halus / nenek moyang (Spiritisme, animisme & Pantheisme), dan agama-agama Taoisme, Konfusianisme, dan Buddhisme. Penyembahan alam dan roh-roh halus / nenek moyang adalah kepercayaan tradisi yang tertua, setidaknya pada 3000 tahun silam sudah ada buku I-Ching yang merumuskan kepercayaan itu. Pada prinsipnya kepercayaan Primordial membawa manusia

kepada usaha untuk mencapai kesejahteraan, kemakmuran dan kebahagiaan hidup yang dicapai dengan hidup secara harmonis dengan alam dan penyembahan roh-roh halus & nenek moyang.

Etnis Tionghoa yang bermigrasi ke Indonesia pada umumnya menganut kepercayaan Confucianisme atau Buddha. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan proses asimilasi budaya yang telah berlangsung ratusan tahun antara kebudayaan Etnis Tionghoa dengan kebudayaan Indonesia, mayoritas etnis Tionghoa pada masa sekarang ini menganut agama Buddha, Katolik, Kristen serta minoritas Islam dan Konfusianisme (Konghucu).

Namun peneliti tidak akan membahas tradisi kuno Tionghoa dan kepercayaan Buddhisme ini secara mendalam karena Narasumber peneliti tidak ada yang menganut atau melaksanakan tradisi ini. Hal ini disebabkan lingkungan sosial serta keturunan keluarga yang tidak murni lagi (campuran) sehingga kepercayaan dan tradisi ini telah berangsur-angsur ditinggalkan.

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Ketiga narasumber peneliti memiliki agama yang berbeda, narasumber pertama yang bernama Suwati dan berdomisili di Desa Arosbaya beragama Kristen Katolik, Sedangkan Narasumber kedua bernama Oei-Kok Tjiang yang berdomisili di desa Gedongan beragama Kristen protestan, dan Narasumber ketiga bernama Yuli (biasa dipanggil dengan Ce Yuli) beragama Kristen Protestan juga dan berdomisili di desa Langkap.

Hasil analisis peneliti terhadap ketiga narasumber adalah tidak menganut agama Buddhisme maupun konghucu seperti yang biasanya dianut oleh Tionghoa kebanyakan. Alasan yang disampaikan pun sama dalam memilih menganut agama Katolik / Kristen Protestan, yaitu karena sudah menjadi orang asli Madura serta lahir dan besar di Madura, sehingga agama menjadi diturunkan secara otomatis dari orang tua mereka dulunya. Lingkungan Madura yang kita ketahui dikenal sebagai kota santri,

tidak terlalu berpengaruh banyak dalam agama yang dianut oleh masyarakat Tionghoa di Bangkalan. Hal ini dikarenakan karena agama yang mereka anut kuat dan karena pengaruh lingkungan keluarga Tionghoa yang dikenal sangat erat bahkan berkotak-kotak dalam marga keluarga menjadi pemicu agama tetap dipertahankan dalam keluarga para narasumber.

Sekalipun tidak menganut agama Buddhisme maupun Konghucu, tetapi tradisi Imlek sangat sulit untuk hilang bagi masyarakat Tionghoa sekalipun jika telah campuran dan tidak murni lagi budaya Imlek tetap dijalankan setiap tahunnya. Kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan dalam perayaan Imlek tetap dilakukan walaupun tidak semua kebiasaan ini dilakukan karena pengaruh pernikahan campuran Tionghoa dan lingkungan minoritas, namun mereka tetap mempertahankan beberapa tradisi yang tetap mereka anggap penting untuk dilestarikan. Tradisi yang tetap dilakukan oleh masyarakat Tionghoa Bangkalan adalah mengunjungi kediaman orang tua serta melakukan ritual " nyekar" apabila orang tua telah meninggal (tradisi ini biasanya juga ada dalam acara "Cheng Ben").

KBM INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah

Makan besar juga menjadi salah satu ciri khas masyarakat Tionghoa dalam merayakan Imlek dan biasanya makanan yang disajikan pun akan dihidangkan dengan banyak rasa manis, hal ini dimaksudkan agar sepanjang tahun hal-hal "manis" selalu terjadi dalam keluarga. Jika membahas segala jenis pantangan yang biasanya ada dalam tradisi Imlek pada umumnya, hal ini tidak kita jumpai pada masyarakat Tionghoa Bangkalan. Hal ini terjadi dikarenakan pengaruh lingkungan dimana mereka minoritas sehingga pantangan-pantangan yang biasanya menjadi larangan pada saat perayaan Imlek mulai bergeser dan dianggap tidak terlalu penting lagi. Pantangan disini yang dimaksud seperti jangan menyapu atau membuang sampah pada awal Imlek yang diyakini akan membuang rezeki, atau menghindari tangisan anak saat hari

pertama Imlek karena akan membawa kemalangan bagi seisi rumah di sepanjang tahun, karena itu tidak heran orang tua akan melakukan apa saja bagi anaknya di awal tahun baru Imlek.

7. Kesenian Etnis Tionghoa

Kesenian bagi etnis Tionghoa atau bangsa China sangat penting. Segala kesenian tersebut sangat dipengaruhi oleh kepercayaan yang dianut oleh bangsa China, walaupun pada kenyataannya di jaman moderen saat ini kebudayaan China sudah mulai termodifikasi. Kesenian Tionghoa sangat beragam, dan yang paling terkenal ialah kesenian tarian barongsai. Barongsai sendiri merupakan kesenian asal China yang sudah mendunia termasuk Indonesia. Barongsai sendiri merupakan sebuah tarian menggunakan singa buatan yang dihias dengan cantik dan meriah yang biasanya identik dengan warna merah, emas dan kuning. Barongsai dikenal dengan tarian Lungwu saat di China yang dikhususkan untuk penyebutan bagi tarian singa. Sementara itu, barongsai sendiri bukan merupakan sebutan dari China, barong diambil dari bahasa melayu yang mirip dengan kesenian barong jawa sedangkan sai berarti singa dalam dalam dialek hokkian. Kesenian barongsai mulai eksis pada tahun 420-589 Masehi tepatnya pada zaman dinasti Selatan-Utara (Nan Bei). Hal ini bermula ketika para pasukan gajah raja Fan Yang melakukan penyerangan terhadap raja Song Wen Di, yang kemudian seorang panglima bernama Zhong Que membuat boneka tiruan yang menyerupai singa untuk mengusir pasukan gajah tersebut. Ternyata hal tersebut berhasil hingga tarian barongsai melegenda. Tarian barongsai terdiri dari dua bagian, yang pertama ialah bagian Utara yang merupakan singa dengan surai ikal dan berkaki empat. Sementara selatan ialah singa yang memiliki sisik serta jumlah kaki yang bervariasi antara dua atau empat. Cara memainkan tarian barongsai ini sangat mengutamakan ketangkasan bela diri yang merupakan kunci untuk menari yang sering kita kenal sebagai

INDONESIA
www.penerbitbukukunia.com
Dilarang keras, menecetak naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

kungfu atau wushu. Barongsai sendiri memiliki ciri khusus tarian seperti loncatan, salto dan berguling.

Kesenian etnis Tionghoa yaitu barongsai, peneliti sudah melakukan observasi pada etnis Tionghoa di daerah Bangkalan, Madura. Tepatnya di tiga desa yang berbeda dimana masing-masing desa tersebut terdapat warga dengan keturunan etnis Tionghoa. Desa pertama yang dikunjungi untuk mendapatkan informasi mengenai kesenian etnis Tionghoa ialah desa Arosbaya di kecamatan Bangkalan dengan nama Suwarti. Kesenian yang terdapat pada keturunan tionghoa ini adalah seni dalam pembangunan rumah. Bangunan rumah dari narasumber masih sangat klasik dan juga tradisional. Etnis tionghoa di desa Arosbaya masih mempertahankan aksen klasik bagi bangunan rumah pada dinding, yang masih menggunakan tembok tua yang tidak direnovasi. Hanya saja temboknya masih kokoh dan juga masih layak ditempati dan tidak berkeinginan untuk merenovasinya. Aksen klasik juga terlihat dari pintu yang masih menggunakan dua daun pintu tradisional, berbeda dengan desain rumah modern saat ini yang telah menggunakan desain yang minimalis. Lantai yang digunakan pun masih ubin dan bukan keramik. Jika dilihat dari segi materi mereka termasuk kategori masyarakat mampu karena mereka mampu menyekolahkan anak-anaknya hingga jenjang perkuliahan di universitas swasta di Surabaya. Tidak hanya desain rumah saja, namun juga memiliki perabotan rumah tangga yang kuno. Mulai dari kursi, meja, lemari bahkan sampai televisi sekalipun masih menggunakan segala benda apapun yang sekiranya masih bisa digunakan walaupun sudah kuno ataupun ketinggalan jaman.

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Wawancara selanjutnya adalah merupakan wawancara terhadap keluarga Oei Kok Tejiang (warga keturunan tionghoa yang asli dar kabupaten Sumenep, Madura). Oei Kok Tejiang pindah ke desa Gadongan, Bangkalan karena menganggap mencari pekerjaan di

sini lebih mudah. Kesenian di dapat dari keluarga bapak Oei Kok Tejiang ini sama dengan Suwarti, masih mempertahankan desain rumah kuno yang terkesan klasik untuk rumah mereka. Narasumber juga masih menata dengan rapi kursi-kursu atau sofa yang sudah tua, bedanya keluarga ini masih menggunakan barang yang sudah dianggap rusak untuk digunakan, seperti sofa yang jebol. Tembok dengan cat yang sudah usang dan mengelupas. Hal ini serupa dengan ilmu menata rumah feng shui yaitu ilmu yang disatukan dengan desain interior rumah. Ilmu seni yang memiliki hubungan erat dengan rumah tinggal.

Kemudian sampai pada narasumber yang ketiga yaitu Yuli yang biasa disapa dengan Cece Yuli merupakan warga keturunan tionghoa yang sudah mengalami banyak moderenisasi. Yuli bertempat tinggal di perumahan di desa Langkap, Bangkalan. Ce Yuli merupakan orang tionghoa campuran madura yang saat ini sedang menjalani bisnis kuliner mie pangsit di kediamannya. Ce Yuli menganggap seni merupakan hal yang penting terutama seni tionghoa yaitu barongsai yang hanya ada satu kali dalam setahun yaitu saat imlek tiba. Sebagai keturunan tionghoa ia mengaku perlu berperan untuk melestarikan kebudayaan tionghoa yaitu kesenian tari barongsai. Beliau juga menyinggung tentang masalah seni berpakaian orang tionghoa, bahwa baju warna merah ditunjukkan untuk sebuah kebahagiaan.Sedangkan warna emas ditunjukkan untuk simbol kejayaan dimana kedua warna tersebut digunakan untuk hari besar tionghoa seperti imlek. Sedangkan warna hitam ditujukan untuk menunjukkan kesedihan seperti kematian atau peringatan kematian. Akan tetapi untuk menunjukkan rasa kehilangan orang yang meninggal ada dua, yang pertama ialah jika orang yang meninggal sudah sangat tua akan menggunakan warna merah sebagai simbol kebahagiaan. hal ini dikarenakan etnis tionghoa bahagia karena orang tersebut meninggal dengan beban hidup yang telah usai terhadap anak-anaknya. Yang kedua adalah

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

jika orang menganggap kematian adalah sebuah kesedihan etnis tionghoa akan memakai baju berwarna hitam. Akan tetapi keduanya tergantung bagaimana pihak keluarga menanggapi kepergian keluarganya.

Simpulan

Tujuh sistem kebudayaan yang ada di etnis tionghoa merupakan bagian dari kontestasi etnis madura yang menghasilkan budaya etnis tionghoa campuran. Adanya akulturasi budaya dan relativisme budaya menghasilkan dua dampak. Dampak pertama bahwa etnis tionghoa dapat diterima di etnis madura dengan identitas etnis tionghoa sebagai budaya minoritas dan dampak kedua bahwa budaya etnis tionghoa telah kehilangan orisinalitas budaya yang diturunkan dari cina dan bahkan ada yang hilang dari ritual budaya asli di negara cina. Alhasil budaya etnis tionghoa yang ada di Bangkalan-madura menjadi sangat fleksibel dan kehilangan sakralitas nya.

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Referensi

Aw, Suranto. 2010. *Komunikasi Sosial Budaya*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Dian, Mas. *Logika Feng Shui: Seni Mencapai Hidup Harmonis dan Bahagia dalam Keberuntungan Bumi.* Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Larry A. samovar, Richard E. Porter, Edwin R McDaniel, 2010. *Komunikasi Lintas Budaya.* Jakarta: Salemba Humanika

Rossbach, Sarah. 1994. *Desain Interior Dengan Feng Shui.* Bandung: Abdi Widya.

Skiner, Stephen. 2001. *Feng shui Before and After.* USA: Tuttle Publishing.

Teory Lado Robert. 1975. *Linguistics Across Cultures*. Toronto: The University Of Michigan Press

Sumber jurnal dan online :

Amalia, Fitri dan Kuncoro Bayu Prasetyo.2015. "*Etos Budaya Kerja Pedagang Etnis Tionghoa di Pasar Semawis Semarang*", 4, no 1, (http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/solidarity/article/download/6041/4657, diakses 4 April 2017).

Haryadi, Utami. 1989. "*pangkalan data bibliografi perguruan tinggi*"dalam laporan lakakarya apresiasi komputer untuk kepala UPT perpustakaan jakarta 9-11 januari 1989.jakarta UKKP P3TBLN Dirjen dikti

Justin, Daniel. 2004. *Penyebab dan akibat perubahan kebudayaan jawa*. Universitas Muhammadiyah

Karsono O.M.F. 2014. Adapted wards as a windows of cultural exchange between the chinese and other. *Journal of language and literature* 5(3) hal 388-394

Pengetahuan jawa dari Jantra, *Jurnal sejarah dan budaya tahun 2006* vol 1 no 1

Pendit, Putu Laxman. 1994. " makna dan peran informasi dari masa ke masa "ekonomi informasi dan informasi ekonomi "*jurnal ilmu perpustakaan,dokumentasi,dan informasi* (kpp pusdokinfo)VI,Depok,13-17 oktober 1997"

Riyanti, Puji. 2013. "*Relasi Sosial, Pedagang Etnis Cina dan Etnis Jawa di Pasar Tradisional*", 5, no 1, (http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas/article/viewFile/2373/2426, diakses 4 April 2017).

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, memfotocopy naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

KBM
INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit



Merawat Kearifan Lokal Madura Ditengah Tantangan Komunikasi Kekinian

Syamsul Arifin

Pendahuluan

Masyarakat Madura dengan segala kompleksitas dan persoalannya, dikenal dengan kebudayaannya yang beragam, unik dan berbeda daripada budaya kebanyakan. Seluruh rangkaian kebudayaan yang ada di Madura

memiliki makna filosofi tertentu yang mengajarkan tentang kebaikan, sikap dan sebagai pandangan hidup masyarakat Madura. pola dan struktur budaya kemudian berfungsi sebagai norma yang dipatuhi sehingga menjadi kebiasaan dalam bersosialisasi dengan orang lain.

Abental ombe' asapok angin (berbantal ombak berselimut angin), merupakan pribahasa Madura lama yang biasa digunakan untuk menggambarkan kehidupan sosial masyarakat Madura. makna filosofi ini menjelaskan bahwa masyarakat Madura sebagai masyarakat yang pejuang sejati tidak pernah mengenal lelah untuk meraih harapan-harapan yang telah ditetapkannya. Ungkapan peribahasa diatas juga sebagai penanda bahwa masyarakat Madura sebagai etnis dengan selaga stereotip positif sebagai pribadi yang pemberani tegas, pekerja yang ulet dan suka merantau.

Etos kerja yang ulet banyak dibuktikan mereka buktikan dalam segala bidang pekerjaan, dengan berbekal nilai-nilai budaya dan makna filosofi melalui interaksi sosial, seperti yang tergambar dalam istilah-istilah bahasa Madura seperti *bhajeng* (rajin), *cakang* (cekatan), *acemeng* (sibuk bekerja tidak bisa tinggal diam). Walaupun demikian, keberhasilan yang didapatkan tidak kemudian melupakan asal usul mereka yang lahir dari proses masyarakat Madura, hal ini terbukti dengan istilah *asel tak adhina asal* (tidak lupa diri) yang bermaksud seberapapun tinggi keberhasilan mereka, baik di Madura maupun diluar Madura, mereka akan tetap mengingat darimana mereka berasal dan menjunjung tinggi nilai budayanya.

Penguatan nilai-nila menjadi satu dimensi kekayaan yang harus selalu dijaga kelestariannya, karena nilai budaya dapat menjadi identitas yang terinternalisasi dalam setiap aktivitas sehari-hari. Pentingnya menjaga nilai budaya Madura sebagai cara pandang hidup dalam menghadapi perubahan yang kian menghadang,

sehingga diperlukan peradaban dan penyesuaian tanpa harus menenggelamkan nilai budaya sebagai kearifan lokalnya. Peradaban merupakan satu lompatan keadaan yang memaksa setiap masyarakat untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan tanpa harus menghilangkan identitas mereka.

Bagi masyarakat Madura, menuju peradaban yang berkemajuan bukan menjadi persoalan yang serius, karena masyarakat Madura memegang teguh nilai budaya peradaban yang tergambar dari istilah *ekenneng ghiba kasemo* (dapat dibawa bergaul). Ungkapan ini bermaksud bahwa masyarakat Madura bukanlah sekumpulan orang yang kaku dengan perubahan perkembangan zaman, justeru sebaliknya masyarakat Madura selalu siap menghadapi tantangan dengan segala potensi dan nilai kehidupan yang telah dipelajarinya.

Seluruh kebudayaan dan nilai budaya ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat luas sehingga cenderung melihat Madura dengan cara pandang stereotip negatif sebagai etnis yang dekat dengan kriminalitas dan caroknya yang melegenda. Pandangan ini tentu tidak salah tetapi juga tidak benar karena lebih daripada pemahaman banyak orang, bahwa Madura memiliki nilai budaya yang baik tentang tata nilai kehidupan, tentang cara pandang, tentang sikap dalam sistem kehidupannya. Keadaan seperti ini tentu sangat dimaklumi mengingat Madura sering dicitrakan negatif seperti dalam pemberitaan media massa ataupun cerita-cerita masyarakat diluar kehidupan Madura.

Berdasarkan keadaan ini maka diperlukan upaya untuk mengkampanyekan kebaikan Madura melalui berbagai kegiatan yang selama ini jarang dilakukan. Membangun citra positif memerlukan kesadaran dari setiap masyarakat sehingga pada akhirnya pemahaman Madura yang keras dapat berubah menjadi pemahaman yang baik. tindakan Mambangun harus dilakukan

secara massif oleh seluruh lapisan masyarakat Madura, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatannya, pemuda, kelompok-kelompok yang berkepentingan dan lain sebagainya.

Sumber informasi masyarakat Madura

Berawal dari teori komunikasi Lasswel yang dianggap paling awal (1958) memperhatikan proses komunikasi. Dalam pandangannya cara yang terbaik untuk menerangkan proses komunikasi yaitu dengan menjawab beberapa pertanyaan utama seperti *who says in which channel to whom with what effect* (siapa mengatakan apa melalui saluran apa kepada siapa dengan efek apa. Teori Laswell ini tidak terlepas dari pandangannya tentang fungsi komunikasi yang dianggap sebagai pengamatan lingkungan, korelasi kelompok-kelompok dalam masyarakat ketika menanggapi lingkungan transmisi warisan sosial dari satu generasi kepada generasi berikutnya.

Jawaban atas pertanyaan yang diajukan Lasswell merupakan unsur-unsur dalam proses komunikasi, seperti komunikator, pesan, media, komunikan/penerima, dan efek. Sejalan dengan pemikiran tersebut bahwa Madura memiliki tata nilai lokal (*local wisdom*) yang menjadi perhatian utamanya sebagai sumber informasi yang dianggap paling sesuai untuk menjadi panutan dalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat Madura merupakan etnis yang patuh kepada empat figur utama yang dikenal dengan istilah *bhuppa' bhabu' ghuru rato* (bapak, ibu, guru, pemimpin formal). Ungkapan ini sangat familiar di telinga masyarakat Madura sebagai pegangan dalam proses kehidupan sosial. Di Kehidupan sehari-hari keempat figur ini mempunyai kontribusi yang besar dalam berbagai bidang kehidupan yang mereka anggap sebagai formula dalam mencapai kemantapan hidup.

KBM INDONESIA
www.penerbitkbmindonesia.com
Dilarang keras mencetak naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Bhuppa' bhabu' (bapak ibu) merupakan figur utama yang dapat menjadi panutan sebagai standar referensi kepatuhan yang dilakukan secara hierarki. Secara kultural ketaatan dan kepatuhan seorang anak kepada kedua orang tuanya merupakan kemutlakan yang tidak dapat diganggu gugat. Kepatuhan kepada kedua orang tua terjadi bukan hanya dalam kehidupan etnis Madura saja tetapi juga dimiliki oleh kebanyakan etnis yang ada di Indonesia. Figur orang tua ini sebagai penentu jalan keberlangsungan proses hidup dengan siklus proses pewarisan masyarakat Madura.

Bukan hanya sebagai figur utama kepatuhan masyarakat Madura, bahwa kedua orang tua menjadi sumber informasi seputar proses kehidupan sosial yang mereka jalani. Keluarga merupakan siklus perputaran informasi, sehingga dengan keterbukaan informasi diantara anggota keluarga dapat menciptakan keluarga yang harmonis, karena setiap sikap, kata-kata, gaya berbicara mengandung nilai pengajaran yang menjadi bekal *life skill* anak keturunannya dalam menjalani kehidupan diluar keluarganya. Peribahasa *ngala' karebbha dhibi'* merupakan salah satu perumpamaan yang dipelajari dalam keluarga yang bermakna bahwa dalam kehidupan sosial tidak boleh bertingkah semaunya sendiri tanpa memikirkan kehidupan orang lain disekitarnya.

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Ghuru (guru) yang dalam hal ini teridentifikasi kepada sosok kiai yang berfungsi sebagai *rule model* dalam bertingkah laku, figur moral dan pemimpin sosial. Keadaan ini mengisyaratkan bahwa peran seorang kiayi tidak hanya pada urusan kepesantrenan saja tetapi lebih dari itu bahwa seorang kyai bisa menjadi panutan dalam tatanan kehidupan sosial masyarakatnya. Peran dan fungsi *Ghuru* (guru) lebih pada tataran moralitas dan masalah ukhrowi (*morality and sacred world*) maka kepatuhan orang Madura sebagai penganut agama Islam yang taat tentu saja tidak bisa dibantah lagi, (Wiyata, 2013).

Sebagai sumber rujukan proses kehidupan sosial, seorang kiai sering dikunjungi (*nyabis*) untuk sekedar meminta barakah atau untuk mencari jalan keluar dalam beberapa persoalan hidup yang sedang dialami oleh masyarakat. Aktivitas *nyabis* kemudian dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan petuah-petuah seputar kehidupan sosial untuk kemudian diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Proses transformasi ini dijadikan masyarakat sebagai sarana untuk menambah banyak pengetahuan sosial dalam perspektif agama.

Figur *Rato* (pemimpin pemerintahan) dilihat sebagai konjungsi dari panutan dan kepercayaan dalam pemenuhan kebutuhan kesejahteraan sosial. Pola kepercayaan kepada *rato* tentunya tidak dibatasi berdasarkan daerah kepemimpinan seperti pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten di wilayah Madura. Wiyata (2013) mengatakan, *Rato* tiada lain sebagai representasi dari kehidupan duniawi (*profane world*) yang dalam implementasi prakteknya kelak akan selalu berkutat dengan tugas-tugas dan kewajiban sebagai "aktor politik praktis" dalam menjalankan roda pemerintahan di seluruh wilayah kabupaten Madura.

www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah

Proses pengetahuan masyarakat Madura melalui empat figur di atas dalam kajian komunikasi dapat dilakukan dengan pendekatan *information integration theory*, tetapi bagi masyarakat Madura keadaan di atas dikatakan sebagai *paghurun* (tempat bertanya), yang dilakukan secara aktif dalam upaya memenuhi kebutuhan informasi yang diyakini dapat mempengaruhi sikap masyarakat Madura sendiri. Bagi masyarakat Madura, kepemilikan pengetahuan dan ilmu serta teknologi sangat dihargai oleh orang Madura, terutama kepandaian yang diperoleh dari kegiatan belajar maupun dengan tuntunan orang lain, (Ahmad Rifai, 2007).

Informasi dan transformasi pengetahuan, baik yang melalui komunikasi keluarga *bhuppa bhabbu*, melalui figur *ghuru* (kiai)

sebagai *opinion leader*, maupun *rato* sebagai pemimpin pemerintahan memiliki peranan yang besar untuk membangun masyarakat Madura. Keempat figur tersebut dapat menjadi tolak ukur keberhasilan proses hidupnya. Cara pandang dari kearifan lokal ini menjadi rumusan baru tentang pengetahuan dalam menjalani kehidupan yang lebih baik.

Proses negosiasi masyarakat Madura

Beberapa kajian komunikasi telah banyak yang membahas tentang negosiasi dalam berbagai pendekatan. Diantara yang banyak dibahas dalam kajian-kajian tersebut adalah teori negosiasi wajah (*Face negotiation theory*) yang dikembangkan oleh Stella Ting-Toomey pada tahun 1988. Teori ini berpendapat bahwa wajah didefinisikan sebagai image diri seseorang dimata orang lain. Dalam hal ini, image dapat diartikan sebagai citra diri atau gambaran diri atau harga diri seseorang dimata orang lain, (Morissan 2013).

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras memperbanyak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Proses pendifinisian diri oleh orang lain terbentuk dari perilaku komunikasi yang yang ditampilkan melalui kebiasaan ataupun budaya yang menjadi kebiasaanya. Gambaran-gambaran tentang diri seseorang kiranya dapat diliahat dari tindakan tindakannya seperti individualistik maupun kolektif, bersifat bebas ataupun saling bergantung. Rumusan ini menandakan bahwa situasi sosial dapat menggambarkan tentang jati diri seseorang individu ataupun kelompok tertentu.

Kiranya pandangan teori diatas cukup menjadi alasan kenapa akhirnya Madura dikatakan sebagai etnik yang tegap, bersuara lantang, kumis tebal, kopiah tinggi, kaos loreng lengkap dengan celuritnya. Bahkan banyak lagi yang tanpa ragu mendefinisikan orang Madura yang keras, kasar, suka membunuh. Tetapi tentunya pandangan yang cenderung stereotip negatif tidak bisa

digeneralisir bahwa semua orang Madura melakukan tindakan-tindakan tersebut. Alasan yang cukup kuat untuk menolak anggapan tersebut bahwa orang Madura sangat santun, tidak gegabah, mengedepankan musyawarah, hal ini dapat dilihat dari ungkapan peribahasa Madura lengkap dengan makna filosofi yang terkandung di dalamnya.

Saduhunina (apa adanya), *seduhunina* merupakan cerminan dari sifat tegar dan tegas. Pembawaan yang mengesankan keluguan ini dapat melahirkan sikap yang jujur, polos, apa adanya dalam menyampaikan isi hatinya serta segala sesuatu yang dirasakan dalam benaknya yang dalam istilah bahasa Indonesia dikenal dengan ceplas-ceplos. pembawaan *seduhuna* (istilah lain dari seduhunina) inilah orang Madura tidak takut *adhebu terrang* (adu terang), jujur dan selalu berkata seadanya tanpa peduli siapapun yang berada di hadapannya, (Ahmad Rifai, 2007).

Bengalan (Pemberani) selaras dengan ungkapan paresan ini tersirat makna bahwa masyarkat Madura sebagai sosok yang pemberani membela kebenaran sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Sebagai akibat dari sikap tersebut bahwa orang Madura pada umumnya berani bersifat tegas saat berhadapan dengan siapa saja untuk membela kebenaran. Secara fisik mungkin masyarakat Madura terkesan kecil dan lemah, akan tetapi keberaniannya bisa melebihi orang lain yang secara postur tubuhnya lebih besar, hal ini dapat dilihat dari *parbesan* Madura *kene' ta' korang bulenna* (kecil tidak kurang bulannya).

Esto (setia), sifat positif kesetiaan ini berlaku dalam berbagai tingkatan hidup dan tugas-tugas yang diembannya. kesetiaan orang Madura yang tergambar dari istilah ini menyiratkan makna pembawaan yang tulus dan lurus, memiliki sikap loyalitas yang tinggi terhadap tugas dan kewajibannya. Implementasi dari sikap ini kemudian melahirkan pandangan bahwa orang Madura *kenneng*

andhelagi (dapat diandalkan). Menggambaran dari *ca'oca'* ini bahawa tidak heran apabila orang Madura diluar Madura banyak sukses karena keuletan dan dedikasinya yang tinggi terhadap pekerjaan dan tanggung jawabnya.

Rampa' naong beringin korong, merupakan filosofi hidup orang Madura. Istilah yang sangat populer ini mengacu kepada pohon beringin yang rindang dan sanggup meneduhi orang yang berada dibawahnya. Falsafah ini kemudian menjadi pedoman hidup yang bermakna bahwa orang Madura menyukai kehidupan yang damai, tanpa kekerasan, tanpa tindakan diskriminasi dan persengketaan. Istilah peribahasa Madura ini menampilkan wajah berbeda dari Madura yang selama ini hanya dikenal karena kekerasan dan carokya.

Sisi lain kehidupan masyarakat Madura bahwa mereka biasa dengan sistem kehidupan yang kolektif bukan individualis. Kenyataan ini dapat ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari dengan gotong royong, saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya tanpa mengharapkan balasan apapun. Pemandangan seperti ini bisa disaksikan misalnya ketika ada diantara mereka sedang akan membangun rumah, maka seluruh tetangga sekitar akan datang membantu meski tanpa diminta ataupun disuruh. Gambaran kehidupan sosial masyarakat Madura dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan istilah *atatolong* saling membantu ataupun *song osong lombung* (serepak mengusung lumbung), sebagai *ca'oca'* untuk menyatakan kegiatan orang banyak yang berkumpul untuk mengerjakan sesuatu secara bersama-sama.

Kearifan lokal atau *local wisdom* adalah pemikiran tentang ide lokal yang mengandung tata nilai kebijaksanaan, kebaikan yang terinternalisasi secara turun temurun oleh sekelompok orang dalam lingkungan tertentu yang menjadi tempat tinggal mereka. Kearifan lokal ini yang biasa disebut nilai-nilai luhur (adiluhung)

masyarakat yang berfungsi sebagai landasan filsafat perilaku yang baik menuju harmonisasi, (Kriyanto 2014).

Realitas kehidupan sosial masyarakat Madura yang memiliki berbagai nilai kearifan lokal menjadi satu keunikan yang tidak cukup hanya diperhatikan tetapi juga harus mampu terinternalisasi dalam kehidupannya. Maka kekayaan yang dimiliki dapat berfungsi sebagai jati diri bangsa Madura yang menghargai segala kearifan lokal dengan cara mereka sendiri. Lebih daripada itu bahwa pemahaman akan tata nilai tersebut harus dirawat yang kemudian dapat dikenalkan kepada dunia yang lebih luas dengan tindakan dan cara-cara yang unik pula sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakatnya.

Tengka sebagai dasar pelayanan

Pembahasan seputar Madura seolah tidak ada habisnya, seperti yang telah banyak diperbincangkan dalam berbagai bidang kajian dengan pendekatan teori yang berbeda-beda. Mulai dari kajian seputar hukum, ekonomi, politik bahkan sampai kepada sifat, sikap, dan kebiasaan yang banyak menyita perhatian orang. Masalah yang kompleks dengan beragam kajian tersebut menandakan sisi keunikan Madura yang terpelihara sehingga sekarang.

KPM INDONESIA
www.penerbitkampustrah.com
Dilarang keras memcetak naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Berangkat dari pembangunan jembatan Suramadu yang mulai dibangun sejak tahun 2005, isu-isu seputar Madura mulai bangkit, seperti diproyeksikan menjadi provinsi Madura sendiri dengan segala alasan kelebihan dan kekurangannya, Madura sebagai serambi madinah dengan budaya islamnya yang mendominasi aktivitas masyarakatnya, sampai pada kebangkitan dan pembangunan pariwisata yang dianggap dapat menjadi destinasi yang menjanjikan dengan segala ciri khasnya.

Andai saja semua isu-isu kekinian tersebut dapat terealisasi baik dalam waktu dekat ataupun jangka waktu yang panjang, Madura beserta masyarakatnya telah siap untuk menjadi tuan rumah yang ramah yang menjanjikan pelayanan yang baik. Hal ini tidak terlepas dari sikap yang telah diajarkan secara turun temurun tentang keterbukaan sikap orang Madura. Keterbukaan sikap orang Madura termanifestasikan dalam tindakan yang rensponsif terhadap perlakuan seseorang kepada dirinya, jika orang lain menunjukkan kebaikan maka tidak sungkan bagi masyarakat Madura untuk berbuat jauh lebih lebih dengan tindakan orang lain tersebut, pun sebaliknya jika mereka datang untuk menyinggung perasaan maka biasanya orang Madura akan melawan.

Atas tindakan respoinsif diatas, *tata krama* selalu menjadi motif utamanya. *Tata krama* disebut juga sebagai *tengka* ataupun etika seseorang. Masyarakat Madura sangat memerhatikan tengka sebagai landasan utama dalam berikteraksi dengan orang lain. Penggambaran sikap tersebut dapat dilihat sebagai konstruksi nilai budaya yang tinggi yang memperhatikan segala unsur pola hubungan yang baik, mulai dari cara berbicara, penggunan bahasa, serta tingkah lakunya. Dalam upaya untuk menghindari adanya pertelingkahan sehingga terhindar adanya tingkah laku yang salah atau disebut sebagai *ta' cangkolang* (menghindari ketidak pantasan bertindak tanduk).

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

tao maddung to'ot (tahu menekuk lutu), mengetahui latar belakang lawan bicaranya juga mendapat perhatian yang besar, tahu menkuk lutut sama artinya dengan tahu siapa lawan bicaranya. Dalam kehidupan masyarakat Madura, starata sosial yang perlu diperhatikan dalam hubungan timbal balik seperti teman sebaya atau orang seumuran, orang yang lebih tua, termasuk dengan kalangan kiai atau dengan orang yang berkarisma. Tingkatan itu jelas terlihat dari penggunaan bahasa Madura seperti *enjek iyeh* bahasa sederhana digunakan kepada sepertemanan, *enggi enten*

digunakan kepada orag yang lebih tua, *enggi punten* digunakan untuk orang yang status sosialnya sangat tinggi seperti para kiai dan lain sebagainya.

Tidak hanya istilah penjelasan terhadap tingkah laku yang baik ber-*tata krama*, tetapi juga bagi orang yang tidak memiliki tengka atau etika disebut dalam *ca' oca* (peribahasa) Madura *a' tao ka batonna langgar* (tidak tahu pinggir langgar). Tidak tahu pinggir langgar artinya tidak pernah belajar tentang ilmu *tengka* atau etika dalam kehidupan sehingga pantas tindakan yang dianggap melanggar dilakukan oleh orang yang tidak pernah belajar ilmu etika. Perumpamaan yang lain disebut sebagai *tak tao ka alif ba* (tidak tau alif ba ta), tidak pernah duduk di surau untuk belajar adat sopan santun dan Al-Quran.

Dalam perkembangannya, keadaan di atas coba dijelaskan dalam Teori Strategi Kesopanan oleh Penelope Brown dan Stephen Levinson yang menyatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita merancang pesan yang dapat melindungi muka sekaligus mencapai tujuan lain. Brown dan levinson percaya bahwa kesopanan sering kali merupakan tujuan karena kesopanan merupakan nilai universal secara kultural, (Morissan 2013).

Nilai kesopanan masyarakat Madura tentunya berbeda derajatnya dengan nilai kesopanan budaya lain. Di Madura nilai kesopanan sangat penting karena berfungsi sebagai dasar untuk membangun pola hubungan yang baik antara satu dengan yang lainnya baik dengan anggota kelompok sendiri maupun dengan kelompok lainnya. Masyarakat percaya dengan dasar kesopanan segala proses hidup akan dapat menciptakan keberagaman saling menghargai, menghormati, serta saling menjunjung tinggi segala jurang perbedaan yang ada.

Sejalan dengan pemikiran kesopanan masyarakat Madura bahwa aspek lain yang harus menjadi perhatian dalam sebuah komunikasi

pelayanan adalah kesan yang ditampilkan oleh aparatur pelayanan yaitu bagaimana pemberi layanan mencitrakan dirinya dalam memberikan layanan khususnya saat berinteraksi dengan pelanggan (customer), (Muwafik Saleh 2010). Nilai tentang citra diri yang baik dengan kesopanan sebagai modal utama tentunya tidak tidak menjadi kendala, mengingat jauh sebelum konsep tersebut dijelaskan umumnya percaya bahwa kesponan sebagai dasar utama untuk membangun interaksi yang baik dengan siapa saja dan dimana saja.

Tantangan komunikasi kekinian

Globalisasi merupakan sesuatu fenomena dalam peradaban manusia yang terus berkembang dan membentuk kehidupan yang global, seperti yang dalam perumpamaan Marshall McLuhan, dunia diistilahkan sebagai *global village* atau desa sejagad. Ini berarti bahwa segala proses hidup manusia telah disederhanakan oleh lahirnya globalisasi media.

INDONESIA
Dilarang keras memperbanyak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Munculnya globalisasi media menyentuh hampir seluruh bidang kegiatan manusia sehingga dampak globalisasi dapat melahirkan perubahan sistem kehidupan, bahkan ia akan mempengaruhi budaya lokal yang disebabkan oleh penyebaran budaya dari luar. Semua kondisi ini akan terjadi apabila perkembangan globalisasi media teknologi komunikasi tidak diterima dan dijalankan dengan cepat dan cerdas. Akibatnya sesuatu budaya akan mengalami degradasi maupun pengurangan nilai yang selama telah menjadi identitas bagi kelompok sesuatu masyarakat.

Menurut Fu dan Chiu (2007), bahwa ada dua pandangan yang berbeda tentang bagaimana budaya lokal menanggapi globalisasi. Yang pertama, bahwa globalisasi tidak dapat dihindari dan akan menyebabkan hilangnya budaya lokal sehingga kemudian terjadi

penyeragaman budaya dunia. Yang kedua, dipercayai bahwa beberapa aspek budaya lokal tahan terhadap dampak globalisasi.

Pernyataan ini sejalan dengan yang disampaikan Tomlinson (2003), bahwa identitas budaya tidak menjadi mangsa mudah globalisasi. Ini karena identitas sebenarnya tidak hanya terdiri dari beberapa kelompok yang rapuh, tetapi ia merupakan satu dimensi besar dalam kehidupan sosial yang terlembagakan dalam modernitas. Kuatnya identitas budaya sebenarnya telah dibangun dari latar belakang budaya yang sama dalam suatu kehidupan masyarakat tertentu, sehingga kecenderungannya di antara anggota kelompok akan lebih fokus membangun dan mempertahankan kearifan lokal mereka.

GLOBALISASI MEDIA	KEARIFAN LOKAL	SIKAP
• Aktivitas baru masyarakat	• Kebiasaan lama yang cenderung mengikat atas kesadaran	• Mengkomparasikan dua kekuatan antara media kekinian dengan kearifan lokal masyarakat dapat menjadi perpaduan yang utuh dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal.
• Mengancam tatanan nilai sosial	• Mendapat pengakuan yang kuat anggota kelompoknya	
• Menghilangkan legitimasi batas	• Menumbuhkan kedewasaan berbudaya	

Sumber : hasil analisa penulis

Dalam konteks lokal Madura, bahwa kearifan lokal yang selama menjadi aktivitas yang terinternalisasi dalam setiap tindakan dan perbuatannya berfungsi sebagai bangunan penguatan dalam menghadapi terpaan komunikasi kekinian. Membangun penguatan kearifan lokal masyarakat Madura perlu dilakukan dengan adanya

KBM INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras mencetak naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

keseimbangan kegiatan, seperti yang disampaikan Jenkins (2006), bahwa perkembangan media sosial juga telah memberikan kontribusi terhadap pengembangan (partisipasi budaya) dengan melalui posting atau download di media.

Adanya ruang untuk memposting atau mendownload pada media menjadikan kekayaan lokal masyarakat Madura sebagai konten media baru. Kesempatan ini terbuka luas kepada setiap masyarakat yang menyadari akan pentingnya mengkomparasikan diantara dua kekuatan yakni antara media kekinian dengan kearifan lokal masyarakat dapat menjadi komparasi yang utuh dengan tetap mempertahankan nilai-nilai lokal Madura.

Dengan demikian peradaban nilai budaya Madura berada pada satu tahap kemajuan yang konstruktif yang diciptakan berdasarkan pemahaman, keterbukaan pemikiran, pemanfaatan akan potensi yang dimiliki, penguasaan pengetahuan, kecakapan berteknologi, kepercayaan spiritual, serta tatanan bermasyarakat.

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Kesimpulan

Masyarakat Madura dikenal dengan kebudayaannya yang beragam, unik dan berbeda daripada budaya kebanyakan. Seluruh rangkaian kebudayaan yang ada di Madura memiliki makna filosofi tertentu yang mengajarkan tentang kebaikan, sikap dan sebagai pandangan hidup masyarakat Madura. Penggambaran atas kepribadian masyarakat madura tersirat dalam *co' oca'* atau peribahasa Madura seperti *Saduhunina* (apa adanya), *seduhunina* merupakan cerminan dari sifat tegar dan tegas. *Bengalan* (Pemberani), bahwa masyarakat Madura sebagai sosok yang pemberani membela kebenaran sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. *Esto* (setia), sikap kesetiaan ini berlaku dalam berbagai tingkatan hidup dan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya.

Globalisasi media menyentuh hampir seluruh bidang kegiatan manusia sehingga dampak globalisasi dapat melahirkan perubahan sistem kehidupan suatu masyarakat termasuk juga masyarakat madura. Dengan demikian sikap yang diperlukan untuk menyikapi perkembangan tersebut dengan membuka wawasan yang luas berdasarkan pemahaman, keterbukaan pemikiran, pemanfaatan akan potensi yang dimiliki, kecakapan berteknologi, kepercayaan spiritual, dalam tatanan bermasyarakat. Harapan yang lebih besar kemudian muncul bahwa segala potensi dapat menjadi pandangan dan pedoman dunia dalam berperilaku sosial, terutama dalam ekosistem lingkungan kehidupan.

Referensi

Ahmad Rifai, Mien. 2007. *Manusia Madura:* Pilar Media Yogyakarta

Fu, J.H.Y. dan Chiu, C.Y. 2007. *Local culture's responses to globalization: exemplary persons and their attendant values*. Journal of Cross-Cultural Psychology: Sage publised

Jenkins, H. 2006. *Confronting the challenges of participatory culture and media education for the 21st century*. MacArthur foundation. Di unduh dari: http://digitallearning.macfound.org/atf/cf/{7E45C7E0-A3E0-4B89-AC9C-E807E1B0AE4E}/JENKINS_WHITE_PAPER.PDF

Kriyantono, Rachmat. 2014. *Teori public relations, perspektif barat &lokal*. Kencana Jakarta

Morissan. 2014. *Teori komunikasi, individu hingga mass*a: Kencana Jakarta

Muwafik Saleh, Akh. 2010. *Public service communication,Praktik komunikasi dalam pelayanan publik*.: UMMPress. Malang

Tomlinson, J. 2003. *Globalization and Cultural Identity*: University of Chicago Press

Wiyata, A. Latief. 2013. *Mencari Madura* : Bidik-Phronesis Publishing Jakarta

KPM INDONESIA
www.penerbitbukukumurah.com
Dilarang keras, memfotocopy naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit



Mitos Dan Tantangan Dalam Perkembangan Kontrasepsi KB Vasektomi di Madura

Bani Eka Dartiningsih

Pendahuluan

Kepulauan Madura terletak di ujung Timur Provinsi Jawa Timur yang dipisahkan oleh selat Madura. Adapun selat tersebut sebagai pemisah secara geografis dan secara sosiologis merupakan salah satu penyebab perbedaan orang

Madura dengan orang Jawa, seperti perbedaan bahasa, adat istiadat dan budaya. Karakter sosial dan watak orang Madura dalam memegang teguh adat istiadat dan tradisi setempat memiliki perbedaan dibandingkan dengan orang Jawa pada umumnya. Masyarakat Madura, diketahui selain dikenal sebagai masyarakat yang taat dan patuh terhadap ajaran agama Islam juga berpegang teguh terhadap tradisi dan adat istiadat.

Masyarakat Madura dikenal memiliki budaya yang khas, unik, stereotipikal, dan stigmatik. Identitas budayanya itu dianggap sebagai deskripsi dari generalisasi jati diri individual maupun komunal etnik Madura dalam berperilaku dan berkehidupan. Kehidupan mereka di tempat asal maupun di perantauan kerapkali membawa dan senantiasa dipahami oleh komunitas etnik lain atas dasar identitas kolektifnya.

Masyarakat Madura mempunyai corak budaya yang beragam. Ada dua jenis lapangan pekerjaan dominan yang mempengaruhi cara berpikir dan bertingkah laku orang Madura, yaitu budaya nelayan dan budaya petani. Kedua jenis lapangan pekerjaan itu yang mempengaruhi watak dan etos budaya orang Madura yang bertemperamen keras dan suka bersaing. Seperti sektor nelayan jelas bahwa dunia yang mereka hadapi samudra yang luas, sehingga untuk menaklukkannya dalam mencari hasil laut harus dengan perjuangan yang keras pula. Begitu juga dalam bidang pertanian, untuk mendapatkan hasil juga harus bekerja keras karena tanah di sana pada umumnya berupa batu kapur.

Madura merupakan etnik dengan populasi terbesar di Indonesia, jumlahnya sekitar 7.179.365 juta jiwa (sensus 2010). Beberapa alasan mengapa KB sangat penting di Madura diantaranya adalah: masih tingginya laju pertumbuhan dan jumlah penduduk Madura, masih kurang maksimalnya akses dan kualitas pelayanan KB, Rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB, Kurangnya pengetahuan dan

kesadaran pasangan usia subur tentang hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi, Masih lemahnya ekonomi dan ketahanan keluarga, dan Masih tingginya tingkat kelahiran penduduk**.**

Pelaksanaan Program KB Vasektomi tidak mencapai target. Pasalnya masyarakat Madura masih bersikap apatis dan tidak mau ber KB, karena bagi laki-laki KB adalah urusan perempuan. Madura dikenal sebagai masyarakat yang patriarki, dimana perempuan pada umumnya tidak memiliki posisi yang signifikan, hal ini dapat dilihat dengan lemahnya posisi tawar perempuan Madura terhadap laki-laki. Selama ini yang terjadi di masyarakat Madura adalah memasang alat kontrasepsi atau ber-KB cenderung diserahkan kepada istri, padahal suami juga harus berpartisipasi, seperti dengan melakukan metode operasi pria (MOP), bisa juga KB dengan menggunakan kondom. Guna memasyarakatkan kaum pria agar sadar pentingnya ber-KB, maka pihak BPPKB terus melakukan sosialisasi dan melakukan MOP gratis.

Mitos KB Pria Di Madura

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Berdasarkan hasil dari Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) di Kairo pada tahun 1994, program KB mengalami perubahan paradigma yaitu dari pendekatan pengendalian populasi menjadi pendekatan kesehatan reproduksi dengan memperhatikan hak reproduksi dan juga

kesetaraan gender. Sejalan dengan perubahan ini program KB di Indonesia juga mengalami perubahan yang diperkuat dan ditetapkannya Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Diamanatkan pada pasal 25 ayat 1 yaitu *Suami dan/atau istri mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yg sama dalammelaksanakan KB*.

Perubahan paradigma ini menuntut adanya perubahan program terutama dengan menjamin kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang lebih baik dan keadilan gender melalui pemberdayaan perempuan serta peningkatan partisipasi pria. Dengan meningkatnya partisipasi pria dalam ber-KB dan terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengendalian pertumbuhan penduduk dan penanganan masalah kesehatan reproduksi, serta meningkatkan status kesehatan perempuan dan akhirnya berdampak terhadap penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak.

Upaya peningkatan partisipasi pria dalam ber-KB yang selama ini diukur dengan tingkat kesertaan KB Pria melalui penggunaan alat kontrasepsi Kondom dan Metode Operatif Pria (MOP). Hal yang mendasar di dalam pelaksanaan pengembangan program partisipasi pria guna mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender adalah dalam bentuk perubahan kesadaran, sikap dan perilaku pria tentang KB. Sejak isu kesetaraan gender dalam ber-KB keras menggema pasca ICPD-1994 di Kairo. Di masa lalu, persoalan pengaturan kelahiran masih terfokus pada perempuan sehingga terkesan bahwa KB adalah urusan perempuan, sehingga istilah yang harus ber-KB. Belakangan KB juga harus menjadi urusan laki-laki. Artinya, seorang suami sekarang ini tidak boleh tidak harus peduli KB, karena KB telah menjadi urusan bersama. Akan lebih utama bila sang suami mau berperan langsung melalui penggunaan alat/cara kontrasepsi Kondom atau MOP atau dengan kata lain menjadi peserta KB.

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Rendahnya angka partisipasi pria dalam ber-KB ini disebabkan oleh berbagai faktor. Dari beberapa studi yang dilakukan ternyata penyebab rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB antara lain:

(1) pilihan/jenis kontrasepsi pria terbatas; (2) sasaran KIE dan konseling lebih kepada perempuan; (3) belum optimalnya provider untuk memberikan pelayanan kontrasepsi pria; (4) faktor sosial budaya serta dukungan politis dan operasional yang masih terbatas yang menganggap KB dan kesehatan reproduksi serta kesehatan ibu dan anak adalah urusan perempuan; (5) pengetahuan dan kesadaran pria dalam pemakaian kontrasepsi masih rendah.

Disamping itu persoalan keyakinan atau agama juga menambah deretan faktor berpengaruh lainnya. Pada tahun 1979 Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan tidak bisa menerima vasektomi sebagai alat kontrasepsi dan dilanjutkan pada tahun 2009 dengan mengeluarkan fatwa haram untuk vasektomi. Alasannya adalah vasektomi yang dilakukan dengan memotong saluran sperma ini dianggap sebagai pemandulan permanen dan sangat bertolak belakang dengan hukum Agama Islam. Akan tetapi pada Juli 2012 MUI kemudian mengeluarkan fatwa baru untuk vasektomi yaitu diperbolehkan *(mubah)*. Perubahan fatwa ini didasari oleh pembuktian bahwa vasektomi bukanlah pemandulan permanen karena bagi yang masih menginginkan anak dapat ditempuh upaya medis rekanalisasi yaitu penyambungan kembali saluran sperma untuk memulihkan fungsi.

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Vasektomi adalah fenomena medis kekinian yang cukup rumit yang hanya dimengerti dengan baik oleh pihak-pihak yang ahli dalam bidangnya. Jikapun diketahui oleh pihak-pihak di luar ahlinya maka pastilah atas dasar informasi dari ahlinya. Dalam konteks vasektomi pihak yang paling ahli dalam bidang ini adalah ahli urologi. Vasektomi adalah operasi kecil mengikat saluran sperma pria sehingga benih pria tidak mengalir ke dalam air mani pria. Dengan vasektomi, seorang pria tidak bisa lagi menghamili wanita karena saat ejakulasi air mani pria tidak mengandung sel sperma.

Masyarakat membutuhkan pencerahan dan informasi bagaimana agama memberikan panduan dalam soal vasektomi. Hingga saat ini sebagian besar masyarakat menganggap vasektomi diharamkan oleh agama. Fatwa keharaman vasektomi antara lain didasarkan pada alasan bahwa vasektomi dimaksudkan sebagai upaya pencegahan kehamilan secara permanen, dimana suami istri tidak berkeinginan lagi untuk memiliki anak.

Kepatuhan masyarakat Madura Terhadap Kiai

Fatwa vasektomi sedikit mengalami perubahan dalam *ijtima'* ulama komisi fatwa MUI se Indonesia ke IV tanggal 29 Juli 2012 di Cipasung Tasikmalaya. Dalam *ijtima'* ulama yang ke IV ini diputuskan bahwa vasektomi tidak secara mutlak dan tidak halal secara mutlak. *Ijtima'* memutuskan bahwa vasektomi hukumnya haram kecuali keputusan ini berdasarkan alasan (1). Bahwa vasektomi masih dianggap mengakibatkan kemandulan tetap. (2). Pemotongan terhadap saluran spermatozoa merupakan *taghyir khalqillah.* (3). Upaya rekanalisasi tidak menjamin pulihnya tingkat kesuburan.

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Banyak sekali anggapan dan kesan negatif terhadap program KB Vasektomi. Hal ini terjadi karena masih kuatnya pandangan tokoh masyarakat dan tokoh agama tentang pemakaian kontrasepsi laki-laki khususnya secara sosial budaya. Hal ini karena masyarakat masih menganggap tabu/kurang mendukung jika laki-laki menggunakan alat kontrasepsi. Selain itu perilaku sebagian besar tokoh masyarakat dan suami yang belum bisa menerima KB bagi laki-laki terutama *Vasektomi.* Dengan menggunakan alasan bahwa agama tidak memperbolehkan.

Hal yang serupa disampaikan bahwa bila laki-laki menggunakan alat kontrasepsi dianggap tidak perkasa lagi, selain itu dalam hubungan seksual dianggap tidak kuat dan jika berselingkuh tidak

ketahuan. Ada pula yang menganggap KB itu urusan ibu-ibu. Seperti yang dituturkan oleh sebagian ulama, bahwa kontrasepsi belum diprogramkan dan dianggap haram, kecuali bila terdesak misal anak sudah banyak dan tidak satu pun metode KB yang cocok.

Adanya pengambilan keputusan yang dilakukan pria Madura untuk ber KB vasektomi merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji lebih mendalam, meskipun persentasenya sangat sedikit. Peningkatan partisipasi laki-laki dalam KB adalah langkah yang tepat dalam upaya mendorong kesetaraan gender.

Madura dapat dikatakan identik dengan Islam. Islam pada masyarakat Madura dapat dikatakan telah mendarah daging yang berfungsi sebagai inti kebudayaan yang memuat ajaran moral dan etika pada masyarakat Madura. Islam mempengaruhi masyarakat dan budaya Madura dalam banyak hal. Salah satu bentuknya adalah rasa hormat yang tinggi kepada kiai (keaye).. Gelar kiai hanya diberikan pada orang yang memiliki ilmu agama yang tinggi dan dianggap berjasa dalam dakwah. Mengaji merupakan hal kemampuan yang 'harus' dimiliki oleh orang Madura. Ungkapan *"Ngaji reya bende akherat"* (mengaji sebagai modal akhirat) menempatkan guru ngaji/agama dan institusi pondok pesantren menjadi tumpuan dalam mempelajari agama Islam

Dari hasil pertemuan dengan Ahli Urologi Indonesia dan Fatwa MUI tersebut menjadi dukungan yang kuat dan sangat besar untuk meningkatkan kesertaan KB Pria. Salah satu komitmen dari pertemuan tersebut adalah dengan memberikan fatwa memperbolehkan Vasektomi dengan syarat untuk tujuan yang tidak menyalahi syari'at, tidak menimbulkan kemandulan permanen, ada jaminan dapat dilakukan rekanalisasi yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula, tidak menimbulkan bahaya (mudharat) bagi yang bersangkutan. Fatwa

ini sangat menggembirakan. Dengan adanya fatwa MUI tersebut, pengguna metode kontrasepsi vasektomi bagi kaum pria sudah tak perlu ragu-ragu lagi.

BKKBN dalam mensosialisasikan program KB Vasektomi selalu menggandeng tokoh agama (kyai) dan tokoh masyarakat (Blatter). Kekuasaan kiai sebagai tokoh agama terlihat jelas pada ungkapan *"Buppa' Babbu' Guru' Rato"* menempatkan kiai lebih tinggi dibandingkan pemerintah. Kiai menempati posisi sentral dalam bidang agama di Madura

Kesimpulan

Vasektomi merupakan upaya untuk menghentikan fertilitas. Seperti yang dituliskan di atas, metodenya menggunakan operasi kecil dan hanya berlangsung sebentar. vasektomi ini tidak mempengaruhi hormon pria. Tidak berpengaruh juga terhadap gairah dan kemampuan seksual. Kebanyakan Laki-laki tidak mau melakukan vasektomi karena tidak bisa memiliki anak lagi dan saluran sperma disumbat, kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang agama, mereka takut kalau dikatakan tidak perkasa lagi dan sebagainya, sehingga perempuan atau istri yang disuruh ber KB

www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras menerbitkan naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Pengetahuan sangat diperlukan sebelum menjalani vasektomi. Begitu juga mengenai efek samping, keuntungan dan kerugian serta perawatan pasca vasektomi. Perlu diketahui, vasektomi merupakan sterilisasi pada pria melalui salah satu metode kontrasepsi yang aman dan tidak ada efek sampingnya. Metode ini sangat ampuh, efisien, dan tidak berbahaya, serta tidak berpengaruh terhadap kemampuan maupun kepuasan seksual. Vasektomi umumnya dapat dilakukan bagi pria yang sudah tidak ingin mempunyai anak lagi, dengan memotong saluran sperma

yang menghubungkan buah zakar dengan kantong sperma, sehingga tidak dijumpai lagi bibit dalam ejakulat seorang pria.

Referensi

Bhasin, Kamla. 1996. *Menggunggat Patriarkhi: Pengantar tentang Persoalan Dominasi terhadaap Kaum Perempuan,* Yogaykarta Bintang Kalyanamitra

Bourdieu, Pierre, 2010, *Dominasi Maskulin (terjemahan),* Jalasutra Pers, Yogyakarta

Dhofier, Zamakhsyari, 1982: *Tradisi Pesantren : Studi tentang Pandangan Hidup Hidup Kyai*, LP3ES: Jakarta

Fakih, Mansour, 2004, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Megawangi, Ratna, 1999, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender,* Bandung: Mizan Pustaka

Wiyata, A.L 2006. *Carok, Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara.

BKKBN, 2005, Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi, Gender, dan Pembangunan Kependudukan, Jakarta

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, memfotocopy naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Biodata Penulis

Bani Eka Dartiningsih, lahir di Sampang Madura pada 7 Januari 1978. Pendidikan formal, Strata Satu (S1) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" jawa Timur, Strata dua (S2) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, dan S3 program Doktor Ilmu Komunikasi di Universitas Padjajaran, Bandung. Sekarang bekerja sebagai pengajar di Universitas Trunojoyo Madura, dan menjadi presenter di berbagai seminar nasional dan internasional,antara lain berjudul Kesetaraan gender Dalam Program KB di Sampang serta serta seminar nasional dengan tulisan Kepemimpinan Perempuan dalam Birokrasi Pemerintahan Di Kabupaten

Bangkalan, Simposium komunikasi Kesehatan dengan tulisan Pengambilan Keputusan Pria Etnis Madura Dalam Metode Kontrasepsi Vasektomi serta seminar nasional Di Universitas Paramadina dengan tulisan Pandangan Kiai Terhadap Program KB Vasektomi Di Madura.

KBM INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit



Transformasi Pelestarian Kesenian Bantengan di Era Digital Pendekatan Komunikasi Partisipatif dan Literasi Digital

Muhammad Fadeli

Bantengan adalah salah satu warisan budaya lokal di Kabupaten Mojokerto. Disebut Bantengan, karena unsur utama kesenian ini adalah berupa Kepala Banteng, yang dibuat dari tanduk Sapi yang dibuatkan kepala dari kayu. Secara historis seni tradisional Bantengan masih bisa dijumpai di kawasan

lereng Gunung Welirang - Arjuno dan Gunung Penanggungan. Di Desa Pecalukan dan Lumbangrejo Kecamatan Prigen, beberapa desa di Trawas serta hampir seluruh Desa di Pacet Mojokerto. Seni Bantengan masih tetap lestari dan masyarakat masih konsisten berlatih dan menampilkan seni Bantengan untuk menyemarakkan beberapa even. Misalnya, mengiringi arakan pengantin, sunatan, pawai kemerdekaan, Festival Bantengan, ritual Sedekah Bumi dan sebagainya.

Jika Surabaya mempunyai Ludruk dan Remo, Bandung punya Sisingaan, Palembang punya Ririmau, Jakarta punya Lenong dan Ondel-ondel, Yogyakarta punya Ketoprak (bukan ketoprak Jakarta) Ponorogo punya Reyog (bukan Reog) dan Banyuwangi punya Gandrung dan Jangger, Probolinggo punya Glipang, Kediri, Tulungagung dan Trenggalek punya jaranan, lalu Mojokerto memiliki kekayaan lokal berupa seni Bantengan. Sampai sekarang seni bantengan masih tumbuh subur di desa-desa Kecamatan Pacet-Mojokerto. Dewasa ini kondisi seni bantengan mengalami kendala alih generasi atau regenerasi dikawatirkan akan punah. Transformasi teknologi informasi berpengaruh karena masih didominasi generasi tua, hal ini tantangan besar terhadap keberlanjutan seni bantengan. Padahal jika seni bantengan tersebut dikelola dilestarikan dengan baik akan menjadi salah satu daya tarik sektor andalan wisata budaya masa depan yang penting dan strategis.

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Keberadaan seni bantengan di Pacet untuk mendukung tujuan wisata alam hutan wisata padusan dengan pemandian air hangat dari belerang, pemandangan alam, tempat perkemahan, sungai mengalir jernih baik untuk olah raga arung jeram, kolam renang. Dengan berbagai hasil perkebunan ketela berlimpah, jagung, sayur mayur maupun rempah-rempah lainnya. Wisata kuliner memiliki kekhasan misalnya sate kelinci, ketan hitam. Elaborasi wisata alam,

kuliner, olah raga dengan wisata budaya menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun manca negara.

Penggunaan media sosial mampu memperluas akses informasi seni bantengan kepada masyarakat. seni Keberadaan seni bantengan jika dikelola dilestarikan dengan baik akan menjadi salah satu daya tarik sektor wisata budaya dalam mendukung wisata alam

Kearifan lokal atau dengan kata lain *local wisdom* dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meski pun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal Secara filosofis, kearifan lokal dapat diartikan sebagai sistem pengetahuan masyarakat lokal/pribumi (indigenous knowledge systems) yang bersifat empirik dan pragmatis. Bersifat empirik karena hasil olahan masyarakat secara lokal berangkat dari fakta-fakta yang terjadi di sekeliling kehidupan mereka. Bertujuan pragmatis karena seluruh konsep yang terbangun sebagai hasil olah pikir dalam sistem pengetahuan itu bertujuan untuk pemecahan masalah sehari-hari (daily problem solving). Kearifan lokal merupakan sesuatu yang berkaitan secara spesifik dengan budaya tertentu (budaya lokal) dan mencerminkan cara hidup suatu masyarakat tertentu (masyarakat lokal).

Kearifan lokal adalah kebijaksanaan atau pengetahuan asli suatu masyarakat yang berasal dari tradisi budaya untuk mengatur kehidupan masyarakat secara berkelanjutan (Sabrani, 2012). Mencerminkan gagasan, nilai-nilai, dan pandangan yang terakar dalam budaya dan cara hidup masyarakat setempat. Ini adalah aspek penting dari warisan budaya yang perlu dilestarikan dan diteruskan. Dalam konteks seni Bantengan, ini mengacu pada

tradisi seni yang telah berlangsung lama di Mojokerto dan masih menjadi bagian integral dari budaya masyarakat lokal. Seni Bantengan adalah salah satu ekspresi seni tradisional yang unik di Mojokerto. Ini menggambarkan bagaimana kearifan lokal tercermin dalam bentuk seni dan bagaimana seni ini masih hidup dan relevan dalam beberapa acara dan festival di daerah tersebut. Hanya masalahanya adalah pertama tidak adanya regenerasi sebab generasi muda lebih sibuk dengan tuntutan pekerjaan sehingga kesenian bantengan tidak begitu menarik bagi generasi muda. Kedua pertunjukan kesenian bantengan tidak menjadi pilihan utama untuk tujuan wisata maupun dan ketiga nperkmebngan teknologi informasi mereduksi eksistensi seni bantengan.

Menurut KBBI, pengertian teknologi informasi adalah penggunaan teknologi seperti komputer, elektronik, dan telekomunikasi, untuk mengolah dan mendistribusikan informasi dalam bentuk digital. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi melalui internet maka masyarakat dengan mudah mengakses semua informasi dunia global hal ini merupakan diterminasi teknologi informasi terhadap kesenian lokal. Melihat kondisi seperti itu perlu ada inovasi, gagasan-gagasan baru, deferensiasi pengelolaan wisata pacet melalui penguatan kearifan lokal. Salah satunya adalah dengan mengangkat budaya lokal "Bantengan" lebih sejajar dengan kesenian yang lain seperti reog ponorogo, ludruk Surabaya, gandrung Banyuwangi. Tantangannya adalah sejauhmana kesenian lokal mampu adaptif terhadap perkembangan teknologi komunikasi dengan memanfaatkan media sosial sebagai wadah sosialisasi dan eksistensinya.

www.penerbit-ikumuran.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Dampak dari globalisasi ekonomi juga terdistribusi ke sejumlah relasi kehidupan masyarakat, tak terkecuali terhadap eksistensi kesenian tradisional yang selama ini dianggap sebagai identitas kultural bagi masyarakat pendukungnya (Irianto, Suharyo, dan Hermintoyo, 2015: 19-25 dan Pereira, 2017)). Akibat tuntutan dunia

global itulah, mengubah cara pandang masyarakat pendukung kesenian tradisional terhadap keberadaan kesenian tradisional. Ia tidak hanya disikapi sebagai identitas kultural yang mengakomodasi tuntutan ritual masyarakat pendukungnya semata, kesenian tradisional saat ini juga dituntut menjadi komoditi hiburan yang memuat unsur komersial (Irianto, Suharyo, dan Wiranto, 2010). Pelestarian kesenian tradisional di era globalisasi ekonomi saat ini, berada pada benturan antara nilai tradisional yang mengabdi pada harmoni, keselarasan, dan mistis dengan nilai-nilai kontemporer yang cenderung diorganisasi oleh perkembangan teknologi informasi, konsumsi budaya, dan permainan media massa (Irianto, 2016a: 2355-3820). Eksistensi kesenian tradisional saat ini, termajinalisasi karena dianggap kurang memenuhi tuntutan standar industri pariwisata yang merupakan anak kandung dunia global (Irianto, 2016b: 213-236). Demikian di era digital pelestarian budaya lokal Bantengan di Kecamatan Pacet Mojokerto menghadapi ancaman serius. Penggunaan media sosial mampu memperluas akses informasi seni bantengan kepada masyarakat. seni Keberadaan seni bantengan jika dikelola dilestarikan dengan baik akan menjadi salah satu daya tarik sektor wisata budaya dalam mendukung wisata alam (Fadeli, 2024)

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, berkomunikasi, dan mendefinisikan identitas budaya. Di satu sisi, digitalisasi membuka peluang besar untuk dokumentasi, diseminasi, serta revitalisasi budaya lokal. Namun di sisi lain, muncul tantangan serius terkait distorsi makna, komersialisasi berlebihan, hingga ancaman hilangnya otentisitas budaya. Tantangan utama pelestarian budaya di era digital adalah memetakan arah masa depan melalui pendekatan komunikasi partisipatif.

Pengaruh Teknologi Informasi

Teknologi informasi, khususnya internet, telah mengubah cara masyarakat mengakses informasi dan budaya global. Dalam konteks seni Bantengan, teknologi informasi telah memberikan tantangan dan peluang. Di satu sisi, ada ancaman terhadap eksistensi seni ini karena kurangnya regenerasi dan persaingan dengan hiburan modern. Di sisi lain, teknologi informasi dapat digunakan untuk mempromosikan dan melestarikan seni Bantengan, serta menghubungkannya dengan audiens yang lebih luas. Globalisasi Ekonomi dan Komodifikasi Seni Tradisional, Globalisasi ekonomi telah membawa perubahan dalam cara seni tradisional dipersepsikan oleh masyarakat.

Seni tradisional tidak hanya dipandang sebagai bagian dari identitas kultural, tetapi juga sebagai komoditas ekonomi yang dapat menghasilkan keuntungan. Ini menciptakan dilema antara mempertahankan integritas seni tradisional dan menghadapi tekanan untuk mengkomersialisasinya. Tantangan dan Peluang: Fenomena ini menghadapi tantangan dalam hal regenerasi, serta beradaptasi dengan perubahan teknologi dan ekspektasi masyarakat yang semakin modern. Namun, juga ada peluang untuk menggabungkan kearifan lokal dengan teknologi informasi untuk memperluas audiens, mempromosikan budaya lokal, dan menjadikan seni Bantengan lebih relevan di era saat ini. Dalam analisis ini, penting untuk mempertimbangkan strategi yang dapat menjaga keseimbangan antara melestarikan kearifan lokal dan mengintegrasikannya dengan perkembangan teknologi informasi. Upaya untuk melibatkan generasi muda dalam seni Bantengan dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi bisa menjadi langkah penting untuk menjaga eksistensi seni tradisional ini dalam konteks globalisasi. Selain itu, perlu upaya untuk mengembangkan pendekatan berkelanjutan dalam memanfaatkan

KBM INDONESIA www.penerbitbukumurah.com Dilarang keras mencetak naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

seni Bantengan sebagai aset wisata yang berkontribusi pada pembangunan daerah.

Peluang Pelestarian Budaya di Era Digital

Di era digital media sosial telah memainkan peran yang signifikan dalam pengaruh terhadap pelestarian kesenian tradisional di berbagai budaya. Menurut Haryanto (2020), budaya digital merupakan perubahan pola berpikir, bertindak, dan berinteraksi dalam masyarakat sebagai akibat dari integrasi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Budaya digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan perangkat, tetapi juga membentuk cara masyarakat memahami informasi, membangun relasi sosial, dan berpartisipasi dalam ruang publik. Media sosial dapat dimanfaatkan sebagai ruang eksistensi kebudayaan lokal.

1. Promosi dan Penyebaran Informasi:

Media sosial memungkinkan seniman dan kelompok seni tradisional untuk mempromosikan karya mereka secara luas tanpa perlu mengeluarkan biaya besar untuk pemasaran. Mereka dapat berbagi video, foto, cerita, dan informasi tentang pertunjukan atau workshop yang akan datang. Ini memperluas jangkauan audiens potensial yang dapat mengetahui tentang seni tradisional tersebut.

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

2. Keterlibatan dan Interaksi:

Media sosial memungkinkan seniman untuk berinteraksi secara langsung dengan audiens mereka. Mereka dapat menerima umpan balik, pertanyaan, dan komentar dari penonton mereka. Ini dapat membantu dalam membangun komunitas yang lebih kuat di sekitar seni tradisional dan memungkinkan seniman untuk mendengar harapan dan kebutuhan audiens mereka.

3. Pendidikan dan Kesadaran:

Media sosial dapat digunakan untuk mendidik audiens tentang seni tradisional. Seniman dapat berbagi informasi tentang sejarah, makna, dan proses pembuatan karya seni tradisional. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang nilai budaya dari seni tersebut.

4. Kolaborasi dan Jaringan:

Media sosial memungkinkan seniman tradisional untuk terhubung dengan seniman lain, baik lokal maupun internasional. Ini membuka peluang untuk kolaborasi dalam proyek seni, pertukaran budaya, dan pertunjukan bersama. Kolaborasi semacam ini dapat membantu seni tradisional untuk tetap relevan dan berkembang.

5. Pelestarian dan Pengembangan:

Media sosial juga dapat digunakan sebagai alat untuk pelestarian seni tradisional. Video dokumenter, wawancara dengan seniman tua, dan rekaman pertunjukan dapat diunggah dan diakses oleh generasi muda. Ini membantu dalam mewariskan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan seni tradisional.

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Tantangan Pelestarian Budaya di Era Digital

Digitalisasi memungkinkan budaya lokal tersebar lintas dunia, tetapi sering kali unsur budaya dipisahkan dari konteks sosial, religi, dan historisnya.Contoh pementasan bantengan yang diunggah di TikTok dipotong menjadi 10–20 detik, sehingga nilai filosofisnya hilang. Simbol adat dipakai sebagai estetika komersial tanpa memahami makna sakral. Kehilangan konteks ini dapat menciptakan *cultural flattening*, yaitu budaya direduksi menjadi hiburan semata.

Era digital memberi panggung besar bagi industri kreatif, tetapi sekaligus memunculkan risiko misalnya budaya dijadikan komoditas viral, tradisi sakral disulap menjadi konten hiburan dan hak intelektual komunal tidak terlindungi. Fenomena disinformasi dan distorsi Sejarah disebabkan adanya konten budaya digital sering diproduksi tanpa verifikasi, sehingga menyebar narasi keliru tentang sejarah dan makna lokal. Muncul klaim-klaim budaya oleh pihak yang tidak berwenang dan sejarah panjang direduksi menjadi narasi singkat yang kurang akurat.

Algoritma platform digital cenderung mempromosikan konten populer dan viral, bukan konten berkualitas dan berdampak. Akibatnya budaya minoritas makin tenggelam, tradisi yang tidak "marketable" sulit berkembang hal ini berpotensi menimbulkan *algorithmic marginalization.*

1. Komersialisasi dan Tantangannya:

Meskipun media sosial membawa banyak manfaat, ada juga tantangan. Beberapa seniman tradisional mungkin merasa tekanan untuk mengkomersialisasi karya mereka untuk mendapatkan popularitas di media sosial. Hal ini dapat mempengaruhi integritas seni tradisional, dan beberapa mungkin mengorbankan aspek-aspek tradisionalnya demi popularitas.

KBM INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras menyalin atau menyebarkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin Penerbit

2. Ancaman Terhadap Privasi:

Penggunaan media sosial juga membuka potensi untuk masalah privasi, terutama dalam hal seni tradisional yang berhubungan dengan ritual dan kepercayaan tertentu. Bagian dari seni tradisional mungkin harus dijaga dengan hati-hati agar tidak diungkapkan secara terbuka di media sosial.

3. Ketergantungan pada Teknologi

Digitalisasi budaya membutuhkan perangkat pendukung misalnya akses internet, Perangkat androit, kapasitas literasi digital dalam

memproduksi konten. Sehingga bagi komunitas budaya di daerah terpencil sering tertinggal dalam akses maupun keterampilan produksi konten.

Partisipasi Komunitas dalam Pelestarian Budaya Lokal

Partisipasi komunitas merupakan prinsip fundamental dalam pelestarian budaya lokal. Komunitas bukan hanya pemilik pengetahuan budaya, tetapi juga agen utama yang menjaga keberlangsungan nilai, praktik, dan simbol budaya tersebut. Dalam konteks komunikasi partisipatif, partisipasi tidak dimaknai sebagai keterlibatan simbolik, melainkan sebagai proses berbasis dialog, negosiasi, dan pemberdayaan yang memungkinkan komunitas memiliki kontrol penuh terhadap setiap proses pengambilan keputusan terhadap seni bantengan. Dengan demikian akan terjadi alih generasi secara berkelanjutan dari generasi tua kepada generasi muda.

Salah satu kritik terhadap praktik pelestarian budaya selama ini adalah pendekatan yang top-down. Pemerintah, akademisi, atau industri sering mendefinisikan apa yang layak disebut "budaya" dan bagaimana budaya tersebut harus dirawat. Pendekatan ini menimbulkan masalah seperti hilangnya makna asli budaya dan kurangnya rasa kepemilikan.

Komunikasi partisipatif menawarkan pendekatan sebaliknya: komunitas adalah subjek utama, sementara pihak lain berperan sebagai pendamping. Dialog adalah inti dari partisipasi menurut Paulo Freire. Pendekatan komunikasi partisipatif berakar dari gagasan Freire tentang dialog pembebasan bahwa komunikasi harus memungkinkan individu menyadari realitas mereka, bersuara, dan berpartisipasi dalam perubahan sosial (Paulo Freire (1970)

KSM INDONESIA
www.penerbitkuwah.com
Dilarang keras memperbanyak naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Dalam pelestarian budaya kususnya seni bantengan, dialog memungkinkan adanya identifikasi kebutuhan komunitas, bukan asumsi dari luar, konsensus terkait bentuk pelestarian yang sesuai dengan nilai lokal serta Integrasi antara tradisi dan inovasi tanpa menghilangkan identitas budaya. Sehingga melahirkan rasa memiliki yang kuat pelaku seni bantengan atau pelaku seni pada umumnya.

Literasi Digital Budaya sebagai Kebutuhan Dasar

Digitalisasi menghadirkan peluang besar untuk pelestarian budaya, tetapi juga menimbulkan risiko jika komunitas tidak dibekali kemampuan literasi digital. Literasi digital budaya adalah kemampuan memanfaatkan teknologi untuk mengelola, mendokumentasikan, memverifikasi, dan mendiseminasi budaya secara kritis dan bertanggung jawab. Literasi digital budaya bukan sekadar kemampuan teknis, melainkan pemahaman yang menyeluruh terhadap ekosistem digital dan dampaknya terhadap budaya.

www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras mencetak naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

literasi digital digunakan dalam mendokumentasikan, mengarsipkan, serta mempromosikan budaya lokal, terutama melalui media sosial dan platform berbasis konten (Hafiar (2019). Dalam konteks pelestarian budaya, kemampuan menghasilkan konten (foto, video, audio, tulisan) menjadi sangat penting. Produksi konten budaya yang memungkinkan misalnya dokumentasi tradisi secara mandiri, penyebaran narasi lokal melalui media sosial dan penciptaan arsip yang dapat diakses generasi mendatang. Namun demikian perlu pemahaman secara komprehensip bagi generasi muda, bahwa produksi konten seni bantengan atau kesenian lainnya secara mandiri harus memahami unsur etika yaitu tidak merekam ritual sakral tanpa izin, tidak mengkomersialkan simbol budaya, dan memastikan konteks

budaya tetap utuh. Hal ini perlu verifikasi informasi budaya untuk mencegah penyebaran mitos atau informasi keliru, menghindari klaim budaya yang tidak akurat, serta menjaga otoritas pengetahuan komunitas.

Referensi

Edy Sedyawati, 2006, *Budaya Indonesia, Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 382. 3 Ajip Rosidi, 2011, Kearifan Lokal dalam Perspektif Budaya Sunda, Bandung: Kiblat Buku Utama, halaman 29.

Fadeli, Muhammad, M. Hilmi Aziz, and Musyahadah Musyahadah. (2024) "Model Pelestarian Kesenian Rakyat Bantengan di Kecamatan Pacet Mojokerto ditengah diterminasi Teknologi Informasi." *Jurnal Sains Riset* 14.1 (2024): 415-420.

Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum.

Hafiar, H. (2019). "Media Digital dan Pelestarian Budaya Lokal." *Jurnal Kajian*

Komunikasi, 7(1).

Haryanto (2020) *Budaya Digital: Teori, Konsep, dan Praktik*. Yogyakarta: Penerbit Litera

Irianto, Agus Maladi. (2009). *"Media dan Multikulturalisme" dalam Multikulturalisme Yogyakarta dan Identitas Keindonesiaan*, (Editor: Sri Rahayu Budiarti dan Muslimin A.R. Effendy). Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia.Hal. 31-64.

Iman, Nurul (et.al). 2016. *Strategi Pelestarian Dan Pengembangan Reyog Ponorogo (Perspektif Praktisi Dan Pemerhati Budaya Ponorogo).* Prosiding Seminar Nasional Hasil-Hasil Penelitian 2016 : Bidang Agama Islam, Budaya, Ekonomi, Sosial Humaniora, Teknologi, Kesehatan, Dan Pendidikan. Ponorogo : Unmuh Press

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Kuswarsantyo. (2013). "*Seni Tradisional: Bentuk, Fungsi, dan Perkembangannya* (*1986-2013*)". Disertasi. Yogyakarta: Fakultas Bahasa dan Seni, UNY

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Nugraheni, Marina Catur. (2014). "Analisis Sosiologi Budaya dalam Kesenian Tradisional Tradisional Tri Tunggal Muda Budaya, Dusun Gejiwan, Desa Krinjing, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang". *Jurnal Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa Universitas Muhammadiyah Purworejo.* 4(5), 71-75

Widodo, A. (2020). Nilai Budaya Ritual Perang Topat Sebagai Sumber Pembelajaran IPS Berbasis Kearifan Lokal di Sekolah Dasar. *Gulawentah:Jurnal Studi Sosial*, 5(1), 1–16.

Widodo, A., Tahir, M., Maulyda, M. A., Sutisna, D., Sobri, M., Syazali, M., & Radiusman, R. (2020). Upaya Pelestarian Permainan Tradisional melalui Kegiatan Kemah Bakti Masyarakat. *ETHOS: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(2), 257–264.

Wahyuni, S. (2021) *Pelestarian Budaya dalam Era Digital*. Yogyakarta: Ombak,

Paul, Ray J., (2010), What an Information System Is, and Why Is it Important to Know This, *Journal of Computing and Information Technology*, Vol 2, No.18, Uxbridge – Brunel University, United Kingdom, pp. 95-99

Rahim, Abdul.(2020) "Peran Komunikasi Partisipatif dalam Pelestarian Kearifan Lokal." *Jurnal Ilmu Komunikasi*

Suneki, S. (2012). Dampak Globalisasi Terhadap Eksistensi Budaya Daerah. *Jurnal Ilmiah* CIVIS, II(1), 307–321.

Sibarani, Robert. 2012. *Kearifan Lokal: Hakikat, Peran, dan Metode Tradisi Lisan*. Jakarta: Asosiasi Tradisi Lisan.

INDONESIA
tbukumurah.com
Isi layout ini tanpa seijin Penerbit

KBM
INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit



Epilog. Perspeketif Lokal Menjadi Yang Utama, Bukan Sekadar Pelengkap

Surokim As

INDONESIA
Dilarang keras memperbanyak sebagian atau seluruh isi hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Mencermati dan memahami rangkaian tulisan yang dipaparkan para dosen, peneliti dan pemerhati bidang komunikasi Jawa Timur sungguh menggembirakan dan seolah menangkap secercah cerah adanya tekad para akademisi local untuk mengembalikan khittah pengembangan ilmu pengetahuan berdiri diatas kemandirian dan potensi lokal. Hal ini penting untuk menumbuhkan kembali kepercayaan diri dan

mengikis mental menjadi *follower* dan munculnya harapan dan keyakinan untuk berusaha serius menjadi *creator* dan *inovator* dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Ikhtiar pada peneliti komunikasi di Jawa Timur ini juga bisa dibaca sebagai upaya serius untuk mengenalkan potret dan potensi lokal yang kemudian bisa memunculkan konsep lokal dan kearifan Lokal dalam diskursus ilmu pengetahuan sosial yang diharapkan dapat dijadikan sebagai sebagai perspektif utama untuk mengurangi dominasi perspektif barat. Mengingat selama ini perspektif local hanya menjadi pelengkap dan banyak ditempatkan sebagai perspektif alternative an sich.

Analisis para penulis dengan mendasarkan kepada data local ternyata bisa membuka wacana bahwa ilmu pengetahuan local kita sesungguhnya teramat kaya dan belum banyak yang dieksplorasi lebih jauh. Tersedia cukup banyak tema tema dan realitas sosial yang bisa dieksplore menjadi rangkaian mozaik ilmu pengetahuan yang utuh yang bisa menggambarkan fenomena yang sesungguhnya terjadi di masyarakat kita. Tak heran jika banyak ilmuwan mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu laboratorium sosial yang lengkap dan beragam.

Mempromosikan konsep lokal dalam khazanah pengetahuan saat ini tentu bukan pekerjaan yang mudah. Banyak hal berkelindan baik secara sosial politik, budaya maupun kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dibutuhkan tekad dan kerjasama semua pihak, khususnya mulai dari tingkat lokal untuk terintegrasi dan berkesinambungan mempromosikan kajian kajian dan juga dalam distribusi publikasi ilmiah yang bisa dibaca oleh banyak kalangan sehingga bisa mendesakkan konsep itu dalam diskursus mondial. Diharapkan dengan upaya terpadu maka akan diperoleh banggunan yang lebih lengkap dan komprehensif mengenai

perspektif lokal dalam pengembangan ilmu pengetahuan khas Jawa Timur, Indonesia, dan juga Asia.

Selama ini harus diakui bahwa ilmu pengetahuan masih sangat didominasi oleh perspektif barat sehingga ukuran barat yang selama ini dijadikan sebagai ukuran utama dalam ilmu pengetahuan. Dominasi ini telah berlangsung lama dan semakin mengukuhkan kedigdayaan ilmu pengetahuan barat. Jika kesadaran ini sudah tumbuh maka sudah selayaknya digugat dan dipertanyakan karena kenyataanya masih butuh banyak proses adaptasi dan elaborasi khususnya terkait dengan konteks budaya masyarakat lokal. Selain itu juga terdapat perbedaan sistem alam dan lingkungan. Hal ini membuat pengetahuan social tidak mudah untuk berlaku universal. Ia selalu butuh proses adaptasi dan elaborasi agar cocok dengan situasi dimana ilmu itu tengah dikembangkan.

Konsep komunikasi barat yang selalu dianggap universal berlaku dalam berbagai konteks sudah semestinya dipertanyakan dan juga dikritik. Hal ini penting disadari mengingat jika hal ini berlangsung terus menerus akan bisa menjadi tirani dan hegemoni ilmu pengetahuan. Efek serius adalah inferior muatan lokal hingga bisa menjadi perspektif utama dalam pengembangan pengetahuan. Apalagi faktor perbedaan geografis, budaya, ideology, norma masyarakat juga penting diperhatikan dalam keberlakuan suatu konsep (Kriantono, 2014:344). Bisa jadi teori yang sama akan menjadi berbeda aplikasinya antar wilayah. Selain itu menurut Kriantono (2014) juga tergantung dari filsafat ilmu yang berkembang. Setiap masyarakat memiliki keyakinan dan juga nilai yang berbeda beda. Otomatis ilmu pengetahuan juga tergantung atas lokus dan tempus dimana ilmu itu tengah dikaji.

Sebagai bahan evaluasi ada beberapa hal yang selayaknya patut untuk direnungkan kembali guna menggugah tekad akademisi

Indonesia sebagaimana dipaparkan Kriantono (2014: 345) yakni 1) ketertinggalan pendidikan akibat praktik imperialism, 2) Sistem politik otoriter yang membelenggu kebebasan akademis, 3) lemahnya publikasi ilmiah di level internasional, 4) penguasaan teknologi komunikasi dan bahasa internasional sebagai alat diseminasi kajian keilmuan, dan 5) dominasi cendekiawan yang berpendidikan barat. Hal hal itu layak untuk dijadikan sebagai faktor pendorong agar kita memiliki kesadaran untuk kembali mengejar ketertinggalan dan melakukan upaya upaya percepatan untuk mengejar ketertinggalan tersebut.

Perspektif tunggal jelas akan membuat totaliter ilmu pengetahuan. Menjadikan perspektif barat sebagai satu satunya sumber kebenaran dalam pengetahuan adalah sikap totaliter yang perlu disadari. Sudah saatnya kita mendesakkan perspektif local tidak saja sebagai perspektif alternatif, tetapi juga sebagai perspektif utama dalam ranah kajian keilmuan kita. Kriantono (2014) menambahkan bahwa perspektif lokal sangat diperlukan untuk kajian komunikasi karena 1) demi pembahasan yang komprehensif dan insight yang lebih mendalam untuk mengkaji fenomena dengan berbagai perspektif, 2) perlu penyesuaian dengan nilai budaya lokal dan tidak lepas dari konteks lokal seperti budaya, sistem sosial, politik, ekonomi, dan falsafah masyarakat 3) karakteristik local masyarakat timur juga menarik perhatian ilmuwan barat.

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Perkembangan muatan dan kearifan lokal sejauh ini masih belum menggembirakan dan masih dianggap sebagai sesuatu yang tidak mutakhir. Padahal kalau kita simak justru kemutakhiran itu jika ilmu pengetahuan senantiasa selaras dengan kondisi dan realitas dimana ilmu itu tengah dikembangkan. Kearifan lokal adalah bagian dari realitas sumber pengetahuan. Ia merupakan tradisi mengandung kebenaran yang diyakini oleh masyarakat secara turun temurun dan menjadi nilai luhur (adiluhung) masyarakat

yang berfungsi sebagai landasan filsafat perilaku yang baik menuju harmonisasi. Selama ini nilai adiluhung itu didesiminasikan melalui media komunikasi tradisional masyarakat setempat. Dalam masyarakat Jawa medium itu bisa melalui dongeng, getok tular, cangkrukan, seni (ludruk, ketoprak, wayang), tembangtembang, peribahasa, sanepa atau sinoman dan belum mendapat tempat didiseminasikan melalui media publikasi cetak kepada publik. (Kriantono, 2014:346)

Tantangan sesungguhnya kini adalah mengkomunikasikan dan mendiseminasikan pengetahuan lokal tersebut ke dalam kancah pengetahuan internasional. Melalui eksplorasi kearifan lokal maka ilmu pengetahuan yang digali menjadi lebih empiris, membumi, dan mentradisi dalam perilaku masyarakat karena terkonstruksi dari perpaduan sistem kepercayaan, budaya, atau olah rasa masyarakat setempat. Kearifan lokal juga bersifat pragmatis yakni sebagai pedoman perilaku dan menjadi sarana memecahkan masalah yang muncul dari interaksi sosial. Dengan demikian ia implementable dan selalu sesuai dengan apa yang tengah dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah

Demikian pula keberagaman hukum adat, hukum daerah, dan hukum nasional merupakan bentuk representasi kearifan lokal yang berlaku positif di masyarakat Indonesia. Ia merupakan perpaduan olahrasa, budaya masyarakat, budaya, nilai kepercayaan dan juga aspek geografis yang menjadi salah satu kekayaan pengetahuan di Indonesia. Budaya lokal bisa terwujud dalam benda artefak fisik, sistem kepercayaan (misal mitos), aktivitas sosial maupun norma-norma yang bisa dieksplorasi lebih dalam guna melahirkan berbagai bentuk pengetahuan baru bagi masyarakat.

Kearifan lokal ini harus diakui akan turut mewarnai tradisi keilmuan kita. Pengetahuan yang dihasilkan adalah kontekstual

sesuai budaya dan sistem kepercayaan setempat. Dengan demikian ilmu komunikasi sudah semestinya dikonstruksi dengan mengelaborasi kearifan lokal sebagai representasi karakteristik budaya dan kepercayaan. Pengembangan teori juga akan lebih dinamis. Teori tidak bebas nilai, ia akan sangat terikat dengan latar, keyakinan dan juga lingkungan dimana itu membangun pemikiran dan perspektif diri. Tradisi berbeda-beda, apa yang berlaku di masyarakat satu belum tentu sama dengan masyarakat yang lain.

Urgensi mengembangkan perspektif lokal ini penting guna mengembangkan ilmu komunikasi khas berperspektif Indonesia dan Asia yang merupakan ciri khas masyarakat timur yang memiliki perbedaan agak jauh dengan masyarakat barat.

Kini saatnya membumikan perspektif local. Cukup banyak potensi dan kearifan lokal yang bisa kita kembangkan dan eksplorasi lebih dalam. Apalagi jika ini dikombinasikan dengan kontekstualisasi ajaran islam yang diselaraskan dengan pengembangan demokrasi kewargaan maka akan melahirkan banyak elaborasi dan adopsi pengetahuan baru dalam ilmu sosial, khususnya komunikasi. Hal yang lebih strategis jika dihubungkan dengan upaya untuk menuju masyarakat masyarakat madani yang memiliki nilai nilai utama masyarakat yang menjunjung tinggi adab dan kebaikan bersama.

Masyarakat Jawa Timur selama ini dikenal sebagai masyarakat religius dan memiliki akar yang kuat dengan tradisi. Sebagai masyarakat paguyuban selama ini masyarakat memiliki solidaritas public dan semangat kolektif yang kuat dalam kehidupan sehari-hari. Mereka hidup selaras dan jarang berkonflik karena identitas yang berbeda-beda. Sebagai masyarakat jawa, masyarakat jatim mengenal unggah ungguh dan respek kepada orang lain. Toleransi kepada umat lain juga terpelihara termasuk kepada kelompok marginal. Kehidupan masyarakat di wilayah ini bisa dikatakan

harmonis dan kondusif berbasis kepada kepentingan dan kebaikan bersama.

Letak geografis Jawa Timur juga melahirkan perbedaan adat dan tradisi yang senantiasa hidup dan berkembang. Budaya lokal ini membuat identitas masyarakat juga berkembang dan dinamis. Selalu ada upaya untuk menguatkan ikatan alamiah dengan tanah air dan budaya lokalnya. Dalam beberapa hal solusi atas berbagai persoalan di dalam masyarakat Jawa Timur sebagaimana diulas para penulis dapat ditempuh melalui jalan kebudayaan, guna memperkukuh kebudayaan lokal sebagai penjaga identitas berdasarkan sosiologis dan antropologis.

Tantangan serius saat ini di dalam masyarakat Jawa Timur adalah memelihara identitas keberagamaan dan memelihara ruang public yang saling menghormati dengan kelompok lain sekaligus memantapkan *ukhuwah watoniah, ukhuwah islamiah*, dan kebaikan bersama. Kita harus mampu melanjutkan ikhtiar membumikan komunikasi sosial dalam masyarakat dengan memperluas ruang saling menghormati dan mengenang satu sama lain serta memikirkan kebaikan bersama diatas kepentingan diri dan golongan.

INDONESIA
www.penerbitkamuranim.com
Dilarang keras memotokopi
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Mari kita lanjutkan ikhtiar ini dengan bersungguh sungguh melakukan eksplorasi ilmu pengetahuan lokal sebagai bagian dari cara kita membumikan ilmu pengetahuan lokal dan mengangkat derajat kehormatan kita sebagai masyarakat akademis local ditengah hegemoni masyarakat barat. Semoga.

KBM INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

DATA SINGKAT PARA PENULIS

Surokim
Universitas Trunojoyo Madura
E-mail : surokim@trunojoyo.ac.id

Nur'annafi Farni Syam Maella
Universitas Dr. Soetomo
Nurannafi@unitomo.ac.id

Yudiana Indriastuti
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
dian_blackpanther@yahoo.com

Muhammad Fadeli
Universitas Bhayangkara Surabaya
cak_deli@yahoo.co.id

Tatag Handaka
Universitas Trunojoyo Madura
tataghandaka@gmail.com

Abdullah & Fahruddin
Universitas Darussalam Gontor
abdullah@unida.gontor.ac.id
ahmad.fahrudin@unida.gontor.ac.id

KBM INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
ini dan layout ini tanpa seijin Penerbit

Bani Eka Dartiningsih
Universitas Trunojoyo Madura
bani_eka@yahoo.co.id

Syamsul Arifin
Universitas Wiraraja Sumenep
syamsul_arifin2306@yahoo.com

Teguh Hidayatul Rachmad
Peneliti Aspikom Jawa Timur
teguhkaneshiro@gmail.com

Rendy Pahrun Wadipalapa
Peneliti, Aspikom Jawa Timur
rendypw@gmail.com

Harliantara
Universitas Dr. Soetomo Surabaya
E-mail: harliantara@unitomo.ac.id

Prof Rachmat Kriyantono, Ph.D
Anggota Dewan Pakar ASPIKOM Jawa Timur
Email: rachmat_kr@ub.ac.id

INDONESIA
www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit